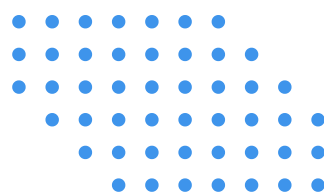




**Pusat
Pengembangan SDM
Perhubungan Laut**

RENCANA STRATEGIS 2025-2029



*keputusan Kepala PPSDMPL
KP-PPSDMPL 240 Tahun 2025*

**Badan Pengembangan
SDM Perhubungan**

**Kementerian
Perhubungan**





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No.5
Jakarta 10110

Telp : (021) 3483 0763
(HUNTING) 3483 0764

Fax. : (021) 3483 0762
E-mail: pusbanglaut@dephub.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR : KP – PPSDMPL 240 TAHUN 2025

T E N T A N G

RENCANA STRATEGIS
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 perlu disusun dan dilaksanakan Rencana Strategis setiap Kementerian/ Lembaga Tahun 2025-2029;
- b. bahwa Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut merupakan unit kerja eselon 2 yang melaksanakan fungsi teknis pengembangan sumber daya manusia perhubungan laut pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut tentang Rencana Strategis Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25);
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
6. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1710);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1049);

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2024 tentang Peta Proses, Peta Subproses, dan Peta Relasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
14. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor KP-BPSDMP 227 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2025-2029.

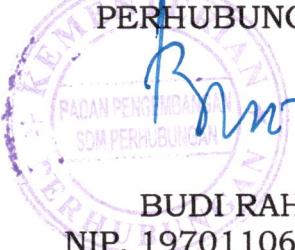
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis (RENSTRA) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut (PPSDMPL) Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu terdiri atas:
- a. Narasi RENSTRA PPSDMPL Tahun 2025-2029 yang memuat evaluasi kinerja periode sebelumnya, potensi, isu strategis dan permasalahan pembangunan sumber daya manusia perhubungan laut, visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia perhubungan laut, serta dukungan kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, manajemen risiko dan target kinerja pembangunan guna pengendalian, evaluasi, dan monitoring tata kelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat ini;
 - b. Kerangka Kinerja dan Pendanaan RENSTRA PPSDMPL Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat ini; dan
 - c. Manual Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan RENSTRA PPSDMPL Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat ini.

- KETIGA : Rencana Strategis Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu wajib digunakan sebagai pedoman oleh setiap unit kerja di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut termasuk Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga dibawahnya.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 akan dievaluasi secara berkala disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi.
- KELIMA : Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Desember 2025

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN LAUT,



BUDI RAHARDJO
NIP. 197011061997031001

SALINAN Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan;
2. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan.

LAMPIRAN I

Keputusan Kepala Pusat Pengembangan
SDM Perhubungan Laut
Nomor : KP – PPSDMPL 240 TAHUN 2025
Tanggal: 01 Oktober 2025
Tentang: Rencana Strategis Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan Tahun 2025-2029

NARASI RENSTRA

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2025 - 2029

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur ke-hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Tahun 2025 - 2029 telah selesai disusun.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut merupakan unit setingkat eselon dua dan berada dibawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan. Sebagai unit kerja setingkat eselon dua, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut diharuskan mempunyai dokumen Rencana Strategis yang berisi gambaran rencana kegiatan yang berorientasi pada hasil, yang akan dicapai oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan peluang yang ada. Dokumen Rencana Strategis ini memuat kegiatan, sasaran kegiatan dan indikator capaian serta kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode pembangunan jangka menengah Tahun 2025-2029.

Renstra Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut mengacu dan berpedoman pada dokumen Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029. Renstra Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut pada periode pembangunan 2025-2029, serta merupakan dasar dalam melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan monitoring capaian kinerjanya.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut yang telah memberikan substansi, data dan sumbang saran dalam penyusunan Rencana Strategis Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Tahun 2025-2029.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita. Amin.

Jakarta, 15 Desember 2025

**KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT**

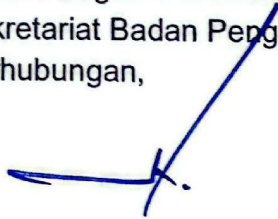


Budi Rahardjo, S.Sos., M.Si.

LEMBAR PERSETJUAN
KESELARAN RENCANA STRATEGIS PUSAT PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN LAUT
DENGAN RENCANA STRATEGIS BPSDM PERHUBUNGAN

Persetujuan dan Keselarasan ini disusun sebagai instrumen untuk memastikan bahwa Rencana Strategis Unit Kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan telah diselaraskan dengan arah kebijakan, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta program prioritas yang tertuang dalam Renstra BPSDMP Perhubungan Tahun 2025–2029.

Diperiksa,
Kepala Bagian Perencanaan
Sekretariat Badan Pengembangan SDM
Perhubungan,



ARIF KURNIAWAN
NIP. 19820822 200812 1 001

Mengetahui,
Sekretaris Badan
Pengembangan SDM Perhubungan,



WISNU HANDOKO
NIP. 19731031 199903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
1. BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. KONDISI UMUM.....	3
1.2. KONDISI UMUM LINGKUNGAN INTERNAL	24
1.2.1. Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman).....	24
1.2.2. Manajemen Risiko	26
1.2.3. Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2024.....	28
1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	30
1.3.1. Potensi dan Isu Strategis.....	31
1.3.2. Permasalahan	39
2. BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	42
2.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029	42
2.2. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BPSDM PERHUBUNGAN 2025-2029 ..	48
2.3. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PUSAT PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN LAUT 2025-2029	54
2.4. Manajemen Risiko Berdasarkan Sasaran Kegiatan PPSDMPL	58
3. BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	61
3.1. ARAHAN PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025-2029	61
3.2. ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025-2029	63
3.3. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029 ..	65
3.4. ARAH KEBIJAKAN BPSDM PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029	68
3.5. ARAH KEBIJAKAN PUSAT PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2025-2029	71

3.6.	KERANGKA REGULASI.....	75
3.7.	KERANGKA KELEMBAGAAN.....	79
3.8.	MANAJEMEN RISIKO.....	82
4.	BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	87
4.1.	TARGET KINERJA BPSDM PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029	87
4.2.	TARGET KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2025-2029	88
4.3.	KERANGKA PENDANAAN PUSAT PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2025-2029.....	93
4.3.1.	Kebutuhan Anggaran dan Sumber Pendanaan	93
4.3.2.	Alokasi Pembiayaan Program dan Kegiatan.....	93
4.3.3.	Kerangka dan Alokasi Pembiayaan Program Prioritas Nasional	127
5.	BAB V PENUTUP.....	129

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Akreditasi Program Studi pada masing-masing PTKL di Lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.....	9
Tabel 1.2. Data Jumlah Pegawai di Lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut	12
Tabel 1.3. Perubahan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja pada Rencana Strategis Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Tahun 2020-2024.....	14
Tabel 1.4. Capaian Kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Tahun 2020-2024.....	20
Tabel 1.5. Isu Strategis Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.....	38
Tabel 2.1. Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029.....	44
Tabel 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan PPSDMPL Tahun 2025-2029	73
Tabel 3.2. Kerangka Regulasi dan Urgensi Regulasi.....	77
Tabel 3.3. Kebutuhan Penguatan Kelembagaan PPSDMPL Tahun 2025-2029	81
Tabel 3.4. Manajemen Resiko pada masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan	83
Tabel 4.1. Indikator Kinerja Program BPSDMP Tahun 2025-2029.....	87
Tabel 4.2. Target Kinerja Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut.....	90
Tabel 4.3. Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Target Kinerja dan Indikasi Pendanaan	94
Tabel 4.4. Belanja Modal diluar Alokasi Pembiayaan Kegiatan	103
Tabel 4.5. Alokasi Pembiayaan Rincian Output PPSDMPL dalam mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025-2029	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.....	5
Gambar 1.2.	Data Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian di Lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.....	12
Gambar 2.1.	Struktur Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam Perspektif <i>Balanced Score-card</i>	46
Gambar 2.2.	Peta Strategi BPSDM Perhubungan Tahun 2025-2029.....	54
Gambar 3.1.	8 (delapan) Prioritas Nasional dalam Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.....	63
Gambar 3.2.	Fokus Kementerian Perhubungan dalam Penyelenggaraan Bidang Transportasi Tahun 2025-2029	67

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 15 ayat 1 dan pasal 19 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap kementerian/lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) guna menjaga konsistensi keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan disamping untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Sebagai unit kerja eselon II di lingkungan Kementerian Perhubungan, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, diharuskan untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) guna menjaga konsistensi keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan disamping untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Muatan materi Renstra Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan terdiri dari rincian kegiatan yang mencerminkan *core bussiness* Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, dan dilengkapi dengan indikator kinerja, target serta alokasi anggaran yang merupakan penjabaran dari dokumen Renstra di atasnya. Renstra Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan ini merupakan pedoman bagi unit kerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut dalam menjalankan tugas manajemen, koordinasi dan tugas teknis lainnya di lingkup Kementerian Perhubungan selama 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 - 2029. Renstra Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan disusun dalam rangka mendukung :

Terlaksananya penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan serta pemantauan dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan laut

Berdasarkan pada hal tersebut, dokumen Renstra Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 menjadi dasar perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan pada Tahun 2025-2029.

Renstra Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Sistematika Renstra Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 terinci sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat kondisi umum, potensi, permasalahan dan isu strategis

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Perhubungan, visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan, serta visi, misi, tujuan dan sasaran Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Bab ini memuat arahan pengarusutamaan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029, arahan pembangunan kewilayahan jangka menengah tahun 2025-2029, arah kebijakan Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029, arah kebijakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tahun 2025-2029, arah kebijakan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut tahun 2025-2029, kerangka regulasi yang dibutuhkan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, kerangka kelembagaan yang menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut serta Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merencanakan respons terhadap ketidakpastian pencapaian target indikator sehingga tetap dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan meminimalkan kerugian.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab ini memuat target kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tahun 2025-2029, target kinerja dan kerangka pendanaan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan.

1.1. KONDISI UMUM

Permintaan jasa transportasi di Indonesia (*demand side*) mengalami peningkatan sangat pesat dan pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Tingginya permintaan jasa transportasi jika tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia di bidang transportasi (*supply side*) yang memadai akan menghambat pembangunan sektor transportasi, serta berdampak pada percepatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Indonesia.

Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor perhubungan laut memainkan peran krusial dalam mendukung pembangunan nasional Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 99.000 kilometer. Perhubungan laut tidak hanya menjadi tulang punggung konektivitas antar wilayah, tetapi juga pendorong utama pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara maritim, lebih dari 90% perdagangan internasional Indonesia dilakukan melalui jalur laut, dengan pelabuhan-pelabuhan utama seperti Tanjung Priok, Belawan, dan Makassar menjadi simpul penting dalam rantai pasok global. SDM Perhubungan Laut yang terampil, seperti nakhoda, anak buah kapal (ABK), petugas pelabuhan, dan tenaga teknis lainnya, memastikan operasional pelayaran berjalan aman, efisien, dan sesuai standar internasional, seperti yang ditetapkan oleh *International Maritime Organization* (IMO).

SDM Perhubungan Laut berperan dalam mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan keahlian dalam navigasi, manajemen logistik, dan teknologi maritim, mereka mampu mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan dan memastikan kapal-kapal penumpang dan barang dapat beroperasi dengan aman dan tepat waktu, memberikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi bagi masyarakat di daerah terluar di pulau terpencil. Dengan pengembangan SDM perhubungan laut yang berkualitas, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai kekuatan maritim global, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan upaya mewujudkan Sumber Daya Manusia Perhubungan (SDM) yang handal dan siap menghadapi tantangan kemajuan pesat khususnya di bidang transportasi laut, maka Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut harus menyiapkan SDM Perhubungan Laut yang kompeten dan profesional melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan khususnya di bidang transportasi moda laut. Pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan diselenggarakan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan sesuai dengan kebutuhan, sehingga program-program yang dilaksanakan dapat berjalan efisien, optimal dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mempunyai ketugasan melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi laut. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, keberadaan dari Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang merupakan unit organisasi setingkat eselon II di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, memiliki peran penting peran strategis dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di sektor perhubungan laut dalam lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut bertugas memastikan bahwa sumber daya manusia di bidang pelayaran, kepelabuhanan, dan keselamatan maritim memiliki keahlian yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional

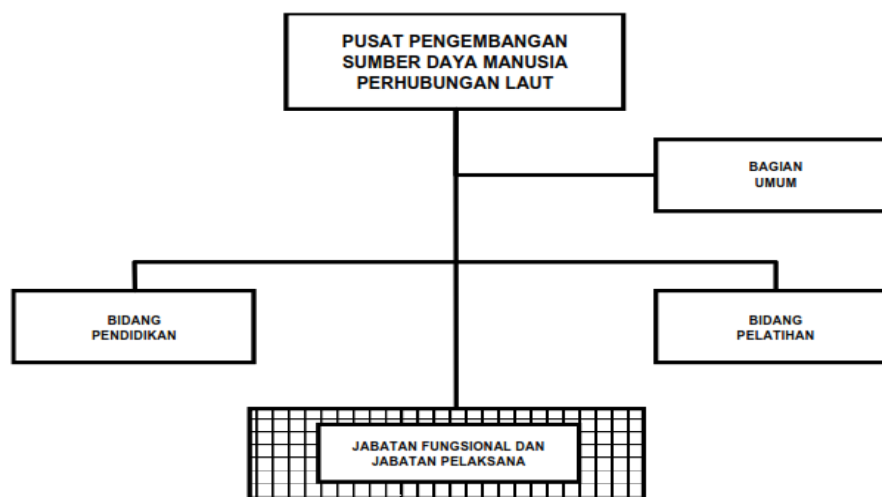
Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi laut. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang koordinasi program, penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan, anggaran, rencana kebutuhan sumber daya manusia pendidikan dan pelatihan, jenis pelatihan, jumlah peserta pelatihan, sertifikasi profesi, akreditasi, dan penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, program pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, standardisasi dan teknologi pendidikan dan pelatihan, standardisasi standar kompetensi kerja sektor transportasi laut, serta pemberian rekomendasi dan sertifikasi program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. Penyiapan pelaksanaan di bidang koordinasi program, penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan, anggaran, rencana kebutuhan sumber daya manusia pendidikan dan pelatihan, jenis pelatihan, jumlah peserta pelatihan, sertifikasi profesi, akreditasi, dan penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, program pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, standardisasi dan teknologi pendidikan dan pelatihan, standardisasi standar kompetensi kerja sektor transportasi laut, serta pemberian rekomendasi dan sertifikasi program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. Penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang koordinasi program, penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan, anggaran, rencana kebutuhan sumber daya manusia pendidikan dan pelatihan, jenis pelatihan, jumlah peserta pelatihan, sertifikasi profesi, akreditasi, dan penyusunan kerja

sama, kurikulum, silabus, pedoman pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, program pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, standardisasi dan teknologi pendidikan dan pelatihan, standardisasi standar kompetensi kerja sektor transportasi laut, serta pemberian rekomendasi dan sertifikasi program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan

- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan kinerja, dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, pemantauan manajemen risiko dan penyelenggaraan kepatuhan internal, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, penyusunan peraturan perundang-undangan, serta sosialisasi dan dokumentasi hukum, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pelaksanaan anggaran, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum, penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan tindak lanjut hasil rivi laporan keuangan dan audit, manajemen ASN, jabatan fungsional, kerja sama, pengelolaan hubungan masyarakat, dukungan keterbukaan informasi publik, administrasi ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan keprotokolan, penataan organisasi dan tata laksana, dukungan reformasi birokrasi, serta pengumpulan dan pengolahan data.

Struktur organisasi/kelembagaan dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada **Gambar 1.1.** berikut.



sumber: PM 4 Tahun 2025

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut memiliki 3 (tiga) unit kerja eselon III yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, peraturan perundangundangan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pelaksanaan keuangan, sumber daya manusia, kerja sama, hubungan masyarakat, administrasi ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan keprotokolan, penataan organisasi dan tata laksana, dukungan reformasi birokrasi, pengumpulan dan pengolahan data.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan kinerja, dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, pemantauan manajemen risiko dan penyelenggaraan kepatuhan internal, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, peraturan perundangundangan, serta sosialisasi dan dokumentasi hukum,
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pelaksanaan anggaran, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum, penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan tindak lanjut hasil riviur laporan keuangan dan audit, manajemen ASN, jabatan fungsional, kerja sama, pengelolaan hubungan masyarakat, dukungan keterbukaan informasi publik, administrasi ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan keprotokolan;
- c. penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana, serta dukungan reformasi birokrasi; dan
- d. penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data.

2. Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi program, penjaminan mutu pendidikan, anggaran, rencana kebutuhan sumber daya manusia pendidikan, sertifikasi profesi, akreditasi, dan penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, program pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, standarisasi dan teknologi pendidikan, serta pemberian rekomendasi dan sertifikasi program penyelenggaraan Pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi program, penjaminan

mutu pendidikan, anggaran, rencana kebutuhan sumber daya manusia pendidikan, sertifikasi profesi, akreditasi;

- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, program pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, standardisasi dan teknologi pendidikan; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian rekomendasi dan sertifikasi program penyelenggaraan pendidikan.

3. Bidang Pelatihan

Bidang Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi program, penjaminan mutu pelatihan, anggaran, rencana kebutuhan sumber daya manusia pelatihan, jenis pelatihan, jumlah peserta pelatihan, sertifikasi profesi, akreditasi, dan penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pelatihan, program pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan pelatih dan tenaga pelatihan, standardisasi dan teknologi pelatihan, standardisasi standar kompetensi kerja sektor transportasi laut, serta pemberian rekomendasi dan sertifikasi program penyelenggaraan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi program, penjaminan mutu pelatihan, anggaran, rencana kebutuhan sumber daya manusia pelatihan, jenis pelatihan, jumlah peserta pelatihan, sertifikasi profesi, akreditasi
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pelatihan, program pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan pelatih dan tenaga pelatihan, standardisasi dan teknologi pelatihan, standardisasi standar kompetensi kerja sektor transportasi laut; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian rekomendasi dan sertifikasi program penyelenggaraan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut juga berperan sebagai pembina dan koordinator pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh 10 (sepuluh) Perguruan Tinggi Kementerian

Lembaga (PTKL) dan 2 (dua) Balai Pendidikan dan Pelatihan sebagai unit kerja lembaga pendidikan pelayaran di bawah koordinasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut. Keduabelas lembaga pendidikan pelayaran tersebut adalah:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta;
2. Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta;
3. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang;
4. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar;
5. Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Surabaya;
6. Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Banten;
7. Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Barombong;
8. Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Malahayati;
9. Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Sumatera Barat;
10. Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Sulawesi Utara;
11. Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Sorong;
12. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut (PPSDMPL) sebagai pembina pendidikan vokasi dan profesional bidang pelayaran memiliki mandat untuk memastikan bahwa seluruh Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL) Lingkup Perhubungan Laut menyelenggarakan program pendidikan yang memenuhi standar kualitas nasional. Berdasarkan data akreditasi program studi pada 10 PTKL, secara umum mutu penyelenggaraan pendidikan telah menunjukkan capaian yang baik, ditandai oleh semakin banyaknya program studi yang memperoleh peringkat **Unggul**, **Baik Sekali**, maupun **Baik**, baik dari **BAN-PT** maupun **LAM Teknik**.

Pada STIP Jakarta, program studi D-IV Nautika dan D-IV Teknik telah memperoleh akreditasi **Unggul**, mencerminkan pencapaian tertinggi dalam standar mutu pendidikan tinggi nasional. Status tersebut memperlihatkan bahwa dua program inti pelatihan perwira pelayaran niaga ini telah memenuhi kriteria komprehensif yang mencakup tata kelola, kurikulum, sarana-prasarana, sumber daya manusia, serta penjaminan mutu internal. Selain itu, sebagian besar program studi lainnya pada PTKL seperti Politeknik Pelayaran Surabaya, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, dan Politeknik Pelayaran Makassar memperoleh akreditasi **Baik Sekali** dan **Baik**, mencerminkan kualitas yang terus berkembang.

Namun demikian, masih terdapat beberapa program studi yang perlu mendapatkan perhatian untuk peningkatan akreditasi pada periode Renstra 2025–2029. Beberapa prodi di berbagai PTKL masih berada pada tingkat **Baik** dan akan menghadapi akhir masa berlaku akreditasi antara tahun 2025–2027. Kondisi ini menuntut strategi penguatan kapasitas institusi, terutama dalam hal peningkatan kompetensi dosen, pembaruan kurikulum berbasis kompetensi, serta pemenuhan standar sarana-prasarana pendidikan pelayaran baik sesuai ketentuan **STCW (Standards of Training, Certification, and Watchkeeping)** for Seafarers maupun standar nasional

pendidikan tinggi. Selain itu, terdapat pula prodi dengan masa akreditasi yang akan berakhir dalam waktu dekat sehingga memerlukan langkah pendampingan khusus untuk memastikan kesiapan reakreditasi.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut perlu menetapkan prioritas pembinaan yang terstruktur, antara lain melalui program peningkatan mutu akademik, harmonisasi kurikulum antar-PTKL, percepatan sertifikasi kompetensi dosen dan instruktur, serta pembangunan sistem penjaminan mutu internal yang lebih kuat. Upaya ini penting agar seluruh PTKL mampu mencapai akreditasi minimal **Baik Sekali**, dan pada akhirnya memperluas jumlah program studi berakreditasi **Unggul**, sehingga pada Renstra PPSDMPL 2025–2029 diarahkan tidak hanya untuk mempertahankan capaian akreditasi unggulan, tetapi juga untuk mengangkat kualitas program studi yang saat ini masih pada jenjang dasar agar memenuhi kebutuhan penyediaan SDM pelayaran yang kompeten, tersertifikasi, dan siap bersaing pada tingkat nasional maupun internasional.

Tabel 1.1. Data Akreditasi Program Studi pada masing-masing PTKL di Lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut

NO	PERGURUAN TINGGI	PROGRAM STUDI		AKREDITASI PRODI	BATAS AKHIR
1	STIP Jakarta	1	D IV Nautika	Unggul	06 Maret 2029
		2	D IV Teknik	Unggul	20 April 2029
		3	D IV KALK	Unggul	10 April 2029
		4	S2 Terapan Rekayasa Keselamatan dan Resiko	Baik Sekali	20 Desember 2029
		5	S2 Terapan Pemasaran, Inovasi, dan Teknologi	Baik Sekali	13 Oktober 2028
2	PIP Semarang	1	D IV Nautika	Unggul	12 April 2030
		2	D IV Teknik	Unggul	20 Agustus 2030
		3	D IV KALK	Unggul	30 Desember 2025
3	PIP Makassar	1	D IV Nautika	Unggul	24 Agustus 2026
		2	D IV Teknik	Unggul	16 November 2026
		3	D IV KALK	Unggul	28 Desember 2026
4	POLTEKPEL Banten	1	D III Studi Nautika	BAIK	09 Februari 2026
		2	D III Permesinan Kapal	BAIK	15 November 2026

NO	PERGURUAN TINGGI	PROGRAM STUDI		AKREDITASI PRODI	BATAS AKHIR
		3	D III Manajemen Transportasi Laut	BAIK	31 Agustus 2026
5	POLTEKPEL Surabaya	1	D III Nautika	UNGGUL	20 April 2030
		2	D III Teknik	UNGGUL	20 April 2029
		3	D III Elektro Pelayaran	UNGGUL	20 April 2029
		4	D IV Teknologi Rekayasa Operasi Kapal (Nautika)	BAIK	23 Desember 2026
		5	D IV Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal (Teknik)	BAIK	17 November 2026
		6	D IV Transportasi Laut	BAIK	01 Desember 2026
		7	D IV Teknologi Rekayasa Kelistrikan Kapal (Elektro Pelayaran)	BAIK	17 Nopember 2026
6	POLTEKPEL Barombong	1	D III Studi Nautika	BAIK	05 Mei 2026
		2	D III Permesinan Kapal	BAIK	05 Mei 2026
		3	D III Manajemen Transportasi Laut	BAIK	07 Juni 2027
7	POLTEKPEL Sumatera Barat	1	D III Studi Nautika	BAIK	22 Desember 2025
		2	D III Teknologi Nautika	BAIK	22 Desember 2025
		3	D IV Transportasi Laut	BAIK SEKALI	20 Agustus 2030
8	POLTEKPEL Malahayati	1	D III Studi Nautika	BAIK	28 Mei 2026
		2	D III Permesinan Kapal	BAIK	20 Desember 2029
		3	D III Sistem Kelistrikan Kapal	BAIK	4 Oktober 2027
9	POLTEKPEL Sorong	1	D III Studi Nautika	BAIK Sekali	20 Agustus 2030
		2	D III Permesinan Kapal	BAIK	29 September 2026
		3	D III Manajemen Transportasi Laut	BAIK	04 Oktober 2027
10	POLTEKPEL Sulawesi Utara	1	D III Studi Nautika	BAIK	22 Desember 2026
		2	D III Permesinan Kapal	BAIK	22 Desember 2026
		3	D III Manajemen Transportasi Laut	BAIK	22 Desember 2026

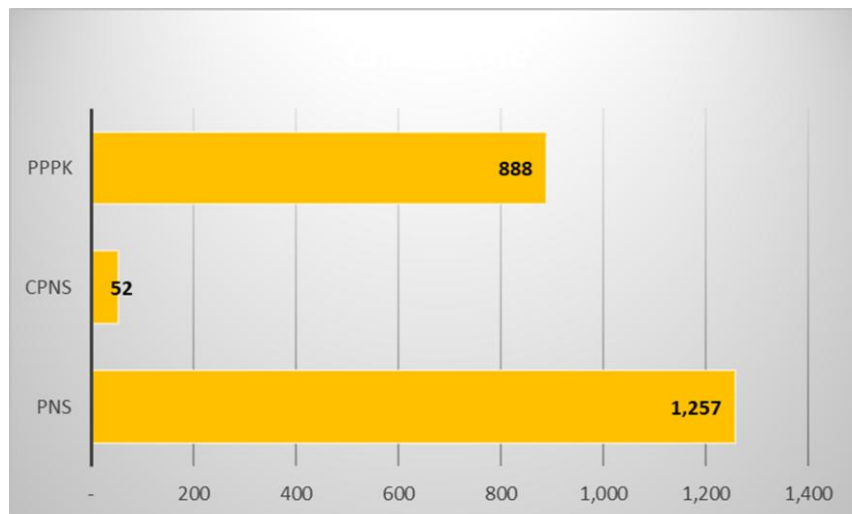
Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut didukung dengan keberadaan sumber daya manusia yang mempunyai peran sangat vital dalam proses pencapaian tujuan. Sumber daya manusia akan berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Kemajuan organisasi selain tergantung pada sarana dan prasarana juga sangat bergantung pada kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku utama dalam menjalankan tugas fungsi masing-masing individu. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas akan memiliki kemauan dan kemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus menerus dan berkelanjutan.

Dalam mendukung tercapainya kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, berdasarkan data Juli 2025, jumlah Pegawai di lingkungan kerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut sebanyak 1.257 orang PNS, 888 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 52 orang CPNS. Total keseluruhan pegawai di unit kerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut berikut 10 PTKL dan 2 Balai yang berada dibawah koordinasi PPSDMPL adalah 2.197 orang.

Sumber daya manusia di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut secara lebih rinci disajikan sebagai berikut.

Tabel 1.2. Data Jumlah Pegawai di Lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut

NO	UPT	Jumlah
1	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut	84
2	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran	296
3	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	224
4	Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	209
5	Politeknik Pelayaran Sorong	137
6	Politeknik Pelayaran Banten	191
7	Politeknik Pelayaran Surabaya	255
8	Politeknik Pelayaran Barombong	205
9	Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	128
10	Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara	128
11	Politeknik Pelayaran Malahayati	127
12	Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran	115
13	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta	98
JUMLAH		2.197



Gambar 1.2. Data Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian di Lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut

Guna memastikan siklus perencanaan yang berkelanjutan, manajemen kinerja yang sehat dan memastikan kebijakan perencanaan didasarkan pada realisasi kinerja

periodisasi sebelumnya, dilakukan evaluasi capaian kinerja terhadap indikator kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Tahun 2020-2024. Dengan evaluasi yang komprehensif, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut dapat mengidentifikasi keberhasilan yang perlu dipertahankan, kelemahan struktural yang perlu diperbaiki, serta peluang penguatan peran strategis PPSDMPL dalam mendukung agenda pembangunan SDM transportasi laut nasional.

Pada periode pembangunan tahun 2020-2024, berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut sesuai tugas dan fungsinya guna mendukung tercapainya sasaran kegiatan dan target indikator yang telah ditentukan. Indikator kinerja pada RENSTRA PPSDMPL 2020-2024 mengalami perubahan seiring dengan terbitnya SEB antara BAPPENAS dengan Kementerian Keuangan terkait Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) pada Juni Tahun 2020. Perubahan indikator kinerja tersebut dilegalkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Nomor SK.261/BPSDMP-2020, dimana terdapat penambahan jumlah indikator menjadi 18 indikator dari sebelumnya 8 indikator. Indikator kinerja tersebut disesuaikan lagi menjadi 15 indikator pada tahun 2022 melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Nomor SK.59/BPSDMP-2022.

Tabel 1.3. Perubahan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja pada Rencana Strategis Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Tahun 2020-2024

TARGET RENSTRA 2020-2024		SK.261/BPSDMP-2020		SK.59/BPSDMP-2022	
Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator
SK 1.Terwujudnya kerjasama dan kemitraan yang baik dalam rangka mewujudkan kemandirian dan profesionalisme lembaga	KK 1.Presentase dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing yang telah dilaksanakan	SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 1.Indeks RB Kementerian Perhubungan	SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 1.Indeks RB Kementerian Perhubungan
SK 2. Meningkatnya kinerja dukungan pembinaan manajemen dan teknis pendidikan dan pelatihan	IKK 2.Persentasi dukungan pembinaan manajemen dan teknis pendidikan dan pelatihan		IKP 2.Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran		
SK 3. Meningkatnya Pemenuhan Kurikulum silabi yang berbasis kompetensi dan sesuai perkembangan IPTEK	IKK 3.persentase kurikulum silabi Diklat Transportasi Perhubungan Laut yang telah di reviu sesuai kebutuhan industri sektor transportasi	SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	IKP 3.Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten	SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	IKP 3.Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten

TARGET RENSTRA 2020-2024		SK.261/BPSDMP-2020		SK.59/BPSDMP-2022	
Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator
S 4. Meningkatnya kualitas Perencanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	IKK 4.persentase Keterpaduan antara Perencanaan dengan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	SK.DL.01.02. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dengan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Lembaga yang Sesuai Standar	IKK 10.Persentase keterpaduan antara perencanaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang sesuai standar serta lembaga yang terakreditasi	SK.DL.01.02. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dengan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Lembaga yang Sesuai Standar	IKK 10.Persentase keterpaduan antara perencanaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang sesuai standar serta lembaga yang terakreditasi
SK 5. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Sarana & Prasarana dan sistem informasi yang memenuhi Standar Diklat Transportasi	KK 5.persentase Sistem Informasi yang di update dan dapat di akses	SK.DL.01.03. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi	IKK 11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi	SK.DL.01.03. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi	IKK 11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi
SK 6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran BPSDMP	IKK 6.Nilai AKIP BPSDM Perhubungan (nilai)		IKK 12. Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi		IKK 12. Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi
	IKK 7.Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan (%)	SK.WA.03.02. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDM	SK.WA.03.02. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDM

TARGET RENSTRA 2020-2024		SK.261/BPSDMP-2020		SK.59/BPSDMP-2022	
Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator
	IKK 8.Nilai Pencapaian Tingkat Maturitas SPIP		IKK 14. Indeks Pengawasan Kearsipan BPSDMP		IKK 14. Indeks Pengawasan Kearsipan BPSDMP
			IKK 15. Indeks Pengelolaan Aset BPSDMP		IKK 15. Indeks Pengelolaan Aset BPSDMP
			IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP		IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP
			IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP		IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP
			IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP		IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP
			IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran BPSDMP		IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran BPSDMP
		SK.DL.01.04. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum SDM Transportasi	IKK 22. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	SK.DL.01.04. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum SDM Transportasi	IKK 22. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi

TARGET RENSTRA 2020-2024		SK.261/BPSDMP-2020		SK.59/BPSDMP-2022	
Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator
		SK.WA.03.03. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	IKK 23.Indeks Kelembagaan BPSDMP	SK.WA.03.03. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	IKK 24.Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPSDMP
			IKK 9.2.Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP		
			IKK 24.Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPSDMP		
		SK.WA.03.05. Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDM Perhubungan	IKK 25.Indeks SPBE BPSDMP	SK.WA.03.05. Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDM Perhubungan	IKK 25.Indeks SPBE BPSDMP

sumber: Renstra Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 dan LKIP PPSDMPL Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Renstra PPSDMPL 2020–2024 mencapai tingkat keberhasilan yang sangat baik. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024, rata-rata capaian kinerja sasaran strategis mencapai lebih dari 100 persen, menandakan bahwa sebagian besar target kinerja telah tercapai bahkan melampaui harapan. Capaian ini tidak hanya mencerminkan peningkatan kinerja internal lembaga, tetapi juga menunjukkan keberhasilan PPSDMPL dalam beradaptasi terhadap dinamika perubahan kebijakan nasional, transformasi digital birokrasi, serta tuntutan globalisasi sektor maritim. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan, misalnya, menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian sebesar 105,91 persen dari target yang telah ditetapkan. Begitu pula dengan indikator tingkat pemenuhan sumber daya manusia transportasi laut yang kompeten, yang berhasil mencapai realisasi sebesar 103,86 persen dari target, menandakan keberhasilan PPSDMPL dalam menyiapkan tenaga pelaut dan aparatur yang tersertifikasi sesuai standar nasional maupun internasional. Nilai SAKIP BPSDMP juga mencatat hasil optimal dengan capaian 102,7 persen dari target, sedangkan indeks SPBE menunjukkan stabilitas capaian 100 persen selama lima tahun berturut-turut. Keempat capaian tersebut menggambarkan efektivitas implementasi kebijakan, konsistensi dalam penerapan prinsip akuntabilitas, serta kematangan tata kelola berbasis digital yang semakin kuat di lingkungan PPSDMPL.

Namun demikian, dinamika kebijakan dan tantangan manajerial yang berkembang selama periode 2020–2024 juga mendorong dilakukannya penyesuaian terhadap beberapa indikator kinerja. Berdasarkan hasil telaah terhadap LKjIP 2024 dan keputusan internal lembaga, terjadi pembaruan indikator kinerja kegiatan (IKK) melalui Keputusan Kepala BPSDMP Nomor 59/BPSDMP-2022. Penyesuaian ini dilakukan untuk memperkuat keterukuran hasil (outcome-based performance) serta menjamin keselarasan indikator dengan kebijakan strategis Kementerian Perhubungan dan arah reformasi birokrasi nasional. Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa indikator baru yang ditambahkan, seperti Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPSDMP, Indeks SPBE BPSDMP, dan Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi. Penambahan ini menandai perluasan ruang lingkup pengukuran kinerja, tidak hanya pada aspek pelatihan dan pengembangan SDM semata, tetapi juga pada dimensi pengelolaan kelembagaan, digitalisasi proses, serta penguatan sistem manajemen aparatur. Selain itu, indikator lama juga mengalami penyesuaian nomenklatur dan cakupan, seperti indikator “Kualitas Penyelenggaraan Diklat” yang diperluas menjadi dua indikator terpisah, yakni “Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan SDM Transportasi” dan “Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Pengembangan SDM Transportasi”. Reformulasi ini dilakukan agar penilaian kinerja lebih spesifik terhadap fungsi pendidikan dan pelatihan yang berbeda namun saling melengkapi.

Hasil pengukuran kinerja terhadap setiap sasaran strategis menunjukkan kecenderungan capaian yang sangat positif. Dalam aspek tata kelola pemerintahan yang baik, PPSDMPL berhasil mewujudkan nilai Reformasi Birokrasi dan SPBE di atas

target, mencerminkan implementasi prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada dimensi pengembangan kompetensi SDM transportasi, capaian indikator tingkat pemenuhan SDM yang kompeten mencapai 122,19 persen dari target, menggambarkan peningkatan signifikan dalam jumlah dan kualitas lulusan diklat yang tersertifikasi serta diakui secara nasional dan internasional. Di sisi lain, aspek akuntabilitas dan transparansi, khususnya yang diukur melalui Indeks SPIP dan Indeks Kearsipan, masih menunjukkan capaian di bawah target ideal. Nilai SPIP yang hanya mencapai 89,68 persen menandakan bahwa sistem pengendalian intern perlu terus diperkuat agar dapat memastikan integritas pelaksanaan program secara menyeluruh. Demikian pula dengan nilai kearsipan yang masih berada pada angka 91,03 persen, menunjukkan perlunya penguatan tata kelola dokumen dan sistem arsip digital agar mendukung prinsip akuntabilitas publik secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian rata-rata kinerja Renstra PPSDMPL Tahun 2020–2024 mencapai 103,19 persen. Angka ini menegaskan bahwa PPSDMPL berhasil menjaga stabilitas kinerja lembaga dalam menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis. Perubahan indikator pada tahun 2022 terbukti memperkuat fokus kelembagaan pada aspek transformasi digital, pengelolaan aparatur sipil negara yang profesional, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan maritim. Meskipun demikian, hasil evaluasi juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan maturitas SPIP, pengawasan kearsipan, serta optimalisasi manajemen risiko kelembagaan agar efektivitas tata kelola dapat meningkat secara menyeluruh. Dengan capaian yang telah diperoleh, PPSDMPL memiliki landasan yang kuat untuk melangkah menuju periode perencanaan 2025–2029, dengan orientasi baru pada integrasi digitalisasi pendidikan maritim, peningkatan daya saing global tenaga pelaut, serta penguatan sistem manajemen mutu kelembagaan yang adaptif terhadap tantangan era industri 4.0 dan ekonomi biru.

Hasil evaluasi kinerja kegiatan strategis Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut tahun 2020-2024 sampai dengan Triwulan 2 tersaji pada Tabel 1.4. berikut

Tabel 1.4. Capaian Kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Tahun 2020-2024

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	SP.WA.03 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1 IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	indeks	75	78,39	104,52	79	78,39	99,23	79,5	79,2	99,62	77*)	78,4	101,82	80.57*)	85.26	105.82
		2 IKP 2. Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	--	--	100	--	100	--	--	--
2	SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	3 IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten	%	85	85	100	85	85	100	85	85	100	85	85	100	89,2*)	99,08	111,07
3	SK.DL.01.02 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dengan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Lembaga	4 IKK 10. Persentase keterpaduan antara perencanaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang sesuai standar serta	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No.	Sasaran	Indikator		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	yang Sesuai Standar		lembaga yang terakreditasi																
4	SK.DL.01.03. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi	5	IKK 11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi	%	70	70	100	80	80	100	87	87	100	100*)	100	100	100*)	100	100
		6	IKK 12. Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi	%	90	90	100	90	90	100	90	90	100	90	90	100	100*)	90	90
5	SK.WA.03.02 Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	7	IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDM	level	3,2	2,986	93,31	3,3	3,693	111,91	3,4	3,576	119,2	3,1*)	3,2	103,2	3,771*)	3.382	89,68
		8	IKK 14. Indeks Pengawasan Kearsipan BPSDMP	nilai	91	0	0	91,5	91,51	100,01	91,5	91,5	100	91*)	91,03	100,03	92	92	100
		9	IKK 15. Indeks Pengelolaan	nilai	75	75	100	76	76	100	77	77	100	78	78	100	80*)	80	100

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Aset BPSDMP																
		10 IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	nilai	80,2	80,2	100	84,2	84,2	100	86,2	86,2	100	88,2	89,79	101,80	90,2	90	99,78
		11 IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP	nilai	78	78	100	80	80	100	82	82	100	84	84	100	85	85	100
		12 IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP	nilai	85	81,91	96,36	82,14	82,14	100	80,53*)	80,53	100	76,14*)	76,14	100	77,90*)	77,90	100
		13 IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran BPSDMP	nilai	70	70	100	71	71	100	72	72	100	73	73	100	74	74	100
6	SK.DL.01.04 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum SDM Transportasi	14 IKK 22. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
7	SK.WA.03.03. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	15 IKK 23. Indeks Kelembagaan BPSDMP	nilai	78	70,55	90,4	78,5	70,55	89,87	79	--	--	79,5	--	--	80	--	--
		16 IKK 9.2. Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP	indeks	71	71	100	72	72	100	74	--	--	74	--	--	75	--	--
		17 IKK 24. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPSDMP	nilai	0,8	0,8	100	0,9	0,9	100	0,92	0,92	100	0,96	0,96	100	1	1	100
8	SK.WA.03.05. Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDM Perhubungan	18 IKK 25. Indeks SPBE BPSDMP	%	90	90	100	90	90	100	100*)	100	100	100*)	100	100	100*)	100	100

*) ada revisi target indikator melalui Perjanjian Kinerja (PK) pada tahun berjalan

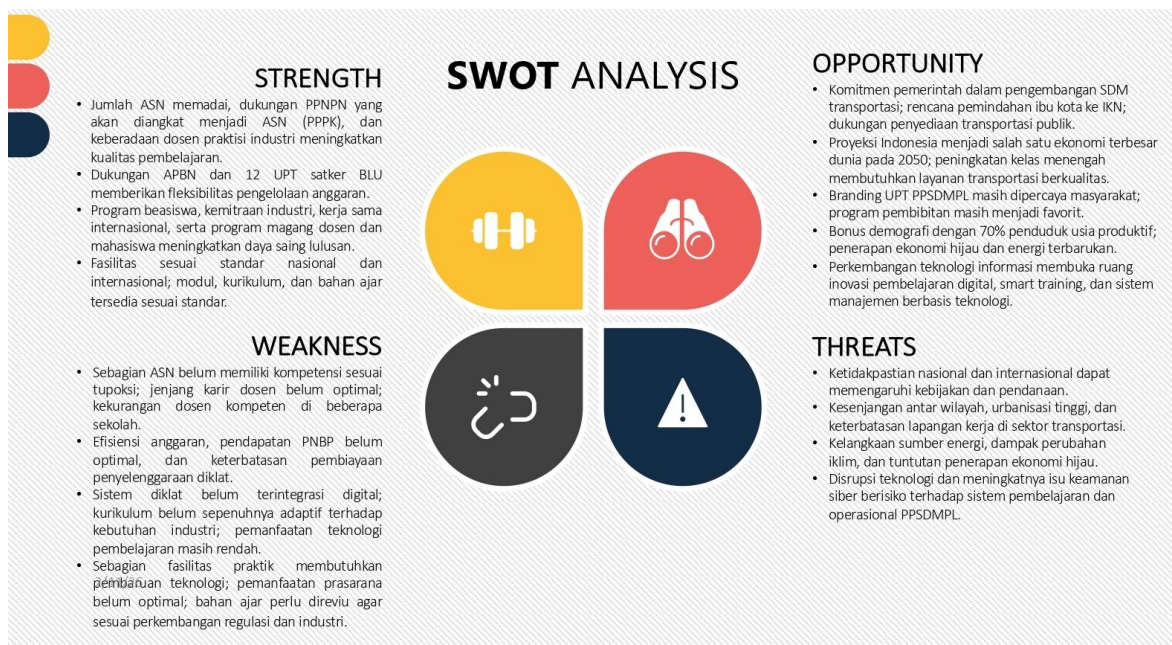
sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

Hasil evaluasi kinerja secara agregat menunjukkan bahwa PPSDMPL mampu mempertahankan kinerja yang sangat baik sepanjang periode Renstra 2020–2024. PPSDMPL telah berhasil melaksanakan Renstra 2020–2024 dengan tingkat capaian kinerja yang sangat memuaskan, baik dari aspek output, outcome, maupun tata kelola organisasi. Keberhasilan ini menjadi modal strategis yang kuat dalam penyusunan Renstra PPSDMPL Tahun 2025–2029, sekaligus menegaskan perlunya peningkatan kualitas indikator yang lebih berorientasi pada dampak jangka panjang (*impact*), penguatan integrasi perencanaan SDM transportasi laut dengan kebutuhan industri dan kebijakan nasional, serta pengembangan inovasi kelembagaan agar PPSDMPL tetap adaptif dan relevan dalam menghadapi tantangan pengembangan SDM transportasi laut di masa mendatang.

1.2. KONDISI UMUM LINGKUNGAN INTERNAL

1.2.1. Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman)

Program Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut (PPSDMPL) 2025 – 2029 dihadapkan pada lingkungan internal yang kompleks, dengan kekuatan dan kelemahan yang perlu dipahami secara mendalam untuk merumuskan strategi yang efektif.



a. Kekuatan (*Strength*)

PPSDMPL memiliki modal internal yang kuat dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dari aspek SDM (*Man*), jumlah ASN yang memadai, dukungan tenaga PPNPN yang akan diangkat menjadi ASN (PPPK), serta keberadaan dosen praktisi industri memberikan kekuatan pada kualitas pembelajaran dan relevansi kompetensi lulusan.

Dari sisi keuangan (*Money*), tersedianya dukungan APBN serta keberadaan 12 UPT satker BLU memberikan fleksibilitas pengelolaan anggaran dan peluang peningkatan kinerja layanan.

Pada aspek metode (*Method*), PPSDMPL telah memiliki program beasiswa, kemitraan industri, kerja sama internasional, serta program magang dosen dan mahasiswa yang mampu meningkatkan daya saing lulusan.

Aspek sarana (*Machine*) menunjukkan tersedianya fasilitas yang sesuai standar nasional dan internasional. Sedangkan dari material, bahan pembelajaran berupa modul, kurikulum, dan bahan ajar telah tersedia sesuai standar.

Kekuatan ini menjadi dasar dalam menurunkan risiko kegagalan layanan pendidikan dan pelatihan, serta meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap PPSDMPL.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Meskipun memiliki potensi besar, PPSDMPL masih menghadapi sejumlah kelemahan yang berisiko terhadap kinerja organisasi. Pada aspek SDM, sebagian ASN belum sepenuhnya memiliki kompetensi sesuai tupoksi, jenjang karir dosen belum optimal, serta masih terdapat kekurangan dosen kompeten di beberapa sekolah.

Dari sisi anggaran, adanya efisiensi anggaran, belum optimalnya pendapatan PNBP, serta keterbatasan pembiayaan penyelenggaraan diklat berpotensi menimbulkan backlog program.

Pada aspek metode, sistem diklat belum terintegrasi secara digital, tindak lanjut kerja sama belum maksimal, kurikulum belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan industri, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran masih rendah.

Sementara itu, dari sisi sarana dan material, sebagian fasilitas praktik membutuhkan pembaruan teknologi, pemanfaatan prasarana belum optimal, serta bahan ajar perlu direvisi agar sesuai perkembangan regulasi dan industri.

Kelemahan ini menimbulkan risiko penurunan mutu layanan, ketidaksesuaian lulusan dengan kebutuhan pasar, serta inefisiensi operasional.

c. Peluang (*Opportunity*)

Lingkungan eksternal memberikan peluang strategis bagi PPSDMPL. Dari sisi politik, terdapat komitmen pemerintah dalam pengembangan SDM transportasi, rencana pemindahan ibu kota ke IKN, serta dukungan penyediaan transportasi publik.

Dari aspek ekonomi, Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu ekonomi terbesar dunia pada 2050 dengan peningkatan kelas menengah yang membutuhkan layanan transportasi berkualitas.

Secara sosial budaya, branding UPT PPSDMPL masih dipercaya masyarakat dan program pembibitan masih menjadi favorit. Dari aspek lingkungan, bonus

demografi dengan 70% penduduk usia produktif membuka peluang besar pengembangan SDM transportasi.

Selain itu, penerapan ekonomi hijau dan energi terbarukan serta pesatnya perkembangan teknologi informasi membuka ruang inovasi pembelajaran digital, smart training, dan sistem manajemen berbasis teknologi.

Peluang ini dapat dimanfaatkan untuk menurunkan risiko ketertinggalan kompetensi dan meningkatkan daya saing lulusan PPSDMPL.

d. Ancaman (*Threat*)

Di sisi lain, PPSDMPL juga menghadapi berbagai ancaman yang perlu dimitigasi. Kondisi geopolitik nasional dan internasional yang tidak menentu dapat memengaruhi kebijakan dan pendanaan.

Dari aspek ekonomi dan sosial, adanya kesenjangan antar wilayah, urbanisasi yang tinggi, serta keterbatasan lapangan kerja di sektor transportasi berpotensi menurunkan serapan lulusan.

Ancaman lain berasal dari aspek lingkungan dan alam, seperti kelangkaan sumber energi, dampak perubahan iklim, serta tuntutan penerapan ekonomi hijau yang memerlukan penyesuaian kurikulum dan sarana.

Pada aspek teknologi informasi, disrupti teknologi dan meningkatnya isu keamanan siber berisiko terhadap sistem pembelajaran, data, serta operasional PPSDMPL.

Ancaman-ancaman ini dapat berdampak pada reputasi, keberlanjutan layanan, serta efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

1.2.2. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, sebagai upaya untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penerapan manajemen risiko dilakukan untuk mengelola ketidakpastian yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi PPSDM Perhubungan Laut dalam menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan laut.

Manajemen risiko dilaksanakan sebagai suatu proses yang sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta mengendalikan potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran kinerja, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal organisasi. Penerapan manajemen risiko juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pengambilan keputusan pimpinan serta peningkatan kualitas tata kelola organisasi.

Penyelenggaraan manajemen risiko di Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, dan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 8 Tahun 2024 tentang Peta Proses, Peta Sub-Proses, dan Peta Relasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut; dan
- e. Kebijakan internal Kementerian Perhubungan terkait penerapan SPIP terintegrasi, Reformasi Birokrasi, serta pembangunan Zona Integritas.

Penerapan manajemen risiko dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh program, kebijakan, dan kegiatan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut meliputi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sertifikasi kompetensi, pengembangan kurikulum, pengelolaan anggaran dan BMN, serta kerja sama dan pelayanan kepada pemangku kepentingan, dapat dilaksanakan secara terencana dan terkendali, meskipun dihadapkan pada berbagai dinamika lingkungan strategis sektor transportasi laut.

Secara khusus, penerapan manajemen risiko di Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut bertujuan untuk:

- a. Mengantisipasi dan meminimalkan potensi risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pimpinan melalui penyediaan informasi risiko yang terukur, terdokumentasi, dan berbasis analisis;
- c. Mencegah terjadinya risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko strategis, risiko keuangan, serta risiko kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;
- e. Memperkuat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Manajemen risiko di Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut dilaksanakan melalui proses yang berkesinambungan dan terintegrasi dengan siklus perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja organisasi.

Proses manajemen risiko tersebut meliputi:

- a. Penetapan konteks dan tujuan manajemen risiko yang selaras dengan tugas dan fungsi PPSDM Perhubungan Laut;

- b. Identifikasi risiko pada setiap aktivitas utama dan aktivitas pendukung organisasi;
- c. Analisis risiko dengan menilai tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan;
- d. Evaluasi risiko untuk menentukan tingkat risiko dan prioritas penanganan;
- e. Penetapan dan pelaksanaan penanganan risiko melalui pengendalian yang memadai sesuai dengan tingkat risiko;
- f. Pemantauan dan revaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas pengendalian risiko serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

Dengan penerapan manajemen risiko yang konsisten, terdokumentasi, dan terintegrasi, Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut diharapkan mampu meningkatkan ketahanan organisasi terhadap berbagai risiko, menjaga kesinambungan layanan pengembangan sumber daya manusia perhubungan laut, serta mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Perhubungan secara berkelanjutan.

1.2.3. Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2024

Pelaksanaan Manajemen Risiko (MR) merupakan pilar esensial yang tidak terpisahkan dari upaya penguatan tata kelola pembangunan nasional, sebagaimana ditegaskan oleh Kementerian Perhubungan dalam penerapan manajemen risiko pada perencanaan dan pengendalian pembangunan. Selaras dengan komitmen tersebut, Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut (PPSDMPL) telah menyusun dan mengimplementasikan kerangka manajemen risiko tahunan untuk Periode Penetapan Manajemen Risiko Tahun 2024.

Evaluasi pelaksanaan manajemen risiko Tahun 2024 menunjukkan bahwa PPSDMPL telah melakukan identifikasi terhadap berbagai peristiwa risiko yang dikelompokkan ke dalam kategori utama, meliputi Risiko Kepatuhan, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Hukum, dan Risiko Kecurangan. Pengelolaan risiko ini ditujukan untuk memitigasi potensi hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian Sasaran Kinerja Utama (IKU) serta sasaran strategis PPSDMPL.

a. Fokus Utama Identifikasi Risiko Tahun 2024

1) Risiko Kepatuhan dan Kompetensi SDM

Risiko signifikan yang teridentifikasi pada Tahun 2024 antara lain masih terdapat Unit Pemilik Risiko (UPR) yang melakukan kesalahan dalam menyusun identifikasi risiko, serta risiko keterlambatan dalam penyusunan dokumen kinerja dan layanan administrasi kepegawaian. Risiko ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman teknis, kurang optimalnya koordinasi, serta perbedaan tingkat kompetensi SDM. Dampak dari risiko tersebut adalah menurunnya kualitas tata kelola dan berpotensi menghambat pencapaian target kinerja organisasi.

2) Risiko Operasional dan Mutu Program

PPSDMPL mengidentifikasi berbagai risiko operasional yang dapat mempengaruhi mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM transportasi laut, antara lain:

- Tantangan dalam standarisasi dan penyesuaian kurikulum antar lembaga diklat.
- Keterbatasan kompetensi instruktur yang belum sepenuhnya selaras dengan kurikulum pendidikan SDM transportasi laut yang baru.
- Keterlambatan proses administrasi kepegawaian, seperti pencantuman gelar akademik dan kenaikan pangkat pegawai.

Risiko-risiko tersebut berpotensi menurunkan kualitas output pendidikan dan efektivitas program pengembangan SDM.

3) Risiko Kecurangan dan Tata Kelola

Risiko kecurangan tetap menjadi perhatian dalam penerapan manajemen risiko Tahun 2024, khususnya terkait potensi kelemahan dalam pengendalian internal dan ketidaktepatan pelaksanaan prosedur administrasi. Risiko ini dapat berdampak pada terjadinya penyimpangan proses serta menurunnya kepercayaan terhadap tata kelola organisasi apabila tidak dikelola secara memadai.

4) Risiko Reputasi dan Komunikasi Publik

PPSDMPL juga mengidentifikasi risiko reputasi yang bersumber dari potensi penyebaran informasi publik yang tidak tepat sasaran. Risiko ini dapat mempengaruhi persepsi pemangku kepentingan terhadap kinerja organisasi apabila komunikasi publik tidak dikelola secara efektif dan terkoordinasi.

b. Pelaksanaan dan Strategi Mitigasi Risiko Tahun 2024

Pelaksanaan manajemen risiko Tahun 2024 difokuskan pada implementasi **Keputusan Mitigasi** yang telah ditetapkan, melalui penguatan sistem pengendalian internal, penyusunan pedoman, serta peningkatan koordinasi antar unit kerja.

- 1) Mitigasi Risiko Kepatuhan dan SDM dilakukan melalui peningkatan kolaborasi dan konsultasi antar UPR, pelaksanaan sosialisasi manajemen risiko, serta penguatan pemahaman teknis dalam penyusunan identifikasi dan analisis risiko.
- 2) Mitigasi Risiko Operasional dilakukan melalui penyusunan kurikulum yang terstandar, peningkatan kompetensi instruktur melalui pelatihan, workshop, dan kerja sama dengan pihak eksternal, serta perbaikan proses administrasi kepegawaian.

- 3) Mitigasi Risiko Reputasi dan Komunikasi Publik dilakukan dengan penguatan koordinasi publikasi antar bidang teknis dan penetapan mekanisme komunikasi publik yang lebih terarah.
- 4) Pemantauan Efektivitas Penanganan Risiko dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang Tahun 2024 (Triwulan I s.d. Triwulan IV). Berdasarkan hasil pemantauan, sebagian besar rencana penanganan risiko menunjukkan tingkat efektivitas yang baik, meskipun masih diperlukan peningkatan konsistensi dan sosialisasi kepada seluruh pegawai PPSDMPL.

Komitmen Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut dalam mengelola risiko secara sistematis dan berkelanjutan diharapkan mampu memastikan bahwa berbagai tantangan internal dan eksternal dapat dikelola secara proaktif, sehingga penyelenggaraan pengembangan SDM transportasi laut dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi adalah segala sumber daya, kemampuan, kekuatan, peluang, dan aset yang dimiliki oleh suatu organisasi atau wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan strategis dan sasaran yang ditetapkan. Potensi merupakan landasan yang menjadi titik awal organisasi untuk merumuskan strategi dan melaksanakan kegiatan guna meraih visi dan misi organisasi. Sedangkan permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi kinerja saat ini dengan kondisi kinerja yang ingin dicapai, yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana tersebut.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut memiliki potensi strategis sebagai koordinator dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perhubungan laut dengan keberadaan lembaga pendidikan dan pelatihan yang mapan, jejaring unit pelaksana teknis yang luas, serta peran sentral dalam penyediaan SDM transportasi laut yang kompeten dan berstandar nasional maupun internasional. Potensi tersebut sejalan dengan agenda Asta Cita dalam memperkuat pembangunan manusia, meningkatkan produktivitas nasional, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat dan berdaya saing.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut juga menghadapi sejumlah permasalahan dan tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas dan pemerataan sumber daya, kesenjangan kompetensi SDM terhadap perkembangan teknologi, digitalisasi, dan standar global, serta tuntutan peningkatan kualitas tata kelola dan layanan pendidikan dan pelatihan. Permasalahan tersebut perlu direspons secara sistematis agar PPSDMPL mampu beradaptasi terhadap dinamika global sektor maritim dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

Identifikasi potensi dan permasalahan secara terukur dan terintegrasi, akan menjadi pijakan dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut yang selaras dengan Asta Cita, efektif dalam menjawab tantangan strategis, serta berkontribusi nyata terhadap pembangunan SDM perhubungan laut yang unggul dan berkelanjutan.

1.3.1. Potensi dan Isu Strategis

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM maritim, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut (PPSDMPL) menempati posisi vital dalam memastikan tersedianya tenaga profesional yang mampu menjawab tantangan industri pelayaran, pelabuhan, dan logistik laut di era globalisasi. Potensi ini semakin signifikan mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang menjadikan transportasi laut sebagai tulang punggung konektivitas antarwilayah dan pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Potensi utama PPSDMPL terletak pada kapasitasnya dalam menyelenggarakan **pendidikan dan pelatihan maritim berstandar internasional**. Lembaga ini memiliki landasan kuat untuk menerapkan standar pelatihan yang sesuai dengan ketentuan International Maritime Organization (IMO), khususnya Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers (STCW). Dengan penerapan standar tersebut, PPSDMPL tidak hanya menjamin kesesuaian kompetensi lulusan terhadap kebutuhan industri nasional, tetapi juga membuka peluang bagi tenaga kerja maritim Indonesia untuk bersaing di pasar global. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan maritim internasional memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan, penyusunan kurikulum berbasis teknologi global, dan peningkatan kapasitas tenaga pengajar melalui pelatihan lanjutan serta kegiatan pertukaran keahlian.

Selain itu, **perkembangan teknologi maritim** memberikan peluang besar bagi PPSDMPL untuk memperkuat posisinya sebagai pusat unggulan dalam inovasi pelatihan. Kemajuan teknologi seperti kapal berbahan bakar ganda (dual fuel vessel), sistem propulsi ramah lingkungan, penggunaan blockchain dalam rantai logistik, serta penerapan analitik data dalam pengelolaan armada maritim menjadi momentum penting untuk modernisasi materi ajar dan kurikulum diklat. Dengan mengadopsi teknologi tersebut, PPSDMPL dapat mengembangkan model pembelajaran berbasis digital, simulator training, dan praktik maritim cerdas yang menyesuaikan diri dengan arah transformasi industri pelayaran dunia menuju efisiensi dan keberlanjutan.

Potensi berikutnya adalah **penguatan sistem sertifikasi dan lisensi SDM perhubungan laut**. PPSDMPL memiliki peluang besar untuk mengembangkan program sertifikasi yang diakui secara internasional dengan mengacu pada standar kompetensi kerja nasional maupun regulasi global. Melalui sinergi dengan lembaga sertifikasi nasional dan internasional, PPSDMPL dapat memastikan bahwa setiap

lulusan memiliki legalitas dan pengakuan profesional yang memadai untuk bekerja di berbagai sektor industri maritim. Penguatan sistem sertifikasi juga akan mendukung peningkatan daya saing tenaga kerja nasional serta mendorong terbentuknya tenaga ahli yang siap menghadapi persaingan pasar kerja internasional.

Secara kelembagaan, PPSDMPL memiliki modal sumber daya manusia dan jaringan kerja sama yang dapat terus dikembangkan. Dengan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang berpengalaman, dukungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di berbagai daerah, serta kemitraan dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga internasional, PPSDMPL memiliki kapasitas untuk menjadi pusat koordinasi nasional dalam pengembangan SDM maritim. Potensi kelembagaan ini juga diperkuat dengan dukungan terhadap transformasi digital dan sistem informasi pendidikan yang terintegrasi, yang memungkinkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan data, pemantauan kinerja, serta pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh.

Dengan berbagai potensi tersebut, PPSDMPL memiliki posisi strategis untuk berperan sebagai katalisator peningkatan daya saing bangsa di bidang kemaritiman. Melalui pendidikan dan pelatihan berstandar internasional, adopsi teknologi modern, serta penguatan kelembagaan yang berorientasi pada kolaborasi global dan digitalisasi, PPSDMPL dapat menjadi pusat unggulan (*center of excellence*) dalam pengembangan SDM perhubungan laut yang kompeten, profesional, dan berdaya saing global, sejalan dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia menuju Indonesia Emas 2045.

Disamping potensi, hal lain yang perlu diperhatikan adalah keberadaan isu strategis di lingkungan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut. Isu Strategis sendiri merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi unit kerja yang bersangkutan di masa datang. Isu strategis mempunyai karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan dari unit kerja tersebut. Isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan dari suatu unit kerja.

Dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia perhubungan laut, perlu diperhatikan beberapa isu strategis yang memerlukan penanganan dan perhatian dari pengelolaan transportasi laut antara lain:

1) Dekarbonisasi dan Regulasi Lingkungan Internasional

Dalam konteks transportasi laut yang menyumbang sekitar 3% dari emisi gas rumah kaca (GHG) global, dekarbonisasi menjadi isu strategis utama untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Regulasi lingkungan internasional, dipimpin oleh *International Maritime Organization* (IMO), mendorong transisi menuju operasi rendah karbon melalui target ambisius dan instrumen pengukuran. Isu ini tidak hanya memengaruhi efisiensi operasional kapal, tetapi juga memerlukan inovasi teknologi dan adaptasi industri untuk memenuhi komitmen global seperti Perjanjian Paris.

Strategi IMO 2050, yang direvisi pada 2023, menetapkan target net-zero GHG emissions dari pelayaran internasional pada atau sekitar 2050, dengan pengurangan emisi sebesar 30% pada 2030 dan 80% pada 2040 dibandingkan level 2008. Strategi ini mencakup pengurangan intensitas karbon per unit transport work, serta peningkatan uptake teknologi dan bahan bakar rendah emisi. Revisi ini menandai komitmen lebih kuat dari strategi awal 2018, yang hanya menargetkan pengurangan 50% emisi pada 2050, dan kini menekankan transisi cepat dari bahan bakar fosil. Untuk mencapai visi ini, IMO mendorong kolaborasi antarnegara dan industri, termasuk standar bahan bakar yang selaras dengan target Paris Agreement.

Salah satu pilar utama adalah pengembangan bahan bakar alternatif, yang menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada *heavy fuel oil*. Opsi potensial meliputi *liquefied natural gas* (LNG), *liquefied biogas* (LBG), methanol, ammonia, hydrogen, biofuel, dan *liquefied petroleum gas* (LPG). Green ammonia dan methanol menonjol karena potensinya mencapai net-zero, meskipun tantangan seperti biaya produksi tinggi dan infrastruktur tetap ada. LNG dan biofuel sering dilihat sebagai solusi transisi, sementara hydrogen dan ammonia memerlukan variasi sumber energi listrik untuk memaksimalkan manfaat dekarbonisasi. Industri telah memesan lebih dari 200 kapal dual-fuel methanol, menunjukkan momentum menuju zero-emission pathway. Namun, adopsi luas memerlukan penilaian komprehensif terhadap jarak transportasi dan emisi siklus hidup.

Untuk menegakkan target ini, IMO memperkenalkan regulasi seperti *Energy Efficiency Existing Ship Index* (EEXI) dan *Carbon Intensity Indicator* (CII), yang berlaku sejak 1 Januari 2023. EEXI adalah ukuran efisiensi energi teknis untuk kapal existing di atas 400 gross tonnage, mengharuskan pemenuhan target efisiensi serupa dengan *Energy Efficiency Design Index* (EEDI) untuk kapal baru. Ini mendorong modifikasi seperti *engine power limitation* atau teknologi hemat energi tanpa memperlambat kapal. Sementara itu, CII menilai intensitas karbon operasional tahunan untuk kapal di atas 5.000 gross tonnage, dengan rating A hingga E yang memengaruhi operasi dan kepatuhan. Kedua regulasi ini saling melengkapi, di mana EEXI fokus pada desain kapal dan CII pada performa aktual, sehingga mendorong pengurangan emisi secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, dekarbonisasi melalui regulasi lingkungan internasional seperti IMO 2050, didukung oleh bahan bakar alternatif dan instrumen EEXI serta CII, membentuk fondasi untuk pelayaran berkelanjutan. Tantangan utama termasuk biaya transisi dan kolaborasi global, tetapi manfaatnya, termasuk pengurangan dampak iklim dan peningkatan daya saing, menjadikannya prioritas strategis bagi sektor transportasi laut.

2) Digitalisasi dan Otomatisasi Kapal

Transformasi digital dalam sektor transportasi laut menjadi salah satu isu strategis yang memerlukan perhatian serius, khususnya terkait penerapan digitalisasi dan

otomatisasi kapal. Perkembangan teknologi *smart shipping* membuka peluang besar bagi peningkatan efisiensi operasional, keselamatan pelayaran, dan keberlanjutan lingkungan. Melalui penerapan sistem berbasis sensor, integrasi data, serta kecerdasan buatan, *smart shipping* memungkinkan pengelolaan kapal dan pelayaran yang lebih presisi, efisien, dan responsif terhadap dinamika operasional maritim.

Penerapan *Internet of Things (IoT)* di sektor pelayaran memungkinkan konektivitas antarperangkat dan sistem pada kapal secara real-time. Teknologi ini dapat digunakan untuk memantau kondisi mesin, mengoptimalkan konsumsi bahan bakar, serta mendeteksi potensi kerusakan lebih dini. Integrasi IoT dengan pusat kendali darat juga memperkuat fungsi pemantauan jarak jauh dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dengan demikian, keandalan operasional kapal dapat ditingkatkan sekaligus mengurangi risiko kecelakaan di laut.

Selain itu, pemanfaatan *big data analytics* semakin relevan dalam pengelolaan transportasi laut modern. Data besar yang dihasilkan dari aktivitas pelayaran, baik terkait cuaca, arus lalu lintas laut, maupun kinerja kapal, dapat dianalisis untuk memprediksi tren, mengoptimalkan rute, serta mendukung efisiensi logistik. Analisis data tersebut juga berperan penting dalam mendukung kebijakan strategis, seperti pengaturan alur pelayaran, mitigasi risiko, dan peningkatan produktivitas sektor maritim.

Perkembangan menuju kapal otonom (*autonomous ships*) menjadi tahapan lanjutan dari digitalisasi maritim. Kapal otonom diharapkan mampu beroperasi dengan tingkat intervensi manusia yang minimal melalui pemanfaatan sensor canggih, kecerdasan buatan, dan sistem navigasi otomatis. Kehadiran kapal jenis ini dapat meningkatkan keselamatan dengan mengurangi kesalahan manusia (*human error*), menekan biaya operasional, serta memperkuat daya saing industri pelayaran. Namun demikian, penerapannya juga menghadirkan tantangan baru, baik dari sisi regulasi, kesiapan infrastruktur, maupun kompetensi SDM.

Digitalisasi dan otomatisasi kapal merupakan isu strategis yang harus diantisipasi melalui penguatan kapasitas SDM, pengembangan regulasi yang adaptif, serta investasi pada infrastruktur teknologi maritim. Hal ini akan memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pelaku aktif dalam era transformasi digital transportasi laut global.

3) Keamanan Laut dan Ancaman Siber

Keamanan laut merupakan salah satu isu strategis yang krusial dalam penyelenggaraan transportasi laut di Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan jalur perdagangan internasional yang padat, perairan Indonesia memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai ancaman, baik konvensional maupun non-konvensional. Di antara ancaman yang menonjol adalah serangan siber terhadap sistem transportasi maritim, tindak perompakan, serta potensi terorisme laut. Ketiga isu tersebut tidak hanya mengganggu stabilitas dan keselamatan pelayaran, tetapi juga

berimplikasi langsung pada kepercayaan global terhadap jalur logistik maritim Indonesia.

1. **Serangan siber** menjadi ancaman nyata seiring meningkatnya digitalisasi dan otomatisasi kapal serta pelabuhan. Sistem seperti *Inaportnet*, *smart shipping*, dan *Internet of Things (IoT)* yang digunakan untuk memantau armada dan mengelola logistik dapat menjadi target serangan siber. Aksi peretasan dapat mengakibatkan gangguan operasional, pencurian data sensitif, bahkan sabotase navigasi kapal. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan siber maritim harus menjadi prioritas seiring akselerasi transformasi digital sektor pelayaran.
2. **Perompakan** masih menjadi tantangan keamanan di beberapa wilayah perairan Indonesia, khususnya di Selat Malaka dan perairan Natuna. Meski jumlah insiden perompakan cenderung menurun dibandingkan dekade sebelumnya, potensi ancaman tetap tinggi akibat kerentanan jalur pelayaran internasional. Perompakan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi dan ancaman keselamatan awak kapal, tetapi juga berdampak pada reputasi Indonesia sebagai negara maritim yang aman dan andal.
3. **Terorisme laut** merupakan ancaman non-tradisional yang dapat menargetkan kapal niaga, fasilitas pelabuhan, maupun jalur pelayaran strategis. Aksi teror di laut memiliki implikasi serius terhadap stabilitas regional dan keamanan perdagangan internasional. Dengan posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia, kemungkinan adanya serangan teror di laut tidak dapat diabaikan, sehingga upaya deteksi dini, koordinasi keamanan lintas instansi, dan pengawasan kawasan perairan menjadi semakin penting.

Isu keamanan laut dan ancaman siber menuntut kebijakan yang komprehensif dan integratif. Strategi yang perlu dikembangkan meliputi penguatan sistem keamanan siber maritim, peningkatan patroli dan koordinasi keamanan laut, serta kerjasama internasional dalam menghadapi ancaman transnasional. Selain itu, pengembangan SDM perhubungan laut yang memahami aspek keamanan fisik dan digital menjadi kunci dalam membangun sistem transportasi laut yang tangguh, aman, dan dipercaya oleh masyarakat nasional maupun internasional.

4) Disrupsi Rantai Pasok Global

Transportasi laut berperan sebagai tulang punggung perdagangan internasional, mengingat lebih dari 80 persen volume perdagangan dunia diangkut melalui jalur laut. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, rantai pasok global menghadapi disrupsi yang signifikan akibat dinamika eksternal, terutama yang dipicu oleh konflik geopolitik dan lemahnya kesiapan manajemen krisis. Bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan sekaligus poros maritim dunia, ketidakstabilan rantai pasok global menjadi isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius.

1. **Konflik geopolitik** menjadi salah satu faktor utama yang mengganggu kelancaran transportasi laut. Ketegangan di kawasan tertentu, seperti Laut Cina Selatan, konflik Rusia-Ukraina, hingga situasi di Timur Tengah, berdampak pada terganggunya jalur perdagangan, lonjakan biaya logistik, serta ketidakpastian pasokan energi dan komoditas strategis. Kondisi ini dapat memengaruhi ketahanan ekonomi nasional karena jalur pelayaran internasional yang melewati perairan Indonesia tidak terlepas dari dampak geopolitik global. Oleh karena itu, Indonesia perlu membangun kapasitas diplomasi maritim dan memperkuat kerja sama internasional untuk menjaga stabilitas jalur pelayaran strategis.
2. **Manajemen krisis** dalam sektor transportasi laut masih menghadapi tantangan. Pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata bagaimana lemahnya antisipasi krisis global dapat melumpuhkan rantai pasok maritim, menyebabkan keterlambatan pengiriman, kelangkaan logistik, dan kerugian ekonomi yang luas. Di era ketidakpastian global, manajemen krisis yang tangguh diperlukan untuk memastikan sistem transportasi laut mampu beradaptasi terhadap gangguan besar, baik yang bersifat kesehatan, bencana alam, maupun instabilitas politik dan ekonomi internasional.

Disrupsi rantai pasok global akibat konflik geopolitik dan lemahnya manajemen krisis harus dijadikan pijakan dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan transportasi laut. Penguatan kapasitas manajemen risiko, diversifikasi jalur logistik, pengembangan infrastruktur pelabuhan yang adaptif, serta peningkatan kompetensi SDM dalam bidang diplomasi maritim dan manajemen krisis akan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan penyelenggaraan transportasi laut yang tidak hanya mampu melindungi kepentingan nasional, tetapi juga berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas rantai pasok global.

5) Standarisasi dan Harmonisasi Sertifikasi Global

Standarisasi dan harmonisasi sertifikasi global menjadi isu strategis penting dalam penyelenggaraan transportasi laut di era globalisasi. Sebagai negara maritim dengan jumlah pelaut terbesar di dunia, Indonesia tidak dapat mengabaikan dinamika perubahan standar pelaut global yang terus berkembang di bawah naungan organisasi internasional seperti *International Maritime Organization* (IMO). Kepatuhan terhadap standar internasional bukan hanya kewajiban regulatif, tetapi juga syarat mutlak agar tenaga kerja maritim Indonesia mampu bersaing di pasar global.

Perubahan standar pelaut global menuntut adanya penyesuaian signifikan terhadap sistem pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi pelaut nasional. Revisi *Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers (STCW Convention)*, misalnya, memperkenalkan tuntutan baru terkait kompetensi digital, penguasaan teknologi otomasi kapal, serta pemahaman tentang *green shipping* dan keselamatan berbasis teknologi. Perubahan ini menimbulkan implikasi langsung terhadap institusi

pendidikan pelayaran yang harus memperbarui kurikulum, meningkatkan fasilitas pelatihan, serta memperkuat kapasitas instruktur agar sejalan dengan standar internasional.

Selain itu, terdapat **ketimpangan antar negara** dalam pemenuhan standar global. Negara-negara maju umumnya lebih cepat beradaptasi karena memiliki sumber daya finansial, teknologi, dan regulasi yang lebih mapan. Sementara itu, banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur pendidikan maritim, akses terhadap teknologi mutakhir, serta biaya sertifikasi yang relatif tinggi bagi pelaut. Ketimpangan ini berpotensi menciptakan kesenjangan daya saing dan menempatkan pelaut dari negara berkembang pada posisi yang kurang menguntungkan di pasar kerja global.

Bagi Indonesia, isu standarisasi dan harmonisasi sertifikasi global memiliki dua sisi. Di satu sisi, pemenuhan standar internasional memberikan peluang besar untuk memperkuat posisi pelaut Indonesia di dunia kerja internasional. Di sisi lain, kegagalan dalam memenuhi standar akan berakibat pada turunnya daya saing dan hilangnya peluang kerja di sektor pelayaran global. Oleh karena itu, penguatan kebijakan nasional diperlukan, antara lain melalui investasi dalam lembaga pendidikan dan pelatihan maritim, peningkatan kerja sama internasional untuk transfer pengetahuan dan teknologi, serta penyediaan skema dukungan finansial agar pelaut Indonesia dapat memperoleh sertifikasi sesuai standar global.

Dengan demikian, standarisasi dan harmonisasi sertifikasi global bukan hanya tantangan regulatif, melainkan strategi kunci dalam menjaga keberlanjutan dan daya saing sektor maritim Indonesia. Melalui komitmen kuat pada implementasi standar internasional dan upaya mengatasi ketimpangan global, Indonesia dapat memastikan bahwa SDM perhubungan lautnya tetap relevan, kompetitif, dan mampu berkontribusi dalam sistem transportasi laut internasional.

Disampingkan memperhatikan isu strategis transportasi laut, perlu juga diperhatikan rekomendasi yang tertuang dalam "Grand Desain Pengembangan SDM Transportasi Laut Tahun 2021", dimana pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan Laut difokuskan pada peningkatan kompetensi, penutupan gap institusi pendidikan, dan perencanaan jangka panjang untuk mendukung ekonomi maritim Indonesia. Dokumen ini menekankan isu seperti ketidakseimbangan supply-demand SDM, kualitas rendah, dan integrasi riset-industri. Namun, mengingat perkembangan global hingga 2025, isu strategis perlu diperbarui dengan mempertimbangkan tantangan transportasi laut seperti dekarbonisasi, regulasi lingkungan internasional, digitalisasi dan otomatisasi kapal, keamanan laut serta ancaman siber, disrupsi rantai pasok global, serta standarisasi dan harmonisasi sertifikasi global. Integrasi ini selaras dengan rekomendasi grand design untuk pemutakhiran program studi dan *Techno Park* sebagai pusat inovasi, di mana SDM harus adaptif terhadap teknologi dan keberlanjutan.

Dengan memperhatikan isu strategis transportasi laut, diperoleh isu strategis pengembangan sumber daya manusia perhubungan laut sebagai bentuk penyiapan SDM perhubungan laut yang siap menghadapi tantangan dari isu strategis transportasi laut yang ada. Isu strategis yang berurusan langsung dan memerlukan penanganan serta perhatian dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut selaku unit kerja yang memberikan dukungan penyiapan sumber daya manusia perhubungan laut dalam penyelenggaraan transportasi laut, yang merupakan hasil sintesa dari Grand Desain Pengembangan SDM Perhubungan Laut dengan tetap memperhatikan isu strategis Transportasi Laut, antara lain

Tabel 1.5. Isu Strategis Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubunan Laut

No.	Isu Strategis	Deskripsi Singkat
1	Ketidakseimbangan Supply-Demand SDM di Tengah Dekarbonisasi dan Regulasi Lingkungan Internasional	Permintaan SDM transportasi laut meningkat akibat transisi energi hijau, tetapi pasokan domestik tidak memadai untuk memenuhi standar IMO seperti pengurangan emisi 50% pada 2050. Indonesia perlu melatih SDM untuk teknologi rendah karbon, seperti kapal berbahan bakar alternatif, sambil menciptakan lapangan kerja baru dari fase-out batubara.
2	Kualitas SDM Rendah dan Kurang Adaptif terhadap Digitalisasi serta Otomatisasi Kapal	SDM domestik masih di bawah standar internasional, terutama dalam keterampilan digital seperti AI untuk navigasi otonom dan IoT di pelabuhan. Gap ini menghambat efisiensi rantai pasok, di mana digitalisasi dapat mengurangi biaya hingga 20% di pelabuhan Indonesia, tetapi memerlukan pelatihan baru untuk mengatasi hambatan seperti kurangnya infrastruktur.
3	Gap Institusi Pendidikan Domestik vs. Internasional dalam Menangani Keamanan Laut dan Ancaman Siber	Institusi seperti STIP Jakarta dan PIP Semarang kurang memiliki program cybersecurity maritim, sementara ancaman siber meningkat 300% di sektor pelayaran global. Perlu benchmarking dengan institusi luar negeri untuk integrasi modul keamanan, termasuk proteksi terhadap serangan pada sistem navigasi otonom.
4	Urgensi Peningkatan Kompetensi untuk Mengatasi Disrupsi Rantai Pasok Global	Pandemi dan konflik geopolitik menyebabkan disrupsi, di mana SDM perlu dilatih dalam manajemen risiko supply chain menggunakan blockchain untuk transparansi. Ini selaras dengan kontribusi sektor maritim terhadap PDB Indonesia

No.	Isu Strategis	Deskripsi Singkat
		(7-8%), tetapi memerlukan TNA untuk keterampilan resiliensi.
5	Kurangnya Integrasi Riset, Inovasi, dan Industri dalam Standarisasi serta Harmonisasi Sertifikasi Global	Output penelitian rendah menghambat harmonisasi sertifikasi seperti STCW Manila Amendments, terutama untuk kompetensi hijau dan digital. Techno Park dapat menjadi pusat untuk kolaborasi, memastikan SDM Indonesia memenuhi standar IMO dan ILO, dengan serapan lulusan meningkat hingga 90%.
6	Perencanaan Jangka Panjang yang Belum Optimal untuk Transisi Hijau dan Digital	Perlu pemutakhiran program untuk jenjang diploma-doktoral, fokus pada jangka pendek (pelatihan dasar digital/keamanan), jangka menengah (kerjasama internasional untuk dekarbonisasi), dan jangka panjang (inovasi otomatisasi). Ini mendukung target renewables 34 % pada 2030, dengan SDM sebagai kunci transformasi.

Isu-isu ini menekankan bahwa apa yang tertuang dalam Grand Desain Pengembangan SDM Transportasi Laut harus dievolusi untuk mendukung "ekonomi biru" Indonesia, dengan fokus pada keselamatan, keberlanjutan, dan daya saing global. Rekomendasi termasuk integrasi kurikulum baru melalui *Techno Park* dan kolaborasi dengan IMO, untuk memastikan SDM siap menghadapi disrupsi/perubahan 2025.

1.3.2. Permasalahan

Keberhasilan suatu organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik secara internal maupun eksternal. Untuk dapat selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat dan sulit diprediksi, setiap organisasi perlu memperhatikan lingkungan internal dan eksternal terkait permasalahan yang mempengaruhi organisasi dalam suatu proses perencanaan.

Dari hasil identifikasi permasalahan yang disarikan dari masing-masing UPT lembaga pendidikan, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut (PPSDMPL) menghadapi sejumlah permasalahan struktural dan fungsional yang berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan SDM transportasi laut yang profesional, berdaya saing global, dan adaptif terhadap dinamika industri maritim. Permasalahan tersebut bersifat multidimensi, mencakup aspek pendidikan, pelatihan, serta dukungan manajemen dan kelembagaan, yang saling berkaitan dan memerlukan penanganan secara sistemik.

Pada aspek **pendidikan**, permasalahan utama tercermin dari ketimpangan distribusi dan kualitas tenaga pendidik antar Unit Pelaksana Teknis (UPT), khususnya di wilayah Indonesia Timur. Keterbatasan jumlah tenaga pendidik dengan kualifikasi tinggi, seperti profesor atau guru besar, serta adanya kesenjangan kompetensi pedagogik dan praktikal, berdampak langsung pada mutu penyelenggaraan pendidikan. Kondisi ini diperparah dengan menurunnya permintaan pendidikan pada beberapa kampus yang berlokasi di daerah 3T, yang dipengaruhi oleh faktor geografis, keterbatasan akses, serta persepsi pasar terhadap daya saing lulusan. Selain itu, kurikulum pendidikan belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan teknologi maritim internasional dan kebutuhan industri, sehingga berpotensi menurunkan relevansi kompetensi lulusan di pasar kerja global.

Permasalahan pendidikan tersebut berkorelasi erat dengan **keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran**. Fasilitas pendukung, seperti kapal latih, laboratorium praktik, dan peralatan simulasi, belum tersedia secara memadai dan merata di seluruh UPT. Di sisi lain, kompetensi tenaga pendidik dalam memanfaatkan fasilitas praktik lapangan masih terbatas, yang menyebabkan optimalisasi sarana pembelajaran belum tercapai. Ketiadaan masterplan pengembangan kampus pada beberapa UPT juga menyebabkan pengembangan infrastruktur berjalan parsial, tidak terintegrasi, dan kurang selaras dengan proyeksi kebutuhan jangka panjang.

Pada aspek **pelatihan**, PPSDMPL menghadapi tantangan berupa keterbatasan alokasi anggaran yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan program pelatihan dan pemberdayaan SDM. Pelatihan yang diselenggarakan belum sepenuhnya mencapai target output dan outcome yang ditetapkan, baik dari sisi jumlah peserta maupun kesesuaian kompetensi. Kekurangan SDM bersertifikasi tertentu, seperti sertifikasi Tally yang kebutuhannya sangat tinggi di pelabuhan-pelabuhan nasional, menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kebutuhan industri dan kapasitas pelatihan yang tersedia. Permasalahan ini diperparah oleh ketidaksesuaian silabus dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sehingga menghambat proses re-approval sertifikasi kompetensi yang bersifat mandatory.

Selain itu, proses akreditasi lembaga pelatihan yang memerlukan waktu relatif lama turut memengaruhi kepercayaan industri serta fleksibilitas PPSDMPL dalam merespons kebutuhan pelatihan yang bersifat cepat dan spesifik. Modul pelatihan yang belum sepenuhnya diselaraskan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) juga berimplikasi pada belum optimalnya kualitas lulusan pelatihan dalam memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan oleh dunia usaha dan dunia industri.

Dari sisi **manajemen umum dan kelembagaan**, PPSDMPL menghadapi hambatan dalam implementasi masterplan kampus akibat permasalahan lahan dan aset, khususnya di kampus-kampus yang berada pada lokasi strategis namun memiliki keterbatasan ruang pengembangan. Tantangan lain muncul dari keterbatasan SDM di

bidang teknologi informasi dan keamanan siber, yang menjadi isu krusial seiring dengan meningkatnya digitalisasi layanan pendidikan dan pelatihan. Belum adanya spesialisasi kampus secara tematik juga berpotensi menimbulkan persaingan internal antar UPT yang berdekatan secara geografis, sehingga menurunkan efisiensi dan fokus pengembangan keunggulan masing-masing kampus .

Di sisi keuangan, peningkatan target Badan Layanan Umum (BLU) yang tidak sepenuhnya seimbang dengan kemampuan ekonomi masyarakat dan daya serap pasar menjadi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan layanan PPSDMPL. Kondisi ini menuntut keseimbangan antara pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pemeliharaan kualitas serta keterjangkauan layanan pendidikan dan pelatihan. Selain itu, kendala penerapan kebijakan internal, seperti Instruksi Menteri terkait pengelolaan asrama, serta keterbatasan dana, lahan, dan aksesibilitas lokasi kampus, turut memperlambat pembangunan infrastruktur baru yang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan mutu layanan .

Secara keseluruhan, permasalahan PPSDMPL pada periode 2025–2029 menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara aspek SDM, kurikulum, sarana prasarana, tata kelola, serta pendanaan. Permasalahan tersebut menegaskan perlunya strategi pengembangan yang terintegrasi, adaptif terhadap perubahan global, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, agar PPSDMPL mampu menjalankan perannya secara optimal dalam menyiapkan SDM perhubungan laut yang unggul, kompeten, dan berdaya saing internasional .

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1.VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

Kementerian Perhubungan termasuk dalam kelompok K/L yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi agar dapat menghubungkan dari suatu kawasan ke kawasan lain guna mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat, mempermudah akses ke suatu kawasan, dan menjamin keamanan, keselamatan dan ketersediaan kapasitas layanan moda transportasi. Ketugasan tersebut sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yang mencakup penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dan untuk mendukung Visi Presiden 2025-2029 dalam menjalankan prioritas pembangunan nasional, maka rumusan Visi Kementerian Perhubungan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Pengurangan kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan merupakan salah satu fokus kebijakan pembangunan Indonesia 2025-2029. Pemerintah menempuh strategi pembangunan yang menekankan upaya terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sebagai pondasi dalam pembangunan jangka panjang 2025-2045. Guna mendukung hal tersebut, kondisi transportasi nasional yang ingin diwujudkan dalam visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 adalah Transportasi Indonesia yang maju dengan karakteristik jaringan dan layanan transportasi yang modern, handal, inklusif, berdayasaing, dan memberikan nilai tambah, dengan pemahaman kata kunci sebagai berikut:

- a. **Handal:** tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- b. **Inklusif:** tersedianya layanan transportasi yang adil dan merata serta dapat diakses oleh semua golongan masyarakat.

- c. **Berdaya saing:** tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing global.
- d. **Memberikan nilai tambah:** penyelenggaraan perhubungan mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.

Pembangunan transportasi nasional menjadi salah satu strategi kebijakan yang ditempuh guna mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif antar wilayah. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya Visi Kementerian Perhubungan yang akan mewujudkan **Transporasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045**, ditetapkanlah **Misi Kementerian Perhubungan** sebagai berikut:

1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan;
2. Mewujudkan dukungan transportasi terhadap ketahanan dan kemandirian nasional yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;
6. Membangun transportasi perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;
7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional;
8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

8 (delapan) Misi Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 tersebut berkesesuaian secara langsung satu per satu dengan 8 (delapan) Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 (Asta Cita).

Dari Visi dan Misi Kementerian Perhubungan, ditetapkanlah 4 (empat) **Tujuan Pembangunan Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029** dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029, yakni:

1. Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029;
2. Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing;
3. Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas;

4. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Ke-empat tujuan tersebut mewakili dari apa yang akan diharapkan dari pelaksanaan masing-masing misi Kementerian Perhubungan pada tahun 2025 – 2029, sehingga Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029 disusun sebagai indikator *outcome* dan bukan merupakan indikator *output*, sehingga ketercapaian dari masing-masing misi akan dapat dinilai dari ketercapaian indikator outcome yang ada di masing-masing tujuan.

Tabel 2.1. Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029

Perspektif		Tujuan		Indikator	Satuan
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (Externalities)	T.0	Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029		Kinerja pada level Stakeholder Perspective diukur pada tingkatan nasional (RPJMN 2025-2029)	
CUSTOMER PERSPECTIVE (Core Business)	T.1	Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing	IKT.1	Capaian kinerja penyediaan layanan transportasi nasional	%
INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE (Technical Support)	T.2	Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas	IKT.2	Capaian kinerja penyusunan rekomendasi kebijakan dan peningkatan SDM transportasi	%
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE (Management Support)	T.3	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan	IKT.3	Capaian kinerja Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan	%

Dalam rangka mewujudkan tujuan Kementerian Perhubungan diatas, sasaran strategis ditetapkan sebagai bentuk operasionalisasi tujuan ke dalam target kinerja yang terukur dan dapat dievaluasi. Sasaran strategis tersebut mencerminkan area kinerja utama Kementerian Perhubungan yang harus dicapai untuk memastikan terpenuhinya tujuan pembangunan sektor transportasi, yaitu terwujudnya konektivitas nasional

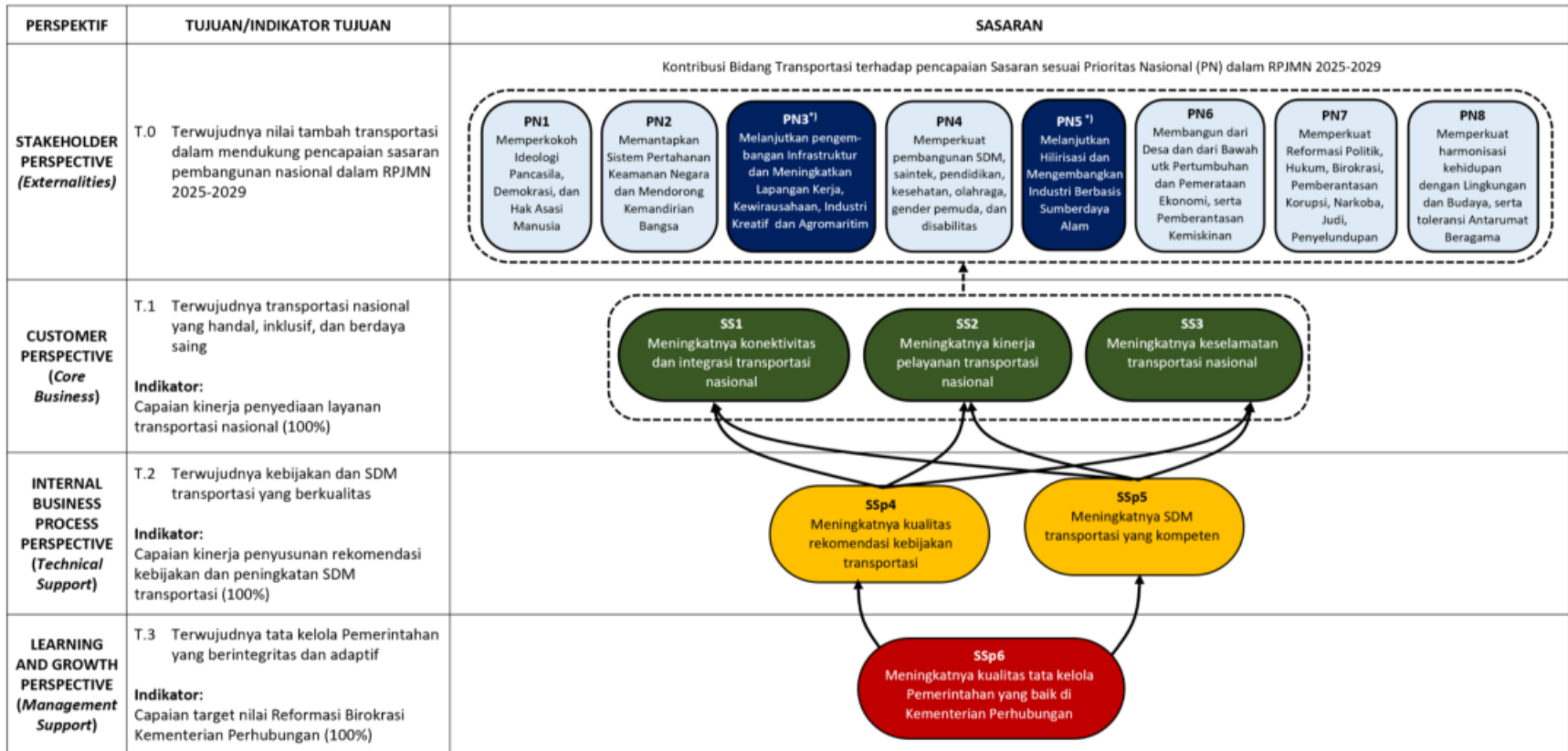
yang semakin tinggi; meningkatnya kinerja pelayanan transportasi; meningkatnya tingkat keselamatan transportasi; meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi, dan hukum; meningkatnya kompetensi sumber daya manusia transportasi; meningkatnya kualitas transportasi berkelanjutan; serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran, sekaligus sebagai dasar pengendalian dan evaluasi kinerja Kementerian Perhubungan. Sesuai dengan kaidah dokumen perencanaan, perumusan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, realistic* dan *time bound* (SMART), sehingga suatu sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan untuk dapat dicapai sebagai suatu *outcome* (*ultimate outcome* ataupun *intermediate outcome*) dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran strategis Kementerian Perhubungan merupakan **indikator kinerja utama** yang mencerminkan kinerja Kementerian Perhubungan dalam periode lima tahunan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dapat dinilai dari ketercapaian target yang ditetapkan dalam sasaran strategis.

Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2020-2024 serta menjabarkan misi Kementerian Perhubungan.

Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 ditetapkan sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian Sasaran Utama dan Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 sesuai lingkup tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan dalam Perpres Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan.

Struktur Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 disusun dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) yang secara komprehensif telah mengakomodir peran dari setiap Unit Eselon I di Kementerian Perhubungan beserta dengan seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.



*) Pada level Stakeholder (T.0) merupakan tujuan dan sasaran pada level Nasional (RPJMN 2025-2029) yang pengukurannya dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian dan Kementerian PPN/Bappenas.

**) Pada PN3 dan PN5 terdapat penugasan langsung kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator pencapaian Indikator Program Prioritas atau pengampu pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas pada Lampiran III RPJMN 2025-2029.

sumber : RENSTRA Kementerian Perhubungan 2025-2029

Gambar 2.1. Struktur Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam Perspektif *Balanced Score-card*

Dengan memperhatikan keterkaitan antara tujuan dengan sasaran strategis (SS) Kementerian Perhubungan, serta dukungannya terhadap Sasaran Utama dan sasaran serta indikator pada Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029, maka penyusunan Sasaran Strategis (SS) dan Sasaran Strategis Penunjang (SSp) berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan serta dukungan terhadap tujuan pembangunan yang akan dicapai, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tujuan 0. Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional pada RPJMN 2025-2029

PN 3. *Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)*

PN 5. *Biaya Logistik (% PDB)*

Tujuan 1. Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif dan berdaya saing

SS 1. *Meningkatnya Konektivitas dan Integrasi Transportasi Nasional* dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKSS 1.1 Rasio Konektivitas Transportasi Nasional
- IKSS 1.2 Rasio Integrasi Transportasi Nasional

SS 2. *Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Nasional* dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKSS 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik sektor Transportasi

SS 3. *Meningkatnya Keselamatan Transportasi Nasional* dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKSS 3 Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional

Tujuan 2. Terwujudnya Kebijakan dan SDM Transportasi yang Berkualitas

SSp 4. *Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi* dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKSSp 4 Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi

SSp 5. *Meningkatnya SDM Transportasi yang Kompeten* dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKSSp 5 Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten

Tujuan 3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif

SSp 6. *Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian Perhubungan*

dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKSSp 6 Indeks RB Kementerian Perhubungan

2.2. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BPSDM PERHUBUNGAN 2025-2029

Dengan memperhatikan Visi Kementerian Perhubungan berikut kedalaman dari kata kunci Transportasi Maju yang tertuang dalam RENSTRA Kementerian Perhubungan 2025-2029, maka Visi BPSDM Perhubungan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

" SDM Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mengandung maksud terciptanya sumber daya manusia di sektor transportasi yang berkualitas, inovatif, dan kompetitif, yang mampu mendukung pembangunan transportasi modern dan berkelanjutan. Visi ini bertujuan untuk menciptakan SDM yang tidak hanya kompeten dalam mengelola infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi. Dengan fokus pada pengembangan kemampuan digital, keberlanjutan lingkungan, serta integrasi teknologi dan transportasi ramah lingkungan, visi ini menegaskan bahwa kualitas SDM merupakan fondasi utama dalam mewujudkan sistem transportasi nasional yang modern, berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dalam upaya mewujudkan konektivitas yang efisien dan inklusif di seluruh wilayah di Indonesia.

SDM transportasi yang maju ini akan berperan penting dalam menghadapi tantangan global, mendorong transformasi teknologi, serta memperkuat konektivitas nasional guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan SDM yang unggul, sektor transportasi diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi logistik, dan memastikan keterhubungan antarwilayah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan daya saing Indonesia di tingkat internasional. SDM transportasi Indonesia tidak hanya siap menjawab tantangan nasional, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak dalam mewujudkan transportasi yang berdaya saing di tingkat global.

Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang *link and match* dengan kebutuhan industri, teknologi, dan pengembangan sarana prasarana transportasi untuk menuju Terwujudnya SDM Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045, menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM transportasi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan, mencakup perwujudan SDM transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan, SDM transportasi yang mendukung terlaksananya transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim, dan SDM transportasi yang menerapkan kebijakan transportasi sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keberlanjutan.
2. Memperkuat SDM transportasi untuk mendukung ketahanan dan Kemandirian Nasional, mencakup penguatan SDM transportasi berbasis ekonomi hijau dan

ekonomi biru, memperkuat SDM transportasi yang mendukung konektivitas transportasi nasional dalam rangka hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama.

3. Terbentuknya SDM Transportasi yang Mendukung Infrastruktur dan Integrasi Sistem, mencakup SDM transportasi yang mendukung pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara sistematis, dan SDM transportasi yang mendukung pembangunan transportasi perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau.
4. Memperkuat SDM Transportasi untuk Transformasi dan Teknologi Modern, mencakup SDM transportasi yang melanjutkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional dan peningkatan Kualitas SDM transportasi dan kebijakan SDM transportasi sesuai perkembangan teknologi.

Untuk memastikan konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, kebijakan, dan implementasi program dari BPSDMP dirumuskan tujuan dan sasaran BPSDMP Tahun 2025–2029 sebagai instrumen pengukuran kinerja. Tujuan BPSDMP Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai jembatan strategis antara visi–misi dan sasaran yang terukur. Tujuan tersebut merepresentasikan kondisi antara (strategic intent) yang ingin dicapai BPSDMP dalam periode perencanaan, khususnya dalam mendukung Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan pada aspek kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas serta tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif. Sedangkan sasaran BPSDMP merupakan penjabaran terukur dari tujuan yang ditetapkan dan disusun secara hierarkis melalui mekanisme cascading dari Sasaran Pembangunan Nasional (RPJMN) dan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan. Sasaran ini bersifat *outcome* dan *intermediate outcome*, serta diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang memenuhi prinsip SMART.

Perumusan tujuan dan sasaran BPSDMP disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta Renstra Kementerian Perhubungan, dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang mencakup empat perspektif utama, yaitu *Stakeholders*, *Customer*, *Internal Business Process*, serta *Learning and Growth*.

Dalam kerangka BSC, tujuan BPSDMP secara substantif beririsan langsung dengan:

- Tujuan T.2 Kementerian Perhubungan, yaitu ***terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas***; dan
- Tujuan T.3 Kementerian Perhubungan, yaitu ***terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif***.

Perumusan sasaran program BPSDM Perhubungan didasarkan pada hasil penurunan sasaran strategis dan sasaran strategis program Kementerian Perhubungan dan analisis terhadap tugas pokok dan fungsi BPSDM Perhubungan serta memperhatikan Surat Edaran Bersama (SEB) Kemenkeu – KemenPPN/Bappenas No S-122 / MK.2

/2020 dan B.517 /M.PPN / D.8/PP.04.03/ 05 /2020 Tanggal 24 Juni 2020 tentang Pedoman Redesain Perencanaan dan Penganggaran K/L. BPSDM Perhubungan memiliki peran utama dalam mendukung dua Sasaran Strategis Pendukung (SSp) Kemenhub, yang merupakan turunan dari Tujuan T.2 (Kebijakan dan SDM berkualitas) dan T.3 (Tata kelola yang berintegritas dan adaptif).

Berdasarkan sasaran strategis pendukung Kementerian Perhubungan yang merupakan turunan dari tujuan tersebut, BPSDMP memiliki peran dalam mewujudkan Sasaran Strategis (SSp5) untuk meningkatkan kualitas SDM transportasi yang kompeten dan Sasaran Strategis (SSp6) untuk meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan. Sasaran strategis SSp5 diukur melalui Persentase Peningkatan SDM Transportasi, yang mencakup dua komponen utama: penyerapan lulusan diklat pembentukan transportasi dan persentase lulusan diklat transportasi yang bersertifikat kompetensi. Sedangkan sasaran strategis SSp6 diukur melalui indeks RB Kementerian Perhubungan yang diukur oleh Kementerian PAN-RB. Sesuai dengan SEB tersebut diatas, rincian Program dan Kegiatan dari BPSDMP untuk mendukung 2 SSp Kementerian Perhubungan tersebut adalah:

a. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (DL)

- 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi;
- 2) Pendidikan Transportasi;

b. Program Dukungan Manajemen (WA)

- 1) Legislasi dan Litigasi SDM Transportasi
- 2) Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama SDM Transportasi;
- 3) Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik SDM Transportasi;
- 4) Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi;
- 5) Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum SDM Transportasi;
- 6) Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.

Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP), sebagai unit di bawah Kementerian Perhubungan yang bertanggung jawab atas pengembangan SDM transportasi, menerjemahkan sasaran strategis ini ke dalam konteks pengembangan SDM di seluruh matra transportasi. BPSDMP menjabarkannya menjadi tiga Sasaran Program Utama (SP1, SP2 dan SP3) dan satu Sasaran Program Penunjang (SP4), antara lain:

SP1 : Meningkatkan kualitas SDM transportasi yang kompeten. Sasaran ini diukur melalui IKP 1. Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten, yang mencakup kompetensi SDM di matra udara, darat, laut, dan perkeretaapian. `

Sasaran Program ini memiliki 3 Sasaran Kegiatan, antara lain:

SK 1: Meningkatnya Kompetensi SDM Transportasi Darat/Laut/Udara dengan indikator (DL.3996.01)

IKK 1. Tingkat Penyerapan Diklat Pembentukan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara yang Berkompetensi (DL.1975.01.01);

IKK 2. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang Berkualitas melalui Pendidikan dan Pelatihan (DL.1975.01.02); dan

IKK 3. Persentase Peserta Diklat Transportasi (DL.1975.01.03);

IKK 4. Tingkat Pemenuhan Akreditasi dan Sertifikasi (DL.1975.01.04);

IKK 5. Indeks Peningkatan SDM Transportasi (DL.1975.01.05).

SK 2 : Meningkatnya Kompetensi ASN Transportasi, dengan indikator kinerja (DL.1975.02):

IKK 6. Tingkat Pemenuhan ASN Transportasi Program Pembentukan (DL.1975.02.06); dan

IKK 7. Tingkat Pemenuhan ASN Transportasi Program Pelatihan (DL.1975.02.07).

SK 3 : Meningkatnya Kompetensi SDM Transportasi, dengan indikator kegiatan (DL.3996.03):

IKK 8. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Program Pembentukan (DL.1975.03.08); dan

IKK 9. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Program Pelatihan (DL.1975.03.09).

SP2 : Meningkatnya kualitas pengembangan program studi, jenis pelatihan, pelayanan dan penyerapan lulusan pendidikan dan pelatihan SDM transportasi. Sasaran ini berfokus pada kebijakan pengembangan SDM dengan kebutuhan sektor transportasi dan efektivitas implementasi kebijakan tersebut yang diukur dengan indikator IKP.2 Indeks Kualitas Program dan Pelayanan.

Sasaran program ini didukung oleh sasaran kegiatan antara lain:

SK 4 : Meningkatnya Akreditasi Lembaga Pendidikan Vokasi, Sertifikasi Pelatihan dan Tenaga Kerja Sektor Transportasi Darat/Laut/Udara (DL.1975.04). Indikator kinerja pada sasaran ini antara lain:

IKK 10. Tingkat Pemenuhan Sertifikasi Pelatihan oleh Lembaga yang Berwenang (DL.1975.04.10);

IKK 11. Persentase penelitian, HAKI dan Produk Inovasi Dosen dan Mahasiswa (DL.1975.04.12);

IKK 12. Persentase magang dosen di bidang transportasi (DL.1975.04.12); dan

IKK 13. Persentase kegiatan pengabdian Masyarakat yang berdampak di bidang transportasi (DL.1975.04.13); serta

IKK 14. Persentase kualitas dan kuantitas dosen (DL.1975.04.14).

SK 5 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat/Laut/Udara (DL.3996.05). Sasaran ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

IKK 15. Tingkat Kualitas Layanan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara (DL.1975.05.15), dan

IKK 16. Persentase Kerjasama di bidang Pendidikan dan pelatihan dengan stakeholder transportasi dan pendidikan (DL.1975.05.16).

SP3 : Meningkatnya kualitas penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM transportasi pada Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL) dan lembaga pelatihan transportasi. Melalui IKP3. Indikator Indeks Penjaminan Mutu, sasaran ini menekankan pada peningkatan kualitas dan pengakuan lembaga pendidikan dan pelatihan melalui implementasi kebijakan dan sistem evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Sasaran Program ini memiliki 2 Sasaran Kegiatan, antara lain:

SK 6 : Terwujudnya Kebijakan Pengembangan SDM yang Menunjang Kebijakan Sektor Transportasi Darat/Laut/Udara (DL.1975.06), dengan indikator kinerja:

IKK 17. Indeks Kebijakan Pengembangan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara (DL.1975.06.18).

SK 7 : Meningkatnya kualitas evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan BPSDMP (DL.1975.07), dengan indikator kinerja:

IKK 18. Pemenuhan Evaluasi dan Sistem Informasi Diklat Transportasi (DL.1975.07.18), dan

IKK 19. Persentase Kerja Sama di bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN Perhubungan dengan stakeholder Transportasi dan Pendidikan (DL.1975.07.19)

SP4 : Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di BPSDMP, merupakan sasaran pendukung dalam mencapai 3 (tiga) Sasaran Program Utama dan merupakan cerminan dalam mendukung SS7 Kementerian Perhubungan dalam peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya dan akuntabilitas kinerja pemerintahan di Lingkungan Kementerian Perhubungan,

serta transformasi kinerja kelembagaan Kementerian Perhubungan menuju good governance yang didorong oleh pemanfaatan teknologi. Sasaran ini diukur dengan indikator IKP4 Indeks Tata Kelola Lembaga BPSDMP.

SP4 merupakan satu-satunya sasaran pada Program Dukungan Manajemen. Sasaran ini didukung oleh sasaran kegiatan, antara lain:

SK 8: Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan (WA.1979.08), dengan indikator kinerja

IKK 20. Persentase Peserta Pelatihan Aparatur (WA.4627.08.20); dan

IKK 21. Indeks Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan (WA.4627.08.21).

SK 9 : Terwujudnya Organisasi yang Agile dan SDM Unggul (WA.4626.09 dan WA.4629.09), dengan indikator kinerja :

IKK 22. Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP (WA.4626.09.22); dan

IKK 23. Indeks Regulasi BPSDMP (WA.4629.09.23).

SK 10 :Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Berorientasi pada Layanan Prima (WA.4627.10), dengan indikator kinerja:

IKK 24. Persentase Pemenuhan Akuntabilitas di Lingkungan BPSDMP (WA.4627.10.24);

IKK 25. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (WA.4627.10.25); dan

IKK 26. Nilai SAKIP BPSDMP (WA.4627.10.26).

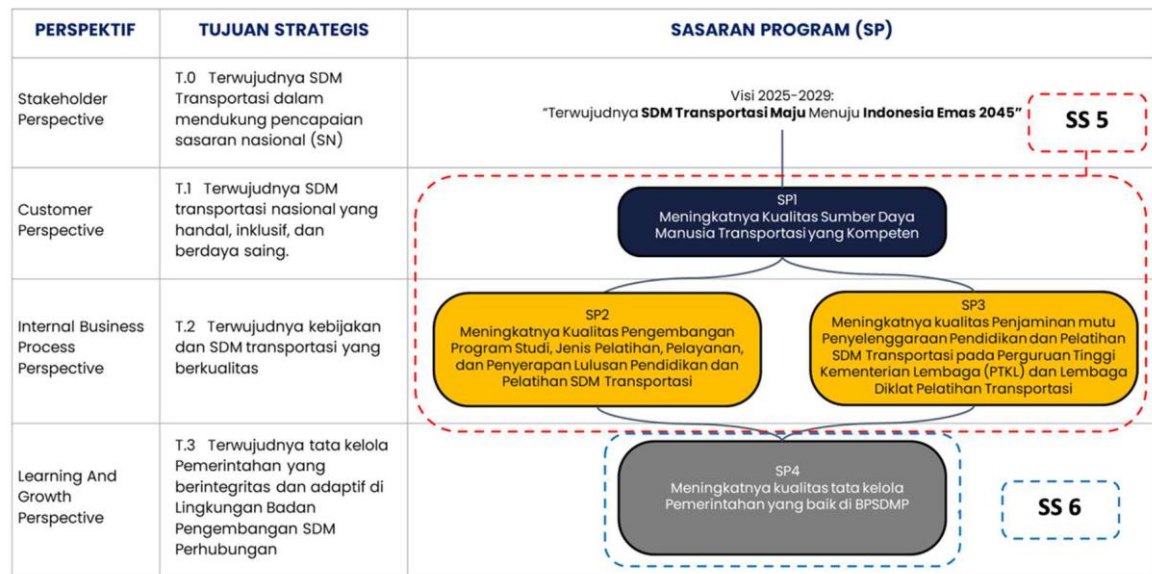
SK 11 :Meningkatnya kualitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik SDM transportasi (WA.4628.11), dengan indikator kinerja

IKK 27. Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik di Lingkungan BPSDMP (WA.4628.11.27).

SK 12 :Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan BPSDM Perhubungan, dengan indikator kinerja

IKK 28. Persentase pelaksanaan kerjasama dan kemitraan (WA.4630.12.28).

Tujuan dan Sasaran dari BPSDMP ini menjadi landasan utama bagi seluruh unit pelaksana teknis dan pusat-pusat pengembangan SDM, termasuk PPSDMPL, dalam menyusun arah kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan SDM transportasi laut selama periode 2025–2029.



Indikator kinerja sasaran Program Pengembangan SDM Perhubungan 2025-2029

Keterangan:

 = Kelompok dukungan Sasaran Program BPSDMP terhadap Sasaran Strategis 5 Kemenhub

 = Kelompok dukungan Sasaran Program BPSDMP terhadap Sasaran Strategis 6 Kemenhub

sumber : RENSTRA BPSDMP Perhubungan 2025-2029

Gambar 2.2. Peta Strategi BPSDMP Perhubungan Tahun 2025-2029

2.3. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PUSAT PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN LAUT 2025-2029

Visi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut harus selaras dengan visi Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan, serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025. Berdasarkan tugas pokok Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang meliputi pengembangan kompetensi SDM di bidang transportasi laut melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang mendukung kebutuhan industri maritim, serta penyelarasan dengan standar nasional dan internasional, maka visi dari Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut adalah:

**Mewujudkan SDM Perhubungan Laut yang Kompeten, Profesional,
dan Berdaya Saing Global untuk Mendukung Indonesia sebagai
Poros Maritim Dunia Menuju Indonesia Emas 2045.**

Visi ini mencerminkan tupoksi Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, seperti pengembangan kurikulum, pelatihan berbasis teknologi, dan sertifikasi yang mendukung kebutuhan industri maritim, sekaligus mendukung visi Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

- **"Kompeten, Profesional, dan Berdaya Saing Global"**: mencerminkan fokus pada peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan standar internasional, seperti yang diamanatkan dalam tugas pokok untuk menghasilkan tenaga kerja maritim yang mampu bersaing di pasar global.
- **"Mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia"**: selaras dengan visi nasional untuk memperkuat peran Indonesia di sektor maritim, dengan menekankan peran strategis transportasi laut.
- **"Menuju Indonesia Emas 2045"**: menunjukkan komitmen untuk mendukung visi jangka panjang Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan tujuan nasional.

Berdasarkan pada visi Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut Tahun 2025–2029 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025, yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi SDM di bidang transportasi laut, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, serta peningkatan kompetensi untuk mendukung standar nasional dan internasional, maka misi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut dijabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang inovatif dan berstandar internasional untuk menghasilkan SDM perhubungan laut yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan industri maritim.
2. Mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang selaras dengan perkembangan teknologi dan regulasi maritim global untuk mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas sertifikasi SDM perhubungan laut guna memenuhi standar nasional dan internasional.
4. Memperkuat kerja sama dengan pemangku kepentingan industri maritim, instansi pemerintah, dan lembaga internasional untuk meningkatkan daya saing SDM.
5. Menerapkan digitalisasi dalam sistem pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan data SDM untuk mendukung efisiensi dan transparansi layanan.

Misi ini dirancang untuk mendukung visi yang telah ditetapkan serta mencerminkan tupoksi Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 dengan penjelasan misi sebagai berikut:

- **Misi 1:** Menekankan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada kompetensi, sesuai dengan tupoksi untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai di sektor transportasi laut.

- **Misi 2:** Mencerminkan tugas pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi, seperti digitalisasi dan standar maritim global.
- **Misi 3:** Mengacu pada fungsi sertifikasi untuk memastikan SDM memenuhi standar nasional (seperti BNSP) dan internasional (seperti STCW).
- **Misi 4:** Menyoroti pentingnya kolaborasi dengan pihak eksternal, sebagaimana diamanatkan dalam tupoksi untuk mendukung pengembangan SDM yang berdaya saing.
- **Misi 5:** Menyesuaikan dengan kebutuhan digitalisasi dalam pengelolaan pendidikan dan pelatihan, yang merupakan bagian dari modernisasi layanan sesuai regulasi.

Selanjutnya, sebagai penjabaran operasional dari visi dan misi Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, penetapan tujuan dan sasaran Renstra PPSDMPL Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk memastikan arah pembangunan SDM perhubungan laut yang terukur, terfokus, dan berorientasi hasil. Tujuan dalam Renstra ini dimaknai sebagai kondisi antara (*intermediate outcomes*) yang ingin dicapai PPSDMPL dalam kurun waktu lima tahun sebagai kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan Kementerian Perhubungan. Sementara itu, sasaran merupakan perwujudan lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara lebih spesifik, terukur, dan operasional sebagai dasar penetapan indikator kinerja kegiatan serta penyusunan strategi dan program.

Dengan mendasarkan pada tugas pokok dan fungsi PPSDMPL sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025, serta memperhatikan visi dan misi PPSDMPL berikut sasaran strategis yang diamanatkan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan Kementerian Perhubungan, ditetapkan lima tujuan utama pembangunan PPSDMPL, yakni:

- **Tujuan 1. Meningkatkan Kompetensi SDM Transportasi Laut yang Berstandar Nasional dan Internasional**

Tujuan ini diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sektor transportasi laut melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, pembentukan kompetensi, serta sertifikasi profesi yang memenuhi standar nasional dan konvensi internasional. Pencapaian tujuan ini sejalan dengan mandat PPSDMPL dalam bidang perencanaan kebutuhan SDM, penyusunan dan pelaksanaan program diklat, serta penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan transportasi laut. Tujuan ini memperkuat Indikator SP1 dan SP2, termasuk Indeks Peningkatan SDM Transportasi serta Tingkat Pemenuhan SDM Program Pembentukan dan Pelatihan.

- **Tujuan 2. Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut secara Terstandarisasi, Terakreditasi, dan Berkelanjutan**

Tujuan ini bertujuan memastikan seluruh layanan pendidikan dan pelatihan berada dalam kerangka penjaminan mutu yang konsisten, melalui harmonisasi kurikulum, akreditasi lembaga, sertifikasi tenaga pendidik dan instruktur, serta penerapan teknologi dan standar kompetensi kerja sektor transportasi laut. Tujuan ini sesuai fungsi PPSDMPL terkait penjaminan mutu, akreditasi, standardisasi, kurikulum, silabus, serta pembinaan lembaga diklat. Indikator tujuan ini tercermin dalam SP2 dan SP3, terutama Indeks Kualitas Program dan Pelayanan serta Indeks Penjaminan Mutu.

- **Tujuan 3. Memperkuat Kapasitas Lembaga dan Efektivitas Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut**

Tujuan ini ditetapkan untuk membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, dan adaptif pada PPSDMPL, melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan anggaran, pemantauan dan evaluasi, pengendalian internal, serta digitalisasi layanan diklat. Tujuan ini sejalan dengan fungsi PPSDMPL yang mencakup penyusunan rencana, pelaporan kinerja, manajemen risiko, serta dukungan reformasi birokrasi. Tujuan ini selaras dengan SP4 yang tujuannya mencakup peningkatan Indeks Tata Kelola Lembaga dan pemenuhan indikator IKPA serta akuntabilitas.

- **Tujuan 4. Memperluas Kemitraan Strategis dan Kolaborasi Global dalam Pengembangan SDM Transportasi Laut**

Tujuan ini memfokuskan pada penguatan jejaring kerja sama nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, pelatihan, sertifikasi, riset, dan pemanfaatan teknologi maritim. PPSDMPL memiliki fungsi menyusun dan melaksanakan kerja sama, termasuk rekomendasi kurikulum dan sertifikasi. Selaras dengan indikator IKK 14 (Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan), tujuan ini mendukung adaptasi terhadap dekarbonisasi, digitalisasi, otomatisasi kapal, serta tantangan rantai pasok global melalui peningkatan relevansi dan daya saing lulusan.

- **Tujuan 5. Mendukung Terwujudnya Transportasi Laut yang Aman, Selamat, Efisien, dan Berkelanjutan melalui Kebijakan Pengembangan SDM**

Tujuan ini menempatkan PPSDMPL sebagai bagian dari ekosistem strategis penyelenggaraan transportasi laut yang berfokus pada aspek keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan. PPSDMPL menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis, melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, serta memberikan rekomendasi terkait kebutuhan kompetensi SDM untuk mendukung kebijakan sektor transportasi laut. Tujuan ini diperkuat oleh kebutuhan peningkatan standar kompetensi, respons terhadap ancaman siber, isu lingkungan dan dekarbonisasi, serta harmonisasi sertifikasi global sebagaimana diamanatkan

dalam tugas pokok dan fungsi PPSDMPL sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025.

Seluruh tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran per tujuan yang berfungsi sebagai pengunci ketercapaian tujuan secara terukur, sekaligus menjadi rujukan langsung dalam penetapan indikator kinerja kegiatan dan strategi pelaksanaan Renstra PPSDMPL Tahun 2025–2029.

Tujuan 1 – Kompetensi SDM

- S1.1 Peningkatan kompetensi SDM transportasi laut
- S1.2 Pemenuhan kebutuhan SDM pada pembentukan & pelatihan
- S1.3 Peningkatan kualitas layanan diklat

Tujuan 2 – Mutu Penyelenggaraan Diklat

- S2.1 Peningkatan standar mutu penyelenggaraan diklat
- S2.2 Peningkatan akreditasi & sertifikasi
- S2.3 Harmonisasi kurikulum & standar kompetensi

Tujuan 3 – Tata Kelola

- S3.1 Peningkatan perencanaan, anggaran & kinerja
- S3.2 Penguatan akuntabilitas & governance
- S3.3 Digitalisasi layanan & sistem informasi

Tujuan 4 – Kemitraan

- S4.1 Peningkatan kerja sama nasional-internasional
- S4.2 Pemanfaatan kerja sama untuk relevansi & penyerapan lulusan

Tujuan 5 – Kebijakan Pengembangan SDM untuk Transportasi Laut Berkelanjutan

- S5.1 Peningkatan efektivitas kebijakan pengembangan SDM sektor laut
- S5.2 Penguatan pemantauan, evaluasi & rekomendasi kebijakan

2.4. Manajemen Risiko Berdasarkan Sasaran Kegiatan PPSDMPL

Dalam pencapaian Sasaran Kegiatan, PPSDMPL mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat berdampak pada ketidakcapaian atau penurunan capaian dari target yang ditetapkan. Secara umum, identifikasi

1. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kompetensi ASN Transportasi (SK.2)
Sasaran kegiatan ini mendukung Sasaran Program BPSDM Perhubungan dalam Meningkatkan kualitas SDM transportasi yang kompeten (SP.1).
Risiko utama yang berpotensi muncul adalah Ketidaksesuaian kompetensi peserta pelatihan dengan pelatihan yang dilaksanakan. Peningkatan

kompetensi ASN yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan bidang kerjanya, atau penentuan ASN yang tidak sesuai dengan bidang kompetensinya. Mitigasi risiko yang dilakukan dengan Penerapan SOP seleksi peserta pelatihan, salah satunya dengan memetakan *gap* kompetensi masing-masing ASN di Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut dan mengelompokkan sesuai dengan kelompok pengembangan kompetensi yang dibutuhkan. Pelaksanaan pengembangan kompetensi ini bersifat individu, artinya jika yang bersangkutan berhalangan pada saat itu maka tidak dapat digantikan dengan ASN lain.

2. Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan SDM yang Menunjang Kebijakan Sektor Transportasi Laut (SK. 6)

Sasaran ini mendukung Sasaran Program Meningkatnya kualitas penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM transportasi pada Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL) dan lembaga pelatihan transportasi. Melalui IKP3. Indikator Indeks Penjaminan Mutu, sasaran ini menekankan pada peningkatan kualitas dan pengakuan lembaga pendidikan dan pelatihan melalui implementasi kebijakan dan sistem evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (SP.3)

Risiko utama yang berpotensi muncul adalah kesulitan penyusunan kurikulum yang fleksibel dan ketersediaan pengajar dengan kompetensi sesuai dengan standar kurikulum yang baru. Perkembangan industri maritim yang begitu cepat, ditambah dengan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan dalam dunia maritim harus diimbangi dengan kemampuan para peserta didik pada bidang-bidang kompetensi baru dan semuanya diwadahi dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan yang selaras.

Mitigasi risiko yang dilakukan adalah melibatkan stakeholder dalam pelaksanaan reviu maupun penyusunan kurikulum baru, yang dilakukan secara berkala. Perlibatan praktisi industri dalam memberikan pelatihan/workshop bagi para pengajar khususnya untuk pelatihan-pelatihan baru juga dijajaki secara intensif, termasuk pemanfaatan program pelatihan dari luar negeri terkait kompetensi baru.

3. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan BPSDMP (SK.7)

Sasaran ini juga mendukung Sasaran Program Meningkatnya kualitas penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM transportasi pada Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL) dan lembaga pelatihan transportasi. Melalui IKP3. Indikator Indeks Penjaminan Mutu, sasaran ini menekankan pada peningkatan kualitas dan pengakuan lembaga pendidikan dan pelatihan melalui implementasi kebijakan dan sistem evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (SP.3)

Risiko utama yang berpotensi muncul adalah keterbatasan kualitas dan kuantitas pengajar. 12 (dua belas) UPT BPSDMP subsektor transportasi laut

yang tersebar di 8 (delapan) provinsi memunculkan risiko kekurangan tenaga pengajar, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Mitigasi risiko yang dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik yang berstatus fungsional dosen dan instruktur, juga yang berstatus selain keduanya namun memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai. Penyediaan anggaran pengembangan kompetensi baik di dalam negeri maupun di luar negeri juga dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

4. Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Organisasi yang Agile dan SDM Unggul (SK.9)
Sasaran ini mendukung Sasaran Program Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di BPSDMP (SP.4)

Risiko utama yang berpotensi muncul adalah tidak tercapainya kewajiban pengembangan kompetensi PNS minimal 20 JP per tahun. Keterbatasan anggaran dan pelatihan teknis sesuai bidang kerja serta beban kerja PNS saat ini menjadi tantangan yang harus diantisipasi oleh organisasi.

Mitigasi risiko yang dilakukan dengan memonitor pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM setiap bulannya dan mensosialisasikan kegiatan pelatihan berbasis *online* di berbagai platform pelatihan.

5. Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Berorientasi pada Layanan Prima (SK.10)

Sasaran ini juga mendukung Sasaran Program Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di BPSDMP (SP.4)

Risiko utama yang berpotensi muncul adalah proses penyusunan atau reviu Renstra mengalami keterlambatan. Arah kebijakan dan kerangka pendanaan dalam renstra seringkali menjadi tantangan yang cukup berat sehingga memakan waktu yang cukup lama.

Mitigasi risiko yang dilakukan dengan penyusunan *time line* yang realistis dan memonitor progress secara berkala.

Manajemen Risiko PPSDMPL disusun dan diterapkan selaras dengan Matriks Pengecekan Keselarasan Renstra BPSDM Perhubungan Tahun 2025–2029, dimana setiap sasaran kegiatan telah:

- Mendukung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPSDM Perhubungan.
- Mengidentifikasi risiko strategis dan operasional yang relevan.
- Menetapkan langkah mitigasi risiko yang realistis dan terukur.

Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan konsistensi antara perencanaan strategis dan implementasi kegiatan PPSDMPL.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1.ARAHAN PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025-2029

Pengarusutamaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, menegaskan visi **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, visi ini dijadikan fondasi untuk tahap awal pembangunan jangka panjang, yang menekankan transformasi di berbagai bidang sebagai langkah strategis bagi Indonesia untuk mencapai status sebagai bangsa maju menjelang 2045. Visi Presiden 2025-2029 yang juga merupakan visi pembangunan jangka menengah Indonesia tahun 2025-2029 dirancang sebagai kelanjutan dan akselerasi dari agenda pembangunan sebelumnya, dengan fokus pada penguatan fondasi ekonomi domestik, peningkatan daya saing global, serta pemantapan ketahanan nasional di segala bidang. Pemerintah bertekad untuk mentransformasi ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif, dengan mendorong industrialisasi berbasis nilai tambah, penguasaan teknologi digital dan hijau, serta pengoptimalan potensi sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. Visi ini menitikberatkan pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Hal ini diwujudkan melalui strategi pengentasan kemiskinan ekstrem, perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan infrastruktur yang menyambung dari pusat hingga daerah terpencil.

Visi tersebut dijabarkan melalui misi pembangunan nasional yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Presiden sesuai dengan RPJMN 2025-2029 disebut juga dengan Asta Cita dan menjadi Prioritas Nasional (PN) tahun 2025-2029. Asta Cita merupakan istilah yang digunakan dalam RPJMN 2025–2029 untuk merujuk pada delapan misi Presiden terpilih periode 2025–2029. Asta Cita menjadi dasar perumusan Prioritas Pembangunan Nasional yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, penganggaran nasional, intervensi regulasi dan kelembagaan, serta penyusunan rencana kerja dan kebijakan teknis strategis lintas sektor, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

Arah pembangunan nasional dalam Asta Cita tersebut diselaraskan secara substantif dengan agenda transformasi pembangunan jangka panjang dalam RPJPN 2025–2045,

sehingga membentuk kerangka kebijakan yang integratif dan sinergis menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Keterpaduan antara Prioritas Nasional dalam RPJMN dan strategi transformasi dalam RPJPN memperkuat arah pembangunan yang berkelanjutan dan resilien.

Kedelapan Asta Cita yang juga merupakan Misi Presiden dan juga Prioritas Nasional tersebut meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Mantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong mandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air; ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. **Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM)**, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat agama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Salah satu misi pembangunan nasional yang juga merupakan prioritas nasional menempatkan pembangunan sumber daya manusia unggul, produktif, dan berdaya saing sebagai pilar utama dalam mendukung transformasi ekonomi, peningkatan konektivitas nasional, serta penguatan daya saing Indonesia di tingkat global. Hal ini menunjukkan pada misi pembangunan nasional jangka menengah Tahun 2025–2029 menegaskan pentingnya pembangunan manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, produktif, dan adaptif terhadap perubahan global. Pengarusutamaan pembangunan SDM dilakukan secara lintas sektor dengan menempatkan peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan integritas aparatur serta tenaga kerja sebagai prasyarat utama dalam mendukung agenda prioritas nasional.



sumber : Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

Gambar 3.1. 8 (delapan) Prioritas Nasional dalam Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

3.2. ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025-2029

Arahan Pembangunan Kewilayahan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 menempatkan wilayah sebagai basis utama pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui pendekatan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pembangunan kewilayahan tidak dipahami semata sebagai pendekatan spasial, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mengurangi ketimpangan antarwilayah, memperkuat konektivitas nasional, serta meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Dalam kerangka RPJMN 2025–2029, pembangunan kewilayahan dilaksanakan melalui penetapan dan penguatan tipologi kawasan prioritas, meliputi kawasan pertumbuhan, kawasan komoditas unggulan, kawasan swasembada pangan–air–energi, kawasan afirmasi, serta kawasan konservasi dan rawan bencana. Setiap kawasan dirancang dengan pendekatan tematik yang menyesuaikan karakteristik, potensi, dan tantangan wilayah, sehingga intervensi pembangunan menjadi lebih fokus, terarah, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan pertumbuhan ditetapkan sebagai motor penggerak ekonomi nasional dan regional dengan fokus pada penguatan pusat-pusat pertumbuhan perkotaan, metropolitan, dan kawasan strategis ekonomi. Contoh kawasan pertumbuhan meliputi Wilayah Metropolitan Jakarta–Bogor–Depok–Tangerang–Bekasi (Jabodetabek) dan kawasan industri sekitarnya di Pulau Jawa; Wilayah Metropolitan Medan dan Kawasan Pengembangan Industri Medan–Binjai–Deli Serdang di Sumatera; Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Danau Toba; Kawasan Perkotaan Makassar dan Kawasan Industri Makassar–Maros–Pangkep di Sulawesi; Kawasan Perkotaan Denpasar–Badung–Gianyar–Tabanan (Sarbagita) di Bali; serta Kawasan Perkotaan Balikpapan–Samarinda sebagai simpul pertumbuhan di Kalimantan Timur. Pada kawasan ini, arah pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar, konektivitas transportasi dan logistik, pengembangan industri bernilai tambah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Kawasan komoditas unggulan diarahkan untuk memperkuat basis ekonomi wilayah melalui peningkatan produktivitas, hilirisasi, dan penguatan rantai nilai komoditas strategis nasional. Contoh kawasan ini antara lain Kawasan Kopi Dataran Tinggi Gayo di Aceh dan Kawasan Sawit Sumatera Timur; Kawasan Padi dan Hortikultura Jawa Tengah–Jawa Timur; Kawasan Kakao dan Nikel di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara; Kawasan Perkebunan Kelapa dan Perikanan di Maluku; Kawasan Sawit dan Hilirisasi Mineral di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah; serta Kawasan Perikanan Tangkap dan Budidaya di Papua Barat dan Papua Selatan. Pengembangan kawasan komoditas unggulan dilakukan secara terpadu dengan penguatan prasarana pendukung, kelembagaan ekonomi lokal, riset dan inovasi, serta penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Kawasan swasembada pangan, air, dan energi ditetapkan sebagai penyangga ketahanan nasional. Contoh kawasan ini meliputi Kawasan Swasembada Pangan Pantura Jawa dan Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional; Kawasan Swasembada Pangan Sumatera Selatan dan Lampung; Kawasan Swasembada Air dan Energi Dataran Tinggi Papua; Kawasan Energi Baru dan Terbarukan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; serta Kawasan Pangan dan Energi di Nusa Tenggara Timur. Pembangunan kawasan ini difokuskan pada penguatan daya dukung sumber daya alam, pengelolaan air terpadu, modernisasi pertanian, serta pengembangan energi baru dan terbarukan untuk menjamin keberlanjutan pasokan kebutuhan dasar nasional.

Kawasan afirmasi ditetapkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan kepulauan. Contoh kawasan afirmasi meliputi Kepulauan Nias di Sumatera Utara; Kabupaten Simeulue di Aceh; wilayah perbatasan Kalimantan Utara; wilayah kepulauan dan pesisir Maluku; Nusa Tenggara Timur bagian timur; serta sebagian besar wilayah Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Arah pembangunan kawasan afirmasi

difokuskan pada pemenuhan layanan dasar, penguatan konektivitas wilayah, peningkatan ketahanan sosial-ekonomi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia lokal, serta perlindungan sosial adaptif berbasis karakteristik wilayah.

Kawasan konservasi dan/atau rawan bencana sebagai bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan. Contoh kawasan ini meliputi Taman Nasional Gunung Leuser di Sumatera, Kawasan Danau Toba di Sumatera Utara, Taman Nasional Bromo–Tengger–Semeru di Jawa, kawasan rawan gempa dan tsunami di pesisir selatan Jawa dan Nusa Tenggara, Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi, kawasan hutan hujan Kalimantan, serta kawasan konservasi dan pesisir rawan perubahan iklim di Papua dan Maluku. Pembangunan kawasan ini diarahkan pada perlindungan dan pemulihan ekosistem, pengurangan risiko bencana, serta pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dalam kerangka ekonomi hijau dan biru.

Secara keseluruhan, arahan pembangunan kewilayahan RPJMN 2025–2029 menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah, integrasi lintas sektor dan lintas wilayah, serta penguatan tata kelola pembangunan berbasis wilayah. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan kewilayahan diharapkan mampu menjadi pengungkit utama pencapaian visi pembangunan nasional 2025–2029 yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Implementasi kebijakan tersebut ditopang oleh peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pengembangan sistem transportasi nasional, termasuk transportasi laut sebagai tulang punggung integrasi wilayah dan logistik nasional

Sejalan dengan arah pembangunan kewilayahan tersebut, sektor transportasi laut memegang peran strategis dalam mendukung pengembangan kawasan pelabuhan, kawasan industri dan ekonomi khusus, kawasan pariwisata prioritas, serta wilayah kepulauan dan perbatasan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan kewilayahan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kualitas sumber daya manusia perhubungan laut yang profesional, adaptif, dan berdaya saing. SDM perhubungan laut dituntut tidak hanya menguasai aspek teknis operasional pelayaran dan kepelabuhanan, tetapi juga memiliki kompetensi manajerial, keselamatan dan keamanan pelayaran, layanan logistik, pemanfaatan teknologi digital, serta pemahaman terhadap karakteristik kewilayahan dan pembangunan berkelanjutan.

3.3. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai bagian integral dari pelaksanaan pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029. Pada periode ini, sektor transportasi diposisikan sebagai pengungkit utama pembangunan nasional melalui penguatan konektivitas, peningkatan efisiensi sistem logistik,

peningkatan kualitas pelayanan publik, serta dukungan terhadap pemerataan pembangunan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan jangka menengah nasional, arah kebijakan Kementerian Perhubungan difokuskan pada penguatan sistem transportasi nasional yang terintegrasi antarmoda dan antarwilayah guna mendukung prioritas nasional, khususnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan industri dan hilirisasi, kawasan pangan, pariwisata prioritas, serta daerah tertinggal, terluar, dan perbatasan. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan bahwa pembangunan transportasi mampu memperlancar mobilitas orang dan barang, menurunkan biaya logistik nasional, serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan daerah.

Strategi pembangunan Kementerian Perhubungan selanjutnya diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan transportasi yang berorientasi pada keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan ketepatan waktu. Dalam kerangka RPJMN 2025–2029, strategi ini dilaksanakan melalui penguatan standar pelayanan, peningkatan kinerja operasional moda transportasi, serta pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan yang terintegrasi. Pendekatan ini menjadi instrumen utama dalam menjawab permasalahan kemacetan, ketimpangan akses transportasi, serta rendahnya minat masyarakat terhadap angkutan umum di kawasan perkotaan dan metropolitan.

Selain itu, arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan juga diarahkan untuk memperkuat aspek keselamatan dan keberlanjutan transportasi sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Pembangunan transportasi diarahkan untuk menurunkan tingkat kecelakaan transportasi serta mengurangi emisi gas rumah kaca sektor transportasi melalui pengembangan transportasi ramah lingkungan, peningkatan efisiensi energi, dan peralihan ke moda transportasi yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, sektor transportasi diharapkan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan berkelanjutan nasional.

Untuk memastikan arah kebijakan dan strategi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan, Kementerian Perhubungan membangun fondasi transformasi sektor transportasi yang mencakup penguatan sumber daya manusia, pendanaan, tata kelola, dan teknologi. Fondasi transformasi ini berfungsi sebagai *enabler* utama yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan transportasi dalam RPJMN 2025–2029.

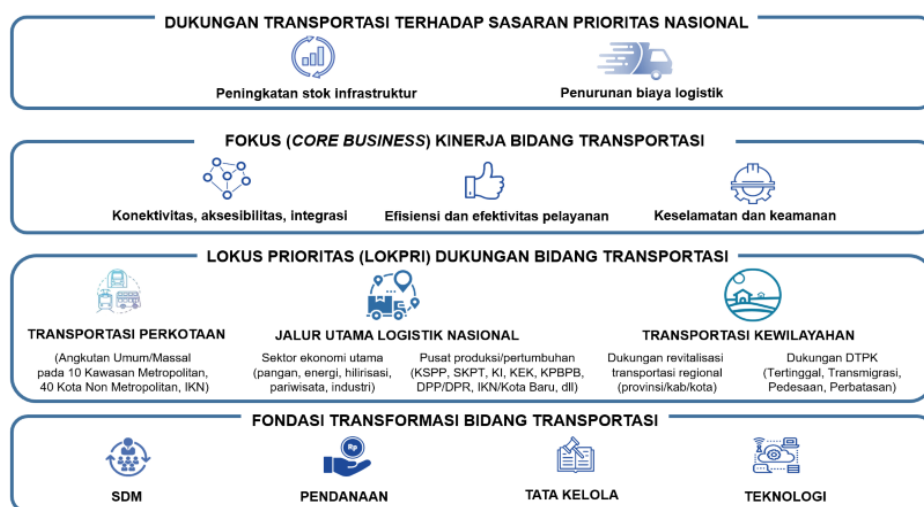
Dalam fondasi transformasi sumber daya manusia, Kementerian Perhubungan mengarahkan kebijakan pada peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM transportasi guna mendukung pelaksanaan kebijakan, pengoperasian layanan, dan pengawasan transportasi yang semakin kompleks. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi transportasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyelarasan kompetensi SDM dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri menjadi

strategi kunci untuk menjamin tersedianya SDM transportasi yang andal dan berdaya saing.

Fondasi transformasi pendanaan diarahkan untuk menopang keberlanjutan pembangunan transportasi nasional di tengah keterbatasan fiskal. Kementerian Perhubungan mengoptimalkan peran APBN secara lebih fokus pada kegiatan strategis yang mendukung sasaran RPJMN, sekaligus mendorong pengembangan skema pembiayaan alternatif melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha, keterlibatan swasta, serta sinergi pendanaan dengan pemerintah daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan memperluas kapasitas pendanaan pembangunan transportasi.

Fondasi transformasi tata kelola difokuskan pada penguatan peran Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan integrator sistem transportasi nasional. Strategi yang ditempuh meliputi penyederhanaan dan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan, serta peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan manajemen risiko. Transformasi tata kelola ini diarahkan untuk menciptakan proses penyelenggaraan transportasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah nasional.

Fondasi transformasi teknologi diarahkan untuk mempercepat modernisasi sektor transportasi melalui digitalisasi dan penerapan sistem transportasi cerdas. Pemanfaatan teknologi informasi dan data transportasi secara terintegrasi menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan, efisiensi operasional, serta ketepatan pengambilan keputusan berbasis data. Transformasi teknologi ini memperkuat kapasitas Kementerian Perhubungan dalam mengelola sistem transportasi nasional yang semakin kompleks dan dinamis.



sumber : RENSTRA Kementerian Perhubungan 2025-2029

Gambar 3.2. Fokus Kementerian Perhubungan dalam Penyelenggaraan Bidang Transportasi Tahun 2025-2029

3.4. ARAH KEBIJAKAN BPSDM PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

Dalam rencana pembangunan Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP), arah kebijakan dan strategi pembangunan diharapkan mampu memastikan tersedianya sumber daya manusia perhubungan yang unggul, profesional, adaptif terhadap perubahan, serta berdaya saing global guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor transportasi nasional.

Perumusan arah kebijakan dan strategi BPSDMP Tahun 2025–2029 didasarkan pada sejumlah landasan utama, baik normatif, strategis, maupun empiris. Secara normatif, arah kebijakan BPSDMP mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menempatkan pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi sebagai salah satu pilar utama menuju Visi Indonesia Emas 2045. Selanjutnya, arah kebijakan tersebut dijabarkan dan diselaraskan dengan visi, misi, serta sasaran strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025–2029, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan sistem transportasi nasional yang andal, berkeselamatan, berkelanjutan, dan terintegrasi.

Sebagai penjabaran operasional dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPSDMP yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan Kementerian Perhubungan, arah kebijakan dimaksud menetapkan fokus pengembangan SDM transportasi yang unggul, profesional, adaptif, dan berdaya saing, sedangkan strategi dirumuskan sebagai pendekatan implementatif untuk memastikan pencapaian sasaran strategis secara terukur melalui program dan kegiatan prioritas. Setiap butir arah kebijakan dan strategi disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Renstra BPSDMP 2020–2024, isu strategis pengembangan SDM transportasi lintas matra, serta tuntutan transformasi sektor transportasi, dan menjadi dasar penetapan target kinerja serta rencana pendanaan BPSDMP selama periode 2025–2029.

Selain itu, perumusan arah kebijakan dan strategi BPSDMP juga mempertimbangkan perkembangan teknologi dan digitalisasi sektor transportasi, agenda dekarbonisasi dan transportasi hijau, serta tuntutan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Tantangan ketimpangan kualitas SDM antarwilayah, kebutuhan peningkatan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta perlunya penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan nasional dan global menjadi faktor penting yang mendasari penetapan arah kebijakan dan strategi BPSDMP pada periode 2025–2029.

Berdasarkan landasan tersebut, arah kebijakan BPSDMP Tahun 2025–2029 diarahkan pada penguatan peran BPSDMP sebagai unit kerja eselon I Kementerian Perhubungan yang bertanggung jawab dalam menyiapkan SDM Perhubungan yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing. Secara rinci, arah kebijakan dan strategi pembangunan dari BPSDMP Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Diklat Vokasi yang Berkualitas

dengan strategi :

- a. Penyusunan *Training Needs Analysis* (TNA);
- b. Penyusunan Grand Design SDM Transportasi;
- c. Penyelenggaraan program Pola Pembibitan untuk pemenuhan kebutuhan regulator Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah;
- d. Penyelenggaraan Diklat Pembentukan, Diklat Teknis dan Diklat Peningkatan Kompetensi;
- e. Penyelenggaraan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM);
- f. Penyelenggaraan Diklat untuk Operator transportasi;
- g. Penyelenggaraan Diklat Logistik Terintegrasi dan Rantai Pasok;
- h. Penyelenggaraan Diklat di daerah 3TP/DTPK;
- i. Peningkatan jumlah penelitian terapan yang terpublikasi dalam Jurnal Nasional/ Internasional;
- j. Penyelenggaraan Program Pengabdian Masyarakat yang bersifat edukatif dan community development;
- k. Penerapan prinsip humanisme dan inklusi sosial (GEDSI) dalam diklat yang diselenggarakan.

2. Pengembangan SDM Transportasi yang Profesional

dengan strategi :

- a. Pemenuhan tenaga pendidik, kependidikan, dan ASN Transportasi yang profesional dan berkarakter;
- b. Pelaksanaan pembelajaran dari praktisi/ dosen Perguruan Tinggi dan industri dari dalam maupun luar negeri;
- c. Pelaksanaan magang industri dan stakeholder bagi ASN Struktural dan Fungsional serta taruna baik di dalam maupun luar negeri;
- d. Implementasi kurikulum berbasis karakter Pancasila, Kewarganegaraan Bela Negara dan pendidikan Anti Korupsi;
- e. Implementasi kurikulum yang bersifat humanis dan adaptif terhadap prinsip inklusi sosial (GEDSI)
- f. Pelaksanaan diklat Pembangunan Karakter SDM transportasi;
- g. Pelaksanaan program *Leadership Training*;
- h. Pelaksanaan Manajemen Talenta (*Talent Pooling*);
- i. Pelaksanaan diklat peningkatan kompetensi (manajerial, teknis dan fungsional) ASN;
- j. Pelaksanaan program Beasiswa Rintisan Gelar dan Double Degree.

3. Penyediaan Sarana Prasarana Diklat yang Berkelanjutan

dengan strategi :

- a. Pemenuhan modernisasi sarana dan prasarana diklat beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi, transformasi digital, *artificial Intelligence*, dan transportasi hijau;
- b. Pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam proses transportasi logistik dan *supply chain* (rantai pasok);
- c. Implementasi manajemen aset berbasis pada optimalisasi laboratorium/simulator/ kelas/Kapal latih, pemanfaatan bangunan/ gedung dan tanah/lahan;
- d. Peningkatan layanan akademik dan pembelajaran berbasis teknologi informasi, *blended learning*, *virtual reality* dan *smart class*;
- e. Pemenuhan bahan ajar, modul belajar mandiri berbasis teknologi informasi;
- f. Peningkatan kapasitas perpustakaan digital (E-Library), penambahan jumlah E-Book, dan layanan jurnal nasional dan internasional;
- g. Pengembangan Kapal latih dan Pesawat latih Seaplane beradaptasi pada kebutuhan industri.

4. Penyesuaian Kelembagaan Diklat yang Adaptif dan Terintegrasi

dengan strategi :

- a. Pembaharuan kurikulum dan silabus beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi, transformasi digital, artificial intelligence, dan transportasi hijau, link-match dengan kebutuhan Industri-dunia kerja (IDUKA);
- b. Penerapan materi kurikulum yang berorientasi pada Society 5.0 meliputi: Big Data and Data Science, Intelligent Transport System, Artificial Intelligent, Electric Vehicle, Autonomous Vehicle, Multimodal and Integrated Transport System, Internet of Things, Green Transportation;
- c. Penerapan Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- d. Penerapan standarisasi kompetensi Internasional;
- e. Penguatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
- f. Peningkatan akreditasi lembaga diklat dan program studi serta revitalisasi prodi berbasis kebutuhan industri;
- g. Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM);
- h. Pengembangan prodi S2 Terapan;
- i. Penguatan penjaminan mutu diklat melalui Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Satuan Pengawas Internal (SPI).
- j. Penerapan Knowledge Management System menuju Corporate University

- k. Penguatan kerangka regulasi pemenuhan dan peningkatan kualitas SDM bidang Transportasi.
- l. Pemenuhan Lembaga Pendidikan yang mengedepankan pembentukan karakter religius, bermoral, sehat, cerdas, dan kreatif, kerja keras, disiplin dan tertib, mandiri dan bermanfaat.

5. Penguatan Kerjasama Pentahelix

dengan strategi :

- a. Peningkatan kerja sama dalam rangka pengembangan diklat;
- b. Peningkatan kerja sama dalam rangka pemanfaatan utilisasi aset;
- c. Peningkatan kerja sama dalam rangka penyerapan lulusan;
- d. Peningkatan kerja sama dalam rangka praktek magang dan pertukaran pelajar luar negeri;
- e. Peningkatan kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas tenaga pendidik;
- f. Peningkatan kerja sama dalam penelitian terapan;
- g. Peningkatan kerja sama dalam sharing knowledge;
- h. Peningkatan kolaborasi dan kerja sama pelaksanaan diklat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, industri dan stakeholder terkait;
- i. Peningkatan kerjasama dalam program sosialisasi dan branding perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- j. Peningkatan kerja sama dalam meningkatkan visibilitas perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui pemasaran terintegrasi.

Dengan arah kebijakan dan strategi tersebut, BPSDMP diharapkan mampu berkontribusi secara signifikan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Perhubungan dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2025–2029, sekaligus menjadi fondasi penguatan kualitas SDM transportasi nasional dalam jangka panjang menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

3.5. ARAH KEBIJAKAN PUSAT PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan dan strategi pembangunan merupakan pedoman substantif yang menetapkan fokus, prioritas, serta pendekatan utama dalam penyelenggaraan pembangunan selama periode perencanaan lima tahunan. Arah kebijakan berfungsi sebagai penentu orientasi pembangunan yang menjawab isu strategis dan tantangan lingkungan strategis, sedangkan strategi pembangunan merupakan langkah-langkah operasional yang disusun secara sistematis untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut ke dalam program, kegiatan, dan target kinerja yang terukur.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut memegang peran kunci dalam menyiapkan SDM perhubungan laut yang mampu mendukung konektivitas antarpulau, layanan angkutan laut perintis, dan integrasi sistem transportasi nasional. SDM perhubungan laut diarahkan memiliki kompetensi navigasi perairan kepulauan, keselamatan pelayaran, pelayanan pelabuhan skala kecil dan menengah, serta pemahaman karakteristik sosial-ekonomi masyarakat kepulauan. Penguatan SDM di wilayah kepulauan menjadi fondasi penting bagi penguatan persatuan wilayah dan pembangunan berbasis maritim

Dengan penajaman peran tersebut, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut secara fungsional menjadi instrumen kunci dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kewilayahan RPJMN 2025–2029. Pengembangan SDM perhubungan laut tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sektoral, tetapi juga sebagai pengungkit keberhasilan pembangunan kewilayahan yang terintegrasi, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan dan strategi Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut (PPSDMPL) Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai respon strategis terhadap dinamika pembangunan transportasi laut nasional dan global yang semakin kompleks. Perumusan arah kebijakan ini disarikan secara komprehensif dari hasil analisis SWOT PPSDMPL, evaluasi capaian kinerja pembangunan periode 2020–2024, serta identifikasi isu-isu strategis pengembangan SDM perhubungan laut sebagaimana tertuang dalam dokumen pendukung perencanaan

Hasil evaluasi kinerja periode 2020–2024 menunjukkan bahwa PPSDMPL telah mencapai berbagai kemajuan penting, antara lain dalam peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, perluasan akses layanan diklat, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Namun demikian, evaluasi tersebut juga mengidentifikasi sejumlah tantangan struktural yang masih perlu ditangani, seperti keterbatasan pemenuhan tenaga pendidik teknis kepelautan, kesenjangan kualitas antar satuan pendidikan, keterbatasan sarana-prasarana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi maritim, serta perlunya penguatan sistem pemantauan dan evaluasi lulusan secara berkelanjutan. Temuan evaluatif ini menjadi pijakan utama dalam penyusunan arah kebijakan periode 2025–2029 agar lebih fokus, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Selanjutnya, analisis SWOT PPSDMPL memberikan gambaran posisi strategis organisasi dalam menghadapi lingkungan internal dan eksternal. Kekuatan PPSDMPL terletak pada mandat kelembagaan yang kuat dalam pengembangan SDM perhubungan laut, jejaring satuan pendidikan dan pelatihan yang tersebar di berbagai wilayah, serta pengalaman panjang dalam penyelenggaraan diklat kepelautan. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan berupa keterbatasan fleksibilitas pendanaan, belum optimalnya integrasi riset dan inovasi dengan kebutuhan industri, serta tantangan adaptasi terhadap percepatan perubahan teknologi dan standar global. Dari sisi eksternal, peluang terbuka lebar melalui meningkatnya kebutuhan SDM maritim yang

kompeten, tuntutan global terhadap pelayaran berkelanjutan dan digital, serta peluang kerja sama nasional dan internasional. Namun, PPSDMPL juga menghadapi ancaman berupa persaingan global tenaga kerja maritim, percepatan perubahan regulasi internasional, serta disrupsi rantai pasok dan keamanan maritim. Sintesis SWOT ini mendorong perlunya arah kebijakan yang tidak hanya mempertahankan capaian, tetapi juga mentransformasikan PPSDMPL menjadi lembaga pengembangan SDM yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global.

Perumusan arah kebijakan dan strategi PPSDMPL 2025–2029 juga secara kuat dipengaruhi oleh isu-isu strategis pengembangan SDM perhubungan laut. Isu-isu tersebut mencakup dekarbonisasi dan regulasi lingkungan internasional, digitalisasi dan otomatisasi kapal, keamanan laut dan ancaman siber, disrupsi rantai pasok global, serta tuntutan standarisasi dan harmonisasi sertifikasi global. Isu-isu ini menegaskan bahwa pengembangan SDM perhubungan laut ke depan tidak lagi bersifat konvensional, tetapi harus berorientasi pada kompetensi masa depan, penguasaan teknologi, pemahaman regulasi internasional, serta kemampuan adaptasi terhadap risiko dan ketidakpastian global.

Berdasarkan keseluruhan landasan tersebut, arah kebijakan PPSDMPL Tahun 2025–2029 difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan SDM perhubungan laut secara inklusif dan berkelanjutan, penguatan kerja sama nasional dan internasional untuk meningkatkan relevansi dan daya saing lulusan, pengembangan program sertifikasi profesional yang diakui secara nasional dan internasional, serta penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan yang selaras dengan kebutuhan industri dan perkembangan regulasi global. Arah kebijakan ini didukung oleh strategi penguatan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja lulusan, penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu dan relevan dengan perkembangan teknologi maritim, serta pengembangan skema pendanaan inovatif, termasuk melalui optimalisasi pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Arah kebijakan ini diharapkan mampu menjadi pedoman operasional yang kokoh bagi PPSDMPL dalam mewujudkan SDM perhubungan laut yang kompeten, adaptif, berdaya saing global, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan maritim nasional. Arah kebijakan dan strategi PPSDMPL Tahun 2025–2029 yang merupakan hasil sintesis yang terintegrasi antara pembelajaran kinerja masa lalu, analisis kondisi internal dan eksternal organisasi, serta antisipasi terhadap isu-isu strategis pengembangan transportasi laut dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan PPSDMPL Tahun 2025-2029

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan Laut	Memperluas akses pendidikan dan pelatihan di wilayah terpencil, terluar, dan kepulauan melalui pengembangan

No.	Arah Kebijakan	Strategi
		pendidikan jarak jauh serta pelatihan berbasis komunitas maritim. • Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan instruktur pada bidang teknis kepelautan sesuai standar minimal penyelenggaraan perguruan tinggi dan lembaga diklat. • Mengintegrasikan kebijakan penguatan <i>Science, Technology, Engineering, and Mathematics</i> (STEM) dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan perhubungan laut guna meningkatkan relevansi dan daya saing lulusan.
2.	Penguatan kerja sama nasional dan internasional	• Mengembangkan kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan dan pelatihan maritim nasional dan internasional melalui program pertukaran peserta didik, pelatihan bersama, serta riset kolaboratif. • Meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka memperluas penyerapan lulusan dan meningkatkan kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.
3.	Pengembangan program sertifikasi profesional	• Menggagas dan/ atau memperkuat lembaga sertifikasi profesi di bidang perhubungan laut. • Menyelenggarakan program sertifikasi yang diakui secara nasional dan internasional untuk meningkatkan nilai tambah, profesionalisme, dan daya saing lulusan di tingkat global.
4.	Peningkatan program pelatihan berkelanjutan bagi lulusan	• Menyelenggarakan program pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi lulusan melalui seminar, workshop, dan kursus singkat. • Memutakhirkan materi dan metode pelatihan sesuai dengan perkembangan regulasi nasional dan internasional serta kebutuhan industri maritim.
5.	Penyediaan Sumber Daya Pendidikan dan Pelatihan yang Berkualitas dan Berkelanjutan	• Menjamin ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang memenuhi standar mutu, efektif, dan relevan dengan perkembangan teknologi maritim.

No.	Arah Kebijakan	Strategi
		Mengembangkan skema pembiayaan kreatif (creative financing) dalam mendukung kebutuhan anggaran pendidikan dan pelatihan, antara lain melalui optimalisasi Unit Usaha Badan Layanan Umum (BLU).
6.	Penguatan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Lulusan	- Menyiapkan dan mengimplementasikan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja lulusan secara terintegrasi dan berkelanjutan. - Memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai dasar perbaikan kurikulum, metode pembelajaran, serta peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PPSDMPL.

3.6. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi Rencana Strategis Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut (PPSDMPL) Tahun 2025–2029 disusun sebagai instrumen kebijakan yang menjamin keterpaduan antara arah pembangunan nasional, kebijakan pengembangan SDM transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, serta kebutuhan pengembangan SDM perhubungan laut yang spesifik dan berorientasi masa depan. Sebagai unit kerja eselon II di bawah koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) selaku unit kerja eselon I, PPSDMPL berperan sebagai pelaksana kebijakan pengembangan SDM perhubungan laut yang bersifat teknis, operasional, dan aplikatif. Oleh karena itu, kerangka regulasi PPSDMPL harus disusun secara hierarkis dan konsisten dengan kerangka regulasi Renstra BPSDMP Tahun 2025–2029, sekaligus mampu menjabarkan kebijakan makro pengembangan SDM transportasi ke dalam konteks subsektor kemaritiman.

Dalam kerangka tersebut, penyusunan regulasi PPSDMPL berpedoman pada prinsip keselarasan dengan peraturan perundang-undangan nasional, kebijakan sektoral perhubungan, serta arah pembangunan jangka menengah nasional. Kerangka regulasi ini diarahkan untuk bersifat fungsional dan operasional, sehingga tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga menjadi panduan implementatif dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan kompetensi, sertifikasi profesi, serta penguatan tata kelola kelembagaan PPSDMPL. Selain itu, regulasi yang disusun harus adaptif dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis sektor maritim, termasuk perkembangan teknologi pelayaran, tuntutan keselamatan dan keamanan laut, digitalisasi sistem transportasi, dekarbonisasi, serta harmonisasi standar kompetensi dan sertifikasi global.

Secara sistem perencanaan, kerangka regulasi PPSDMPL ditempatkan sebagai regulasi teknis dan operasional yang berfungsi menjembatani kebijakan strategis BPSDMP dengan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan SDM perhubungan laut di tingkat satuan pendidikan dan pelatihan. Kerangka regulasi ini juga menjadi instrumen penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan di bawah koordinasi PPSDMPL, termasuk dalam mendukung penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri maritim, serta penguatan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja lulusan secara berkelanjutan.

Kerangka regulasi PPSDMPL Tahun 2025–2029 tidak hanya berfungsi sebagai turunan kebijakan dari Renstra BPSDMP, tetapi juga sebagai alat strategis untuk memastikan bahwa arah kebijakan PPSDMPL dapat diimplementasikan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya SDM perhubungan laut yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing global.

Kerangka regulasi dan urgensi regulasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tercantum pada **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2. Kerangka Regulasi dan Urgensi Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan (Keterkaitan dengan Arah Kebijakan PPSDMPL)	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Waktu
1	Revisi/penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM Perhubungan Laut	Menjamin standar mutu, relevansi kurikulum, dan keselarasan dengan kebutuhan industri maritim serta regulasi nasional dan internasional	BPSDMP	PPSDMPL, DJPL, Ditjen lain	2026–2027
2	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kompetensi SDM Perhubungan Laut	Menjadi dasar pengembangan kurikulum, pelatihan, dan sertifikasi profesi maritim yang berdaya saing global	BPSDMP	PPSDMPL, DJPL, BNSP, Industri	2027
3	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi dan Akreditasi Kompetensi SDM Perhubungan Laut	Mendukung penguatan LSP sektor pelayaran serta pengakuan sertifikasi nasional dan internasional	BPSDMP	PPSDMPL, BNSP, Lembaga Akreditasi	2027–2028
4	Peraturan / Keputusan Kepala BPSDMP tentang Implementasi <i>Corporate University</i> Kemenhub pada Sub Sektor Perhubungan Laut	Menjadikan strategi organisasi sebagai basis pembelajaran dan pengembangan SDM maritim	BPSDMP	PPSDMPL, LAN, KemenPANRB	2026
5	Peraturan Kepala BPSDMP / Keputusan Kepala BPSDMP tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Lulusan Diklat Transportasi Laut	Menjamin keberlanjutan peningkatan kualitas lulusan dan keterkaitan dengan kebutuhan pasar kerja maritim	BPSDMP	PPSDMPL, UPT Diklat Laut	2026
6	Peraturan Kepala BPSDMP tentang Penyelenggaraan Pelatihan Berkelanjutan (<i>Continuous Professional Development</i>) SDM Perhubungan Laut	Merespons dinamika teknologi, keselamatan, dan regulasi global pelayaran	BPSDMP	PPSDMPL, Industri Maritim	2026–2027

No	Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan (Keterkaitan dengan Arah Kebijakan PPSDMPL)	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Waktu
7	Keputusan Menteri/Peraturan Menteri terkait Penguatan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Maritim Nasional dan Internasional	Memperluas jejaring, pertukaran, dan pengakuan kompetensi lulusan PPSDMPL	Kementerian Perhubungan	BPSDMP, PPSDMPL, Mitra Internasional	2026–2029
8	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengelolaan BLU Pendidikan dan Pelatihan Transportasi	Mendukung skema pembiayaan berkelanjutan dan creative financing satuan pendidikan di bawah PPSDMPL	Kementerian Perhubungan	BPSDMP, PPSDMPL, Kemenkeu	2027

sumber : data diolah

3.7. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut (PPSDMPL) Tahun 2025–2029 disusun sebagai bagian integral dari kerangka kelembagaan Kementerian Perhubungan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP), dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, dan proses bisnis kementerian. Penyusunan kerangka kelembagaan ini dimaksudkan untuk memastikan keselarasan antara mandat kelembagaan PPSDMPL dengan arah kebijakan pembangunan SDM transportasi nasional serta agenda pembangunan jangka menengah nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan, pengembangan sumber daya manusia transportasi merupakan salah satu fungsi utama Kementerian Perhubungan dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang transportasi. Fungsi tersebut dilaksanakan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) sebagai unsur pendukung yang berada di tingkat eselon I. Dalam struktur kelembagaan tersebut, PPSDMPL ditetapkan sebagai unit kerja eselon II di bawah BPSDMP yang secara khusus menyelenggarakan pengembangan SDM di bidang perhubungan laut

Sejalan dengan kerangka kelembagaan BPSDMP Tahun 2025–2029, BPSDMP terdiri atas satu Sekretariat Badan dan empat pusat pengembangan SDM, yaitu Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat, Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, dan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara. Dalam kerangka tersebut, PPSDMPL memiliki peran strategis sebagai pusat pengembangan SDM sektoral yang bertanggung jawab dalam peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan daya saing SDM perhubungan laut, baik aparatur maupun non-aparatur, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan transportasi laut nasional dan standar internasional di bidang kemaritiman

Kerangka organisasi dan tata kerja PPSDMPL disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Sebagai unit kerja eselon II, PPSDMPL melaksanakan fungsi substantif pengembangan SDM perhubungan laut dengan didukung oleh unsur pimpinan, unsur administrasi, unsur pelaksana teknis pendidikan dan pelatihan, serta kelompok jabatan fungsional. Penataan organisasi ini diarahkan untuk memperkuat peran jabatan fungsional, meningkatkan efisiensi struktur, serta menyesuaikan organisasi dengan beban kerja dan kebutuhan layanan pengembangan SDM yang semakin kompleks dan dinamis

Dalam pelaksanaannya, kerangka kelembagaan PPSDMPL juga diselaraskan dengan proses bisnis Kementerian Perhubungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2024 tentang Peta Proses, Peta Subproses,

dan Peta Relasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam peta proses tersebut, pengembangan SDM ditempatkan sebagai proses pendukung strategis yang menopang seluruh proses utama penyelenggaraan transportasi. Oleh karena itu, PPSDMPL berperan sebagai simpul kelembagaan yang memastikan keterpaduan antara kebijakan transportasi laut, kebutuhan kompetensi SDM, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada hasil dan keberlanjutan

Dalam periode Renstra 2025–2029, kerangka kelembagaan PPSDMPL diarahkan untuk semakin memperkuat posisinya sebagai pusat unggulan (*center of excellence*) pengembangan SDM perhubungan laut, meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan unit kerja lain di lingkungan Kementerian Perhubungan, serta mendorong transformasi pengembangan SDM yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, regulasi, dan kebutuhan industri maritim. Dengan kerangka kelembagaan yang selaras, efektif, dan akuntabel, PPSDMPL diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan SDM transportasi nasional, khususnya di sektor perhubungan laut, selama periode Tahun 2025–2029.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan target kinerja PPSDMPL Tahun 2025–2029, diperlukan penguatan kelembagaan yang tidak semata-mata berorientasi pada penambahan struktur formal, tetapi lebih pada penguatan fungsi strategis, tata kelola, dan kapasitas organisasi. Penguatan kelembagaan tersebut diarahkan untuk menjawab tantangan pengembangan SDM perhubungan laut yang semakin kompleks, dinamis, dan berorientasi global.

Pertama, diperlukan penguatan fungsi perencanaan strategis dan pengendalian kinerja pengembangan SDM perhubungan laut. Fungsi ini menjadi krusial untuk memastikan keterkaitan yang kuat antara arah kebijakan nasional, kebutuhan sektor transportasi laut, rencana pengembangan kompetensi, serta capaian indikator kinerja PPSDMPL. Penguatan fungsi ini dapat diwadahi melalui penajaman peran unit yang menangani perencanaan dan evaluasi, termasuk penguatan kapasitas analisis kebutuhan SDM (*training needs analysis*), manajemen kinerja berbasis outcome, serta pelaporan kinerja yang terintegrasi dengan sistem akuntabilitas BPSDMP dan Kementerian Perhubungan.

Kedua, diperlukan penguatan fungsi penjaminan mutu dan standardisasi pendidikan dan pelatihan perhubungan laut. Dalam periode 2025–2029, tuntutan terhadap kualitas lulusan, kesesuaian dengan standar internasional (IMO, STCW, dan regulasi maritim global), serta pengakuan kompetensi oleh pemangku kepentingan semakin meningkat. Oleh karena itu, fungsi penjaminan mutu perlu diperkuat untuk mencakup pengembangan standar kurikulum, evaluasi penyelenggaraan diklat, pengendalian mutu instruktur dan tenaga pengajar, serta pemantauan ketercapaian kompetensi lulusan. Fungsi ini dapat diperkuat melalui optimalisasi peran jabatan fungsional dan mekanisme kerja lintas unit tanpa harus membentuk struktur baru yang rigid.

Ketiga, PPSDMPL perlu memperkuat fungsi kerja sama dan kemitraan strategis bidang pengembangan SDM perhubungan laut. Pengembangan SDM sektor maritim tidak dapat dilakukan secara eksklusif oleh pemerintah, melainkan membutuhkan sinergi dengan dunia usaha, industri pelayaran, pelabuhan, lembaga pendidikan, asosiasi profesi, serta mitra internasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi yang secara khusus mengelola kerja sama, pemanfaatan sumber daya bersama (co-creation), serta pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan industri. Penguatan fungsi ini menjadi kunci dalam mendukung relevansi program, peningkatan serapan lulusan, dan pencapaian target kinerja berbasis outcome.

Keempat, dalam mendukung transformasi digital dan modernisasi pengembangan SDM, PPSDMPL perlu memperkuat fungsi pengelolaan data, sistem informasi, dan pembelajaran berbasis teknologi. Fungsi ini mencakup pengelolaan data peserta dan lulusan, sistem informasi pendidikan dan pelatihan, pengembangan pembelajaran jarak jauh (blended learning), serta pemanfaatan teknologi simulasi dan digitalisasi proses pembelajaran. Penguatan fungsi ini akan mendukung pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based policy) dan peningkatan efisiensi serta jangkauan layanan pengembangan SDM perhubungan laut.

Kelima, PPSDMPL perlu memperkuat fungsi pengembangan dan pengelolaan jabatan fungsional di bidang pengembangan SDM perhubungan laut. Sebagai organisasi yang berbasis keahlian, keberhasilan PPSDMPL sangat ditentukan oleh kualitas dan kinerja jabatan fungsional, baik widyaiswara, instruktur, maupun jabatan fungsional lain yang relevan. Oleh karena itu, penguatan fungsi pembinaan, pengembangan kompetensi, dan manajemen kinerja jabatan fungsional menjadi prasyarat utama dalam mendukung keberlanjutan kelembagaan dan pencapaian target kinerja jangka menengah.

Melalui penguatan dan penajaman fungsi-fungsi kelembagaan tersebut, PPSDMPL diharapkan mampu menjalankan perannya secara lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi hasil dalam periode Renstra 2025–2029. Pendekatan penguatan fungsi ini juga memastikan bahwa pengembangan kelembagaan PPSDMPL tetap selaras dengan kerangka organisasi Kementerian Perhubungan dan BPSDMP, sekaligus responsif terhadap tantangan dan kebutuhan strategis pengembangan SDM perhubungan laut di tingkat nasional dan global.

Tabel 3.3. Kebutuhan Penguatan Kelembagaan PPSDMPL Tahun 2025-2029

No.	Isu Kelembagaan	Kebutuhan Penguatan Kelembagaan	Respon Kelembagaan
1.	Perencanaan dan pengendalian pengembangan SDM perhubungan laut belum sepenuhnya berbasis	Diperlukan penguatan fungsi perencanaan strategis, analisis kebutuhan SDM, serta	Penajaman fungsi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pengembangan SDM perhubungan laut berbasis

No.	Isu Kelembagaan	Kebutuhan Penguatan Kelembagaan	Respon Kelembagaan
	kebutuhan strategis dan outcome	pengendalian dan evaluasi kinerja berbasis hasil	kebutuhan sektor, serta integrasi dengan sistem akuntabilitas kinerja BPSDMP dan Kementerian Perhubungan
2.	Mutu dan standar pendidikan dan pelatihan perhubungan laut belum sepenuhnya terjaga secara konsisten dan terakreditasi	Diperlukan penguatan fungsi penjaminan mutu dan standarisasi diklat perhubungan laut	Penguatan mekanisme penjaminan mutu, pengendalian kurikulum, kualitas pengajar, dan kesesuaian dengan standar nasional dan internasional (termasuk IMO dan STCW)
3.	Keterbatasan sinergi dan kemitraan dengan industri maritim dan lembaga pendidikan	Diperlukan penguatan fungsi kerja sama dan kemitraan strategis pengembangan SDM perhubungan laut	Penguatan pengelolaan kerja sama dengan dunia usaha, industri maritim, asosiasi profesi, dan mitra internasional untuk meningkatkan relevansi dan daya serap lulusan
4.	Pemanfaatan data dan teknologi dalam pengembangan SDM masih belum optimal	Diperlukan penguatan fungsi transformasi digital dan sistem informasi pengembangan SDM	Penguatan pengelolaan data, sistem informasi diklat, serta penerapan pembelajaran berbasis teknologi dan pembelajaran jarak jauh
5.	Kinerja dan kapasitas jabatan fungsional sebagai penggerak utama pengembangan SDM belum sepenuhnya optimal	Diperlukan penguatan fungsi pembinaan dan manajemen jabatan fungsional	Penguatan pembinaan, pengembangan kompetensi, dan manajemen kinerja jabatan fungsional di lingkungan PPSDMPL
6.	Tata kelola dan koordinasi internal dalam penyelenggaraan fungsi PPSDMPL masih memerlukan penyempurnaan	Diperlukan penguatan tata kelola dan mekanisme koordinasi internal	Penataan dan penyempurnaan mekanisme kerja, koordinasi lintas fungsi, dan integrasi proses bisnis PPSDMPL

sumber : data diolah

3.8. MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko dalam Rencana Strategis Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut (PPSDMPL) Tahun 2025–2029 disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kinerja organisasi untuk menjamin pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) secara efektif, efisien, dan akuntabel. Penerapan manajemen risiko ini berpedoman pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yang

mengamanatkan bahwa setiap unit kerja wajib menerapkan manajemen risiko secara sistematis dan terintegrasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Manajemen risiko dalam Renstra PPSDMPL Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk meningkatkan probabilitas pencapaian target kinerja, memperkuat manajemen yang proaktif dan antisipatif, serta menyediakan dasar yang andal dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program dan kegiatan. Selain itu, penerapan manajemen risiko diarahkan untuk meningkatkan efektivitas alokasi sumber daya, menjamin kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjaga keberlanjutan kinerja dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan pengembangan SDM perhubungan laut. Manajemen risiko difokuskan secara langsung pada risiko-risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian IKK pada setiap sasaran kegiatan strategis. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan risiko dilakukan dengan mengaitkan secara eksplisit antara sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan potensi risiko yang melekat pada pelaksanaannya. Pendekatan ini memastikan bahwa manajemen risiko tidak bersifat generik, melainkan berbasis kinerja (*performance-based risk management*).

Manajemen Risiko pada Renstra Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut Tahun 2025–2029 menyajikan pemetaan risiko utama yang secara langsung melekat pada pencapaian setiap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) PPSDMPL. Pemetaan tersebut memuat keterkaitan yang jelas antara IKK, identifikasi risiko, kategori risiko, dan langkah mitigasi yang dirancang untuk menjaga keberlangsungan pencapaian target kinerja, mulai dari peningkatan kompetensi ASN, perumusan kebijakan pengembangan SDM transportasi laut, peningkatan kualitas evaluasi dan kerja sama diklat, penguatan profesionalisme ASN, hingga perwujudan birokrasi yang akuntabel dan berorientasi layanan. Melalui penyajian berbasis IKK tersebut, pemetaan manajemen risiko berfungsi sebagai instrumen pengendalian kinerja Renstra PPSDMPL, yang memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan dilaksanakan dalam tingkat risiko yang dapat diterima sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan, serta mendukung pencapaian sasaran strategis secara konsisten dan terukur.

Tabel 3.4. Manajemen Resiko pada masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan

NO	Identifikasi Risiko	Kategori Risiko	Mitigasi yang Ada
SK 02. Meningkatnya Kompetensi ASN Transportasi			
IKK 06 Tingkat Pemenuhan ASN Transportasi Program Pembentukan			
1.	Jumlah lulusan Diklat Pembentukan Pola Pembibitan tidak mencapai target tahunan	Risiko Operasional	1) Penetapan kuota dan daya tampung lembaga diklat sejak awal tahun;

NO	Identifikasi Risiko	Kategori Risiko	Mitigasi yang Ada
			2) Monitoring realisasi penerimaan taruna/taruni secara triwulanan
2.	Tingkat putus studi (<i>drop out</i>) peserta Pola Pembibitan	Risiko Operasional	1) Pembinaan akademik dan mental taruna; 2) Sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) berbasis nilai dan kehadiran
3.	Ketidaksesuaian jadwal akademik dengan target kelulusan tahunan	Risiko Kepatuhan	1) Sinkronisasi kalender akademik dengan target output Renstra; 2) Pengendalian oleh BPSDMP melalui rapat kinerja periodik
IKK 07. Tingkat Pemenuhan ASN Transportasi Program Pelatihan			
1.	Ketidaksesuaian kompetensi peserta pelatihan dengan pelatihan yang dilaksanakan	Risiko Operasional	1) Penerapan SOP seleksi peserta pelatihan; 2) Melibatkan pihak terkait dalam proses verifikasi calon peserta.
SK 03. Meningkatnya Kompetensi SDM Transportasi			
IKK 08 Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Program Pembentukan			
1.	Rendahnya minat peserta mandiri sehingga target lulusan tidak tercapai	Risiko Strategis	Penguatan promosi dan kerja sama industri pelayaran, kepelabuhanan dan logistik
2.	Peserta tidak menyelesaikan diklat tepat waktu	Risiko Operasional	Penguatan sistem evaluasi dan remedial berbasis kurikulum
3.	Keterbatasan kapasitas lembaga pendidikan	Risiko Operasional	Optimalisasi daya tampung dan pembukaan kelas paralel di sekolah tinggi dan BP3IP
IKK 09 Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Program Pelatihan			
1.	Realisasi peserta pelatihan lebih rendah dari target	Risiko Operasional	Penyusunan kalender pelatihan nasional dan sosialisasi ke pemda, industri, dan masyarakat
2.	Pembatalan atau penundaan kelas pelatihan	Risiko Operasional	Menyusun daftar kelas cadangan dan pelatihan daring/hybrid
3.	Data lulusan tidak tercatat dengan baik	Risiko Kepatuhan	Integrasi data lulusan melalui sistem informasi diklat BPSDMP
SK 05. Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat/Laut/Udara			
IKK 15 Tingkat Kualitas Layanan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara			
1.	Responden survei tidak mewakili populasi layanan	Risiko Kepatuhan	Penentuan sampel sesuai metode Morgan & Krejcie
2.	Pelaksanaan survei tidak konsisten antar UPT	Risiko Operasional	Standardisasi instrumen dan SOP survei
3.	Nilai SKM rendah karena kualitas layanan tidak merata	Risiko Reputasi	Tindak lanjut hasil survei dalam rencana perbaikan layanan
IKK 16 Persentase Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pelatihan dengan Stakeholder Transportasi dan Pendidikan			
1.	MoU/PKS tidak ditindaklanjuti menjadi kegiatan	Risiko Operasional	Penyusunan rencana aksi dan timeline pelaksanaan kerja sama
2.	Target kerja sama baru tidak tercapai	Risiko Strategis	Identifikasi calon mitra prioritas dan promosi aktif

NO	Identifikasi Risiko	Kategori Risiko	Mitigasi yang Ada
3.	Data kerja sama tidak terdokumentasi	Risiko Kepatuhan	Pengelolaan basis data kerja sama terintegrasi di PPSDMPL
SK 6. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan SDM yang Menunjang Kebijakan Sektor Transportasi Laut			
IKK 17 Indeks Kebijakan Pengembangan SDM Transportasi Laut			
1.	Keterbatasan sumber daya dalam proses pemetaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan	Risiko Operasional	Pemanfaatan Sumber Daya yang Ada Secara Optimal;
2.	Kesulitan penyusunan kurikulum yang fleksibel	Risiko Kepatuhan	Merevisi kurikulum secara berkala dengan melibatkan stakeholder;
3.	Pengajar belum memiliki kompetensi sesuai dengan standar kurikulum pelatihan baru	Risiko Operasional	1) Memanfaatkan program pelatihan dari Luar Negeri yang sesuai dengan kompetensi maritim terbaru 2) Mengadakan program magang atau kerjasama industri untuk pengajar; 3) Mengadakan workshop atau pelatihan intensif bagi pengajar tentang kurikulum pelatihan baru.
4.	Keterbatasan tenaga pengajar yang ahli/ experties pada materi tertentu	Risiko Operasional	Menggunakan tenaga pengajar dari industri atau praktisi;
SK 7. Meningkatnya kualitas evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan BPSDMP			
IKK 18. Tingkat Pemenuhan Evaluasi dan Sistem Informasi Diklat Transportasi			
1.	Keterbatasan kualitas dan kuantitas pengajar	Risiko Reputasi	1) Pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal; 2) Peningkatan kompetensi pengajar secara berkala sesuai kebutuhan.
2.	Fasilitas pembelajaran yang dimiliki diklat belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan	Risiko Operasional	Memberikan rekomendasi mengenai standar fasilitas pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan ketentuan.
IKK 19. Persentase Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN Perhubungan dengan stakeholder Transportasi dan Pendidikan			
1	Keterlambatan pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam (MoU/ Nota Kesepahaman)	Risiko Operasional	1) Menyusun timeline kerja sama yang lebih realistis 2) Meningkatkan koordinasi dengan pertemuan berkala baik secara daring maupun luring
SK 9. Terwujudnya Organisasi yang Agile dan SDM Unggul			
IKK 22. Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP			
1.	Tidak tercapainya kewajiban pengembangan kompetensi PNS minimal 20 JP per tahun	Risiko Operasional	1) Monitoring pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS setiap bulan; 2) Mensosialisasikan kegiatan pelatihan berbasis online di berbagai platform pelatihan
SK 10. Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel dan Berorientasi pada layanan prima			

NO	Identifikasi Risiko	Kategori Risiko	Mitigasi yang Ada
IKK 24. Persentase Pemenuhan Akuntabilitas di Lingkungan BPSDMP			
1.	Potensi penyebarluasan informasi publik yang tidak sesuai dengan target audience	Risiko Reputasi	1) Membuat surat edaran terkait dukungan publikasi dari tiap bidang teknis yang ada di PPSMDPL; 2) Melakukan <i>follow up</i> ke tiap bidang di PPSDMPL terkait data yang diminta; 3) Membuat surat tugas tiap bidang sebagai sumber informasi yang dibutuhkan humas PPSDMPL.
IKK 25. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)			
1.	Realisasi PNBPN tidak mencapai target yang ditentukan	Risiko Operasioal	1) Melakukan sosialisasi terkait diklat yang akan dilaksanakan; 2) Melakukan input dan pembuatan kode billing tepat waktu
IKK 26 Nilai SAKIP BPSDMP			
1.	Proses penyusunan atau reuiu Renstra mengalami keterlambatan	Risiko Operasional	Menyusun <i>timeline</i> yang realistis dan memonitor progres secara berkala.
2.	Keterlambatan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja	Risiko Operasional	Melakukan rapat koordinasi berkala.

sumber : data diolah

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1.TARGET KINERJA BPSDM PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

Dengan memperhatikan Sasaran Strategis dari Kementerian Perhubungan yang menjadi tanggung jawab Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2025-2029, target kinerja dari BPSDM Perhubungan Tahun 2025-2029 dirumuskan melalui sasaran program BPSDM Perhubungan Tahun 2025-2029 dengan indikator kinerja program sebagaimana dijabarkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Indikator Kinerja Program BPSDMP Tahun 2025-2029

Kode	Indikator Kinerja	Penjelasan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKP-1	Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten	Pemenuhan Sumber Daya Manusia dalam bidang Transportasi yang kompeten	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50
IKP-2	Indeks Kualitas Program dan Pelayanan	Peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan yang dihitung dengan menjumlahkan indeks yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Lingkungan BPSDMP.	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00
IKP-3	Indeks Penjaminan Mutu	Persentase penjaminan mutu yang dihitung berdasarkan jumlah kriteria Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP)	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00
IKP-4	Indeks Tata Kelola Lembaga BPSDMP	Persentase peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang dihitung berdasarkan kualitas Program dan Pelayanan.	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00

sumber : RENSTRA BPSDM Perhubungan 2025-2029

4.2. TARGET KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2025-2029

Target kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut (PPSDMPL) Tahun 2025–2029 disusun dalam kerangka perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (*performance based planning*) sebagai penjabaran operasional dari Indikator Kinerja Utama (IKU) PPSDMPL selaku unit kerja eselon II di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) sebagai unit kerja eselon I. Dalam struktur kelembagaan Kementerian Perhubungan, PPSDMPL memiliki mandat untuk menyelenggarakan fungsi teknis pengembangan SDM perhubungan laut melalui pelaksanaan kegiatan yang hasil dan capaiannya secara langsung mendukung pencapaian sasaran program dan IKU BPSDMP.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kinerja strategis yang menggambarkan tingkat keberhasilan unit organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi utamanya. IKU ditetapkan secara selektif dan terbatas pada indikator yang paling merepresentasikan hasil (*outcome*) dan/atau keluaran utama (*output* utama) yang menjadi tanggung jawab unit kerja, serta digunakan sebagai dasar penilaian kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi akuntabilitas kinerja instansi. Dengan demikian, IKU tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai instrumen pengarah (*driving indicators*) dalam pengambilan keputusan manajerial dan pengalokasian sumber daya.

Sejalan dengan prinsip cascading kinerja, IKU PPSDMPL merupakan turunan dari IKU BPSDMP pada level program, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Oleh karena itu, kinerja yang menjadi tanggung jawab PPSDMPL difokuskan pada ketercapaian target kinerja kegiatan yang bersifat strategis dan berdampak langsung terhadap capaian kinerja program BPSDMP. Setiap target kinerja yang ditetapkan sebagai IKU PPSDMPL mengandung implikasi bahwa unit kerja wajib memastikan: (1) kesesuaian perencanaan kegiatan dan alokasi anggaran dengan target yang ditetapkan; (2) efektivitas pelaksanaan kegiatan agar output dan outcome tercapai sesuai indikator; (3) ketersediaan data dan sistem pelaporan kinerja yang andal, tepat waktu, dan dapat diaudit; serta (4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan sebagai dasar perbaikan kinerja.

Target Kinerja PPSDMPL Tahun 2025–2029 selanjutnya menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja PPSDMPL selama periode renstra. Target kinerja tersebut menyajikan keterkaitan yang jelas antara kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, satuan ukur, serta target tahunan yang meningkat secara bertahap. Substansi target kinerja meliputi pemenuhan kompetensi SDM transportasi melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas layanan dan kerja sama dengan pemangku kepentingan, penguatan kebijakan dan evaluasi pengembangan SDM transportasi, serta peningkatan kualitas tata kelola organisasi, profesionalisme ASN, akuntabilitas, dan kinerja anggaran.

Dengan konstruksi tersebut, target kinerja PPSDMPL yang ditetapkan sebagai IKU berfungsi sebagai tolok ukur utama keberhasilan unit kerja dalam melaksanakan mandat pengembangan SDM perhubungan laut, sekaligus sebagai kontribusi nyata dan terukur terhadap pencapaian sasaran strategis dan IKU BPSDMP pada tingkat program sepanjang Tahun 2025–2029.

Terdapat 13 (tiga belas) target kinerja yang menjadi IKU dari PPSDMPL selama pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025-2029, yakni:

1. [IKK 06] Tingkat Pemenuhan ASN Transportasi Program Pembentukan;
2. [IKK 07] Tingkat Pemenuhan ASN Transportasi Program Pelatihan;
3. [IKK 08] Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Program Pembentukan;
4. [IKK 09] Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Program Pelatihan;
5. [IKK 15] Tingkat Kualitas Layanan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara;
6. [IKK 16] Persentase Kerjasama di bidang Pendidikan dan pelatihan dengan stakeholder transportasi dan pendidikan;
7. [IKK 17] Indeks Kebijakan Pengembangan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara;
8. [IKK 18] Tingkat Pemenuhan Evaluasi dan Sistem Informasi Diklat Transportasi;
9. [IKK 19] Persentase Kerja Sama di bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN Perhubungan dengan stakeholder Transportasi dan Pendidikan;
10. [IKK 22] Indeks Profesionalisme ASN;
11. [IKK 24] Persentase Pemenuhan Akuntabilitas di Lingkungan BPSDMP;
12. [IKK 25] Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA); dan
13. [IKK 26] Nilai SAKIP.

Tabel 4.2. Target Kinerja Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Meta Indikator
					2025	2026	2027	2028	2029	
1.	[3996] Pendidikan Transportasi	[SK 03] Meningkatnya Kompetensi SDM Transportasi	[IKK 08] Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Program Pembentukan	%	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00	(jumlah lulusan diklat pembentukan jalur non Pola Pembibitan pada tahun (n) / target lulusan diklat pembentukan jalur non Pola Pembibitan pada tahun (n)) x 100%
			IKK 09] Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Program Pelatihan	%	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00	(jumlah lulusan pelatihan pada tahun (n) / target lulusan pelatihan pada tahun (n)) x 100%
		[SK 05] Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat/Laut/Udara	[IKK 15] Tingkat Kualitas Layanan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara	nilai	3,05	3,10	3,15	3,20	3,25	Hasil survei terhadap stakeholder atau pengguna jasa layanan
			[IKK 16] Persentase Kerjasama di bidang Pendidikan dan pelatihan dengan stakeholder transportasi dan pendidikan	%	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	[(jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti pada tahun (n) / jumlah kerjasama yang berlaku pada tahun (n)) x 60%] + [(jumlah kerjasama yang disusun pada tahun (n) / target kerjasama yang disusun pada tahun (n)) x 40 %]
	[1975] Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi	[SK 02] Meningkatnya Kompetensi ASN Transportasi	[IKK 06] Tingkat Pemenuhan ASN Transportasi Program Pembentukan	%	100	100	100	100	100	(jumlah lulusan diklat pembentukan program Pola Pembibitan pada tahun (n) / target lulusan diklat pembentukan program Pola Pembibitan pada tahun (n)) x 100 %
			[IKK 07] Tingkat Pemenuhan ASN Transportasi Program Pelatihan	%	100	100	100	100	100	(jumlah lulusan program Pelatihan ASN pada tahun (n) / target lulusan program Pelatihan ASN pada tahun (n)) x 100 %

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Meta Indikator
					2025	2026	2027	2028	2029	
		[SK 06] Terwujudnya Kebijakan Pengembangan SDM yang Menunjang Kebijakan Sektor Transportasi Darat/Laut/Udara	[IKK 17] Indeks Kebijakan Pengembangan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara	%	100	100	100	100	100	(jumlah NSPK yang dihasilkan lembaga pada tahun (n) / target NSPK yang dihasilkan lembaga pada tahun (n)) x 100 %
		[SK 07] Meningkatnya kualitas evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan BPSDMP	[IKK 18] Tingkat Pemenuhan Evaluasi dan Sistem Informasi Diklat Transportasi	%	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	(jumlah diklat yang dinilai sangat baik pada tahun (n) / jumlah seluruh diklat yang dilaksanakan pada tahun (n)) x 100 %
			[IKK 19] Persentase Kerja Sama di bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN Perhubungan dengan stakeholder Transportasi dan Pendidikan	%	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	[(jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti pada tahun (n) / jumlah kerjasama yang berlaku pada tahun (n)) x 60%] + [(jumlah kerjasama yang disusun pada tahun (n) / target kerjasama yang disusun pada tahun (n)) x 40 %]
	[4626] Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi	[SK 09] Terwujudnya Organisasi yang Agile dan SDM Unggul	[IKK 22] Indeks Profesionalisme ASN	indeks	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	penilaian tingkat profesionalitas pegawai ASN berdasarkan 4 (empat) dimensi, yaitu dimensi Kualifikasi (25%) dari keseluruhan pengukuran, Kompetensi (40%) dari keseluruhan pengukuran dan Kinerja (30%) dari keseluruhan pengukuran serta Disiplin (5%) dari keseluruhan pengukuran.

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Meta Indikator
					2025	2026	2027	2028	2029	
	[4627] Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum SDM Transportasi	[SK 10] Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Berorientasi pada Layanan Prima	[IKK 24] Persentase Pemenuhan Akuntabilitas di Lingkungan BPSDMP	%	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	Persentase Pemenuhan Akuntabilitas : Realisasi 1 (unit yang diadakan) + Realisasi 2 (layanan yang dilaksanakan)
			[IKK 25] Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	nilai	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	$\Sigma(\text{revisi DIPA} \times 10\%) + (\text{deviasi halaman III DIPA} \times 10\%) + (\text{penyerapan anggaran} \times 20\%) + (\text{belanja kontraktual} \times 10\%) + (\text{penyelesaian tagihan} \times 10\%) + (\text{pengelolaan UP dan TUP} \times 10\%) + (\text{dispensasi SPM} \times 5\%) + (\text{capaian output} \times 25\%)$
			[IKK 26] Nilai SAKIP	nilai	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00	hasil penilaian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kemen PAN RB

sumber : RENSTRA BPSDMP 2025-2029 (data diolah)

4.3. KERANGKA PENDANAAN PUSAT PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2025-2029

4.3.1. Kebutuhan Anggaran dan Sumber Pendanaan

Kebutuhan anggaran Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut (PPSDMPL) Tahun 2025–2029 disusun secara terukur dan berbasis kinerja untuk mendukung pencapaian sasaran strategis serta target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan kebutuhan anggaran berlandaskan pada prinsip *money follows program* dan *value for money*, dengan menekankan keterkaitan yang jelas antara alokasi sumber daya dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang diharapkan.

Alokasi anggaran dirancang untuk membiayai seluruh rangkaian kegiatan pengembangan sumber daya manusia perhubungan laut, yang meliputi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sertifikasi dan peningkatan kompetensi SDM, pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran, penguatan kelembagaan dan tata kelola, serta dukungan manajemen dan operasional organisasi. Setiap kegiatan dirumuskan secara spesifik untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja kegiatan, sehingga penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara efektif dan efisien.

Kebutuhan anggaran PPSDMPL selama periode Renstra 2025–2029 juga memperhatikan proyeksi peningkatan target kinerja dari tahun ke tahun, dinamika kebijakan pembangunan nasional, serta arah prioritas pembangunan sektor transportasi laut. Dengan demikian, perencanaan anggaran tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rutin, tetapi juga diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas layanan, relevansi kompetensi lulusan, serta daya saing SDM perhubungan laut secara berkelanjutan.

Sumber pendanaan utama untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan PPSDMPL berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan APBN tersebut dialokasikan melalui pagu anggaran yang ditetapkan setiap tahun dan digunakan secara konsisten untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah direncanakan. Optimalisasi pemanfaatan APBN dilakukan melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, pengendalian pelaksanaan anggaran, serta evaluasi capaian kinerja secara berkala.

4.3.2. Alokasi Pembiayaan Program dan Kegiatan

Alokasi pembiayaan program dan kegiatan PPSDMPL Tahun 2025–2029 disusun untuk memastikan ketercapaian sasaran strategis dan target kinerja sebagaimana telah ditetapkan. Penyusunan alokasi pembiayaan menekankan keterkaitan antara sasaran program, sasaran kegiatan, target kinerja, serta indikasi pagu anggaran pada setiap tahun rencana.

Tabel 4.3. Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Target Kinerja dan Indikasi Pendanaan

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	TARGET					INDIKASI PENDANAAN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
PUSAT PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN LAUT							1,355,860,159	1,919,394,625	1,333,414,970	1,407,454,989	1,488,350,577	7,504,475,317
Sasaran Strategis: [SSp 5] Meningkatnya SDM Transportasi yang kompeten							973,813,763	1,275,840,214	815,913,899	871,639,568	933,815,577	4,871,023,018
Indikator Strategis: [IKSSp 5.1] Indeks Peningkatan SDM Transportasi							973,813,763	1,275,840,214	815,913,899	871,639,568	933,815,577	4,871,023,018
Program: [DL] Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							973,813,763	1,275,840,214	815,913,899	871,639,568	933,815,577	4,871,023,018
Prioritas Nasional							206,871,612	444,323,500	275,999,615	283,118,894	290,738,141	1,501,051,762
Sasaran Program: [SP 1] Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten							206,871,612	407,480,801	275,999,615	283,118,894	281,316,196	1,454,787,118
Indikator Program: [IKP 1] Indeks Peningkatan SDM Transportasi	Nilai	88.00	89.00	90.00	91.00	92.00	206,871,612	407,480,801	275,999,615	283,118,894	281,316,196	1,454,787,118
Kegiatan: [3996] Pendidikan Transportasi							206,871,612	407,480,801	275,999,615	283,118,894	281,316,196	1,454,787,118
Sasaran Kegiatan: [SK 03] Meningkatnya Kompetensi SDM Transportasi							206,871,612	407,480,801	275,999,615	283,118,894	281,316,196	1,454,787,118

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	TARGET					INDIKASI PENDANAAN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
Indikator Kegiatan: [IKK 08] Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Program Pembentukan	%	94.00	94.50	95.00	95.50	96.00	187,549,035	371,461,246	248,242,405	255,134,407	249,261,521	1,311,648,614
Indikator Kegiatan: [IKK 09] Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Program Pelatihan	%	94.00	94.50	95.00	95.50	96.00	19,322,577	36,019,555	27,757,210	27,984,487	32,054,675	143,138,504
Sasaran Program: [SP 2] Meningkatnya Kualitas Pengembangan Program Studi, Jenis Pelatihan, Pelayanan, Penelitian dan Penyerapan Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi							0	36,842,699	0	0	9,421,945	46,264,644
Indikator Program: [IKP 2] Indeks Kualitas Program dan Pelayanan	Nilai	80.00	80.50	81.00	81.50	82.00	0	36,842,699	0	0	9,421,945	46,264,644
Kegiatan: [3996] Pendidikan Transportasi							0	36,842,699	0	0	9,421,945	46,264,644
Sasaran Kegiatan: [SK 05] Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat/Laut/Udara							0	36,842,699	0	0	9,421,945	46,264,644
Indikator Kegiatan: [IKK 15] Tingkat Kualitas Layanan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara	Nilai	3.05	3.10	3.15	3.20	3.25	0	36,842,699	0	0	9,421,945	46,264,644

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	TARGET					INDIKASI PENDANAAN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
Prioritas Kementerian Perhubungan							766,942,151	831,516,714	539,914,284	588,520,674	643,077,436	3,369,971,256
Sasaran Program: [SP 1] Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten							719,498,367	587,134,334	408,910,961	429,328,026	467,851,332	2,612,723,017
Indikator Program: [IKP 1] Indeks Peningkatan SDM Transportasi	Nilai	88.00	89.00	90.00	91.00	92.00	719,498,367	587,134,334	408,910,961	429,328,026	467,851,332	2,612,723,017
Kegiatan: [1975] Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi							46,280,791	94,516,455	80,725,520	88,136,752	100,591,168	410,250,686
Sasaran Kegiatan: [SK 02] Meningkatnya Kompetensi ASN Transportasi							46,280,791	94,516,455	80,725,520	88,136,752	100,591,168	410,250,686
Indikator Kegiatan: [IKK 06] Tingkat Pemenuhan ASN Transportasi Program Pembentukan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	29,237,100	60,796,126	46,391,237	49,759,480	54,648,120	240,832,063
Indikator Kegiatan: [IKK 07] Tingkat Pemenuhan ASN Transportasi Program Pelatihan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	17,043,691	33,720,329	34,334,283	38,377,272	45,943,048	169,418,623
Kegiatan: [3996] Pendidikan Transportasi							673,217,576	492,617,879	328,185,441	341,191,274	367,260,164	2,202,472,331
Sasaran Kegiatan: [SK 03] Meningkatnya Kompetensi SDM Transportasi							673,217,576	492,617,879	328,185,441	341,191,274	367,260,164	2,202,472,331

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	TARGET					INDIKASI PENDANAAN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
Indikator Kegiatan: [IKK 08] Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Program Pembentukan	%	94.00	94.50	95.00	95.50	96.00	129,850	169,840	80,000	80,000	80,000	539,690
Indikator Kegiatan: [IKK 09] Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Program Pelatihan	%	94.00	94.50	95.00	95.50	96.00	673,087,726	492,448,039	328,105,441	341,111,274	367,180,164	2,201,932,641
Sasaran Program: [SP 2] Meningkatnya Kualitas Pengembangan Program Studi, Jenis Pelatihan, Pelayanan, Penelitian dan Penyerapan Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi							41,968,907	236,794,480	121,828,956	148,111,925	162,237,514	710,941,782
Indikator Program: [IKP 2] Indeks Kualitas Program dan Pelayanan	Nilai	80.00	80.50	81.00	81.50	82.00	41,968,907	236,794,480	121,828,956	148,111,925	162,237,514	710,941,782
Kegiatan: [3996] Pendidikan Transportasi							41,968,907	236,794,480	121,828,956	148,111,925	162,237,514	710,941,782
Sasaran Kegiatan: [SK 05] Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat/Laut/Udara							41,968,907	236,794,480	121,828,956	148,111,925	162,237,514	710,941,782
Indikator Kegiatan: [IKK 15] Tingkat Kualitas Layanan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara	Nilai	3.05	3.10	3.15	3.20	3.25	39,089,154	226,398,011	115,574,675	141,712,007	155,516,183	678,290,030

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	TARGET					INDIKASI PENDANAAN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
Indikator Kegiatan: [IKK 16] Persentase Kerjasama di bidang Pendidikan dan pelatihan dengan stakeholder transportasi dan pendidikan	%	80.00	80.50	81.00	81.50	82.00	2,879,753	10,396,469	6,254,281	6,399,918	6,721,331	32,651,752
Sasaran Program: [SP 3] Meningkatkan kualitas Penjaminan mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi pada Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL) dan Lembaga Diklat Pelatihan Transportasi							5,474,877	7,587,900	9,174,367	11,080,723	12,988,590	46,306,457
Indikator Program: [IKP 3] Indeks Penjaminan Mutu	Nilai	85.00	85.50	86.00	86.50	87.00	5,474,877	7,587,900	9,174,367	11,080,723	12,988,590	46,306,457
Kegiatan: [1975] Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi							5,474,877	7,587,900	9,174,367	11,080,723	12,988,590	46,306,457
Sasaran Kegiatan: [SK 06] Terwujudnya Kebijakan Pengembangan SDM yang Menunjang Kebijakan Sektor Transportasi Darat/Laut/Udara							1,172,807	1,665,645	2,415,826	2,536,618	3,563,448	11,354,344
Indikator Kegiatan: [IKK 17] Indeks Kebijakan Pengembangan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,172,807	1,665,645	2,415,826	2,536,618	3,563,448	11,354,344

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	TARGET					INDIKASI PENDANAAN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
Sasaran Kegiatan: [SK 07] Meningkatnya kualitas evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan BPSDMP							4,302,070	5,922,255	6,758,541	8,544,105	9,425,142	34,952,113
Indikator Kegiatan: [IKK 18] Tingkat Pemenuhan Evaluasi dan Sistem Informasi Diklat Transportasi	%	80.00	80.50	81.00	81.50	82.00	3,698,074	5,061,735	5,898,021	7,640,560	8,226,421	30,524,811
Indikator Kegiatan: [IKK 19] Persentase Kerja Sama di bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN Perhubungan dengan stakeholder Transportasi dan Pendidikan	%	80.00	80.50	81.00	81.50	82.00	603,996	860,520	860,520	903,545	1,198,721	4,427,302
Sasaran Strategis: [SSp 6] Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan							382,046,396	643,554,411	517,501,071	535,815,421	554,535,000	2,633,452,299
Indikator Strategis: [IKSSp 6.1] Indeks RB Kementerian Perhubungan							382,046,396	643,554,411	517,501,071	535,815,421	554,535,000	2,633,452,299
Program: [WA] Dukungan Manajemen							382,046,396	643,554,411	517,501,071	535,815,421	554,535,000	2,633,452,299
Prioritas Kementerian Perhubungan							382,046,396	643,554,411	517,501,071	535,815,421	554,535,000	2,633,452,299
Sasaran Program: [SP 4] Meningkatnya Kualitas Tata Kelola yang Baik di BPSDMP							382,046,396	643,554,411	517,501,071	535,815,421	554,535,000	2,633,452,299

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	TARGET					INDIKASI PENDANAAN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
Indikator Program: [IKP 4] Indeks Tata Kelola Lembaga BPSDMP	Nilai	81.00	82.00	83.00	84.00	85.00	382,046,396	643,554,411	517,501,071	535,815,421	554,535,000	2,633,452,299
Kegiatan: [4626] Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi							3,016,330	19,888,462	10,620,185	10,684,057	12,297,823	56,506,857
Sasaran Kegiatan: [SK 09] Terwujudnya Organisasi yang Agile dan SDM Unggul							3,016,330	19,888,462	10,620,185	10,684,057	12,297,823	56,506,857
Indikator Kegiatan: [IKK 22] Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	76.00	77.00	78.00	79.00	80.00	3,016,330	19,888,462	10,620,185	10,684,057	12,297,823	56,506,857
Kegiatan: [4627] Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum SDM Transportasi							379,030,066	623,665,949	506,880,886	525,131,364	542,237,177	2,576,945,442
Sasaran Kegiatan: [SK 10] Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Berorientasi pada Layanan Prima							379,030,066	623,665,949	506,880,886	525,131,364	542,237,177	2,576,945,442
Indikator Kegiatan: [IKK 24] Persentase Pemenuhan Akuntabilitas di Lingkungan BPSDMP	%	95.00	95.50	96.00	96.50	97.00	368,713,962	598,983,238	487,265,365	504,563,903	520,275,037	2,479,801,505
Indikator Kegiatan: [IKK 26] Nilai SAKIP	Nilai	78.00	78.50	79.00	79.50	80.00	7,981,642	17,922,683	14,011,393	14,919,576	16,118,888	70,954,182

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT	Satuan	TARGET					INDIKASI PENDANAAN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
Indikator Kegiatan: [IKK 25] Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	90.00	90.50	91.00	91.50	92.00	2,334,462	6,760,028	5,604,128	5,647,885	5,843,252	26,189,755

sumber : RENSTRA BPSDMP 2025-2029 (data diolah)

Di luar kebutuhan pendanaan yang telah dipetakan dalam Kerangka Pendanaan Renstra PPSDMPL Tahun 2025–2029, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah PPSDMPL juga memiliki daftar kebutuhan belanja modal strategis yang telah direncanakan dan dihimpun sebagai *longlist* pengembangan sarana dan prasarana. *Longlist* ini mencerminkan kebutuhan riil lapangan untuk memastikan keberlanjutan, mutu, dan daya saing layanan pendidikan dan pelatihan SDM perhubungan laut, namun belum seluruhnya dapat diakomodasi dalam pagu indikatif kerangka pendanaan utama.

Daftar belanja modal tersebut mencakup pembangunan dan revitalisasi gedung perkuliahan, asrama, laboratorium, simulator, sarana keselamatan, peralatan TIK, fasilitas layanan taruna, hingga pengembangan kawasan kampus dan fasilitas penunjang pembelajaran. Nilai total kebutuhan belanja modal jangka menengah ini mencapai lebih dari Rp. 3,2 triliun, yang secara substansial menggambarkan skala kebutuhan modernisasi dan ekspansi kapasitas PPSDMPL dalam periode 2025–2029.

Pendanaan terhadap belanja modal di luar kerangka pendanaan ini tidak mengandalkan satu sumber pendanaan tunggal, melainkan dirancang untuk dibiayai melalui skema pembiayaan campuran (*blended financing*). Sumber pendanaan utama yang secara historis telah digunakan adalah Badan Layanan Umum (BLU) melalui pemanfaatan saldo awal kas BLU dan surplus operasional masing-masing UPT, yang memberikan fleksibilitas fiskal untuk memenuhi kebutuhan investasi pendidikan yang bersifat mendesak dan spesifik lokasi. Selain itu, peluang pembiayaan melalui Rupiah Murni (RM) tetap terbuka apabila terdapat tambahan ruang fiskal APBN, serta melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk pembiayaan infrastruktur pendidikan dan pelatihan yang memenuhi kriteria proyek SBSN.

Sejalan dengan arah kebijakan pembiayaan infrastruktur nasional, PPSDMPL juga mulai mengembangkan pendekatan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), khususnya untuk proyek-proyek yang bersifat komersial terbatas dan berpotensi menghasilkan arus kas, seperti revitalisasi gedung kelas, asrama, fasilitas penunjang, dan kawasan layanan taruna. Skema KPBU diposisikan sebagai instrumen alternatif untuk mempercepat penyediaan prasarana strategis tanpa membebani kapasitas fiskal jangka pendek pemerintah, sekaligus mendorong efisiensi pengelolaan aset pendidikan.

Belanja modal di luar Kerangka Pendanaan ini berfungsi sebagai cadangan strategis pembangunan (*strategic development pipeline*) PPSDMPL, yang akan diaktifkan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sumber pembiayaan, kesiapan proyek (*readiness criteria*), dan prioritas pencapaian target kinerja Renstra 2025–2029. Pendekatan ini memastikan bahwa modernisasi sarana dan prasarana pendidikan pelaut dapat tetap berjalan progresif, adaptif, dan berkelanjutan meskipun berada di luar pagu indikatif utama Renstra.

Tabel 4.4. Belanja Modal diluar Alokasi Pembiayaan Kegiatan

UPT	NO	URAIAN	INDIKASI ANGGARAN	SUMBER DANA (RM/PHLN/SBSN/ BLU/PNBP)	KETERANGAN/JUSTIFIKASI
REKAPITULASI			3,237,506,708,242		
Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)			99,195,071,000		
STIP	1	Engine Room Simulator	8,200,000,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
STIP	2	SMART PORT SIMULATION 5	5,000,000,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
STIP	3	Simulator IGF	5,500,000,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
STIP	4	FMSS II	22,500,000,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
STIP	5	Upgrade Steering	200,000,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
STIP	6	Upgrade FMSS 1	200,000,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
STIP	7	Upgrade LCHS	200,000,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
STIP	8	Upgrade Simulator Kalk	200,000,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
STIP	9	Upgrade CBT Seagull	200,000,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
STIP	10	Upgrade CBT Stability	200,000,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
STIP	11	Upgrade Laboratorium Listrik	417,624,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
STIP	12	Upgrade ECDIS	200,000,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
STIP	13	Aplikasi Aset	160,000,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
STIP	14	Aplikasi Layanan Diklat	175,000,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
STIP	15	Renovasi Mall Layanan	1,500,000,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
STIP	16	Pembuatan Lapangan Minisoccer	900,000,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
STIP	17	Perbaikan Lantai Sport Hall	837,000,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
STIP	18	Perbaikan Kolam Renang	750,000,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
STIP	19	Renewal peralatan Brass band dan Perkusi	1,500,000,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
STIP	20	Tempat Parkir Kendaraan Mahasiswa	500,000,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i

UPT	NO	URAIAN	INDIKASI ANGGARAN	SUMBER DANA (RM/PHLN/SBSN/ BLU/PNBP)	KETERANGAN/JUSTIFIKASI
STIP	21	Bis Besar	1,000,000,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
STIP	22	Mini Bus	710,000,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
STIP	23	MPV	490,000,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
STIP	24	Small MPV	280,000,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
STIP	25	Pengadaan Lift Orang	1,000,000,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
STIP	26	Pengadaan Lift Barang	800,000,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
STIP	27	Fresh Water Generator	800,000,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
STIP	28	Beasiswa S3 untuk Dosen	434,000,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
STIP	29	Beasiswa S2 (Pegawai Kemenhub)	666,000,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
STIP	30	Reviu Masterplan	500,000,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
STIP	31	Kekurangan Kebutuhan Remunerasi	31,255,900,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
STIP	32	Kebutuhan Insentif KPI 2024	8,919,547,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
STIP	33	Pengadaan School Staff	2,000,000,000	BLU	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
BP3IP			43,942,951,000		
BP3IP	1	Navigational Manuevering Simulator	16,000,000,000	RM	Diperlukan untuk sarana pembelajaran praktek diklat peningkatan dan keterampilan
BP3IP	2	Server Elearning, DKP, Go BP3IP, Monika	550,000,000	RM	Untuk pengembangan sarana pembelajaran LMS, Pendaftaran, serta Informasi terkait layanan dan keuangan
BP3IP	3	Server Sistem Informasi Akademik BP3IP	185,000,000	RM	Untuk pengembangan sarana pembelajaran LMS, Pendaftaran, serta Informasi terkait layanan dan keuangan
BP3IP	4	Pengadaan Firewall	80,000,000	RM	Untuk pengembangan sistem jaringan internet
BP3IP	5	Microsoft Office	154,000,000	RM	
BP3IP	6	Server Website, Pendaftaran (Hosting)	91,250,000	RM	Untuk pengembangan sistem jaringan internet
BP3IP	7	Kendaraan Roda 2	97,651,000	RM	
BP3IP	8	Pengadaan Smartboard	187,000,000	RM	

UPT	NO	URAIAN	INDIKASI ANGGARAN	SUMBER DANA (RM/PHLN/SBSN/ BLU/PNBP)	KETERANGAN/JUSTIFIKASI
BP3IP	9	Pengadaan Scanner	400,000,000	RM	
BP3IP	10	Pengadaan Printer	180,000,000	RM	
BP3IP	11	Pengadaan Laptop	1,440,000,000	RM	
BP3IP	12	Wireless Access Point	940,050,000	RM	
BP3IP	13	Switch	922,000,000	RM	
BP3IP	14	Router	236,000,000	RM	
BP3IP	15	Video Conference Set (Zoom)	135,000,000	RM	
BP3IP	16	UPS System	700,000,000	RM	
BP3IP	17	PC unit	195,000,000	RM	
BP3IP	18	Video Conference Portable (Zoom)	60,000,000	RM	
BP3IP	19	Pengadaan Alat Kesehatan Klinik	640,000,000	RM	
BP3IP	20	Lemari Arsip Besi Mobile File	750,000,000	RM	
BP3IP	21	Renovasi Pos Security 1,2 dan 3	1,500,000,000	RM	
BP3IP	22	Modernisasi ruang kelas It 4 dan 5 gedung A	2,250,000,000	RM	
BP3IP	23	Pembuatan ruang arsip gedung A	1,000,000,000	RM	
BP3IP	24	Renovasi Perpustakaan	3,000,000,000	RM	
BP3IP	25	Layanan Diklat Terpadu 1 Atap	2,000,000,000	RM	
BP3IP	26	Modernisasi Ruang Kelas Gedung C lantai 3 dan 4	4,750,000,000	RM	
BP3IP	27	Perawatan Ruang Simulator Gedung C	3,250,000,000	RM	
BP3IP	28	Modernisasi Ruang Kelas Gambar Teknik Gedung D lantai 4 dan Briefing Room	2,250,000,000	RM	
Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang			566,143,178,000		
PIP Semarang	1	Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa	475,945,000	RM	

UPT	NO	URAIAN	INDIKASI ANGGARAN	SUMBER DANA (RM/PHLN/SBSN/ BLU/PNBP)	KETERANGAN/JUSTIFIKASI
PIP Semarang	2	Pengadaan Peralatan Laboratorium Mantling Dismantling	5,657,080,000	RM	
PIP Semarang	3	Nautical Chart Laboratorium	1,700,000,000	RM	
PIP Semarang	4	Real Mooring and Unmooring Simulator	2,000,000,000	RM	
PIP Semarang	5	Full Mission Electronic Gasses	8,000,000,000	RM	
PIP Semarang	6	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan	1,444,111,000	RM	
PIP Semarang	7	Pengadaan Meubelair Asrama Taruni	-	RM	
PIP Semarang	8	Pengadaan Meubelair Asrama Taruni	2,360,408,000	RM	
PIP Semarang	9	Pengadaan Meubelair Gedung Kuliah Perwira Siswa	5,777,000,000	RM	
PIP Semarang	10	Pengadaan Meubelair Asrama Kompi A	12,781,338,000	RM	
PIP Semarang	11	Pengadaan Meubelair Asrama Kompi D	3,141,507,000	RM	
PIP Semarang	12	Pengadaan Furniture Gedung Betelgeuse	14,434,461,000	RM	
PIP Semarang	13	Pengadaan Furniture Gedung Pollux	15,300,000,000	RM	
PIP Semarang	14	Pengadaan Furniture Asrama	1,769,000,000	RM	
PIP Semarang	15	Pengadaan Peralatan Kehumasan	94,100,000	RM	
PIP Semarang	16	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	6,034,876,000	RM	
PIP Semarang	17	Revitalisasi Gedung Asrama Kompi B	30,295,841,000	RM	
PIP Semarang	18	Pembangunan Gedung Kuliah Perwira Siswa	40,200,000,000	RM	
PIP Semarang	19	Pembangunan Gedung Asrama Taruni	24,586,548,000	RM	
PIP Semarang	20	DED Gedung Asrama Kompi A	1,500,000,000	RM	
PIP Semarang	21	Pembangunan Gedung Asrama Kompi A	98,619,040,000	RM	
PIP Semarang	22	DED Gedung Asrama Kompi D	1,000,000,000	RM	
PIP Semarang	23	DED Gedung Perkuliahan (Betelgeuse)	2,850,000,000	RM	

UPT	NO	URAIAN	INDIKASI ANGGARAN	SUMBER DANA (RM/PHLN/SBSN/ BLU/PNBP)	KETERANGAN/JUSTIFIKASI
PIP Semarang	24	Pembangunan Gedung Asrama Kompi D	31,363,074,000	RM	
PIP Semarang	25	Pembangunan Gedung Perkuliahan (Betelgeuse)	121,730,397,000	RM	
PIP Semarang	26	DED Gedung Perkuliahan (Pollux)	3,500,000,000	RM	
PIP Semarang	27	Pembangunan Gedung Perkuliahan (Pollux)	129,029,952,000	RM	
PIP Semarang	28	FS Kampus 2	198,500,000	RM	
PIP Semarang	29	FS Pengadaan Kapal Latih	100,000,000	RM	
PIP Semarang	30	DED Pembangunan Gedung Diklat Terpadu	200,000,000	RM	
Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar			301,981,572,000		
PIP Makassar	1	Laboratorium Elektronika dan Sistem Kontrol	5,174,320,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
PIP Makassar	2	Crane and Cargo Operation	7,505,535,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
PIP Makassar	3	IGF Code Simulator Training	23,325,350,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
PIP Makassar	4	Virtual Reality For Engine	16,418,791,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
PIP Makassar	5	Full Mission Tug Boat Simulator 12 Channel	4,639,043,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
PIP Makassar	6	Pengadaan Smart Class	6,000,000,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
PIP Makassar	7	Pengadaan Air Conditioner	320,000,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan

UPT	NO	URAIAN	INDIKASI ANGGARAN	SUMBER DANA (RM/PHLN/SBSN/ BLU/PNBP)	KETERANGAN/JUSTIFIKASI
PIP Makassar	8	Pengadaan Smart TV	121,000,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
PIP Makassar	9	Pengadaan Proyektor	120,000,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
PIP Makassar	10	Pengadaan Peralatan Multimedia	1,023,257,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
PIP Makassar	11	Pembangunan Dormitory D	47,805,684,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
PIP Makassar	12	Pembangunan Classroom VI	57,760,454,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
PIP Makassar	13	Pembangunan Classroom VII	57,760,454,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
PIP Makassar	14	Pembangunan Refectory II	26,202,000,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
PIP Makassar	15	Pembangunan Gedung Ship Construction	47,805,684,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
Poltekpel Surabaya			172,337,245,000		
Poltekpel Surabaya	1	Pengadaan Smart Class	4,086,000,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
Poltekpel Surabaya	2	Upgrade Laboratorium LNG and Crude Oil dan IGF	11,194,794,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
Poltekpel Surabaya	3	Steering Gear	8,642,335,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
Poltekpel Surabaya	4	Virtual Reality Laboratorium	4,500,000,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
Poltekpel Surabaya	5	Pengadaan Alat Radiologi	1,200,000,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana pelayanan kesehatan
Poltekpel Surabaya	6	Pengadaan Alat Audiometri dan Chamber	120,000,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana pelayanan kesehatan

UPT	NO	URAIAN	INDIKASI ANGGARAN	SUMBER DANA (RM/PHLN/SBSN/ BLU/PNBP)	KETERANGAN/JUSTIFIKASI
Poltekpel Surabaya	7	Pengadaan Sarana Penunjang Laboratorium Menjangka Peta	903,900,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
Poltekpel Surabaya	8	Helicopter Rescue	7,625,381,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
Poltekpel Surabaya	9	Pengadaan Water Fountain	178,822,000	RM	Dalam rangka peningkatan layanan Taruna/i
Poltekpel Surabaya	10	Pengadaan CCTV Gedung T	1,250,486,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana pelayanan peserta diklat
Poltekpel Surabaya	11	Hydrant	497,031,000	RM	Dalam rangka peningkatan layanan
Poltekpel Surabaya	12	Pengadaan Laptop	920,000,000	RM	Dalam rangka peningkatan layanan
Poltekpel Surabaya	13	Pengadaan PC	640,000,000	RM	Dalam rangka peningkatan layanan
Poltekpel Surabaya	14	Pengadaan Printer	240,000,000	RM	Dalam rangka peningkatan layanan
Poltekpel Surabaya	15	Pengadaan AC Kampus I	1,413,585,000	RM	Dalam rangka peningkatan layanan
Poltekpel Surabaya	16	Pengadaan CCTV Twin Tower	2,605,180,000	RM	Dalam rangka peningkatan layanan
Poltekpel Surabaya	17	Meubelair Asrama Twin Tower	6,000,000,000	RM	Dalam rangka peningkatan layanan
Poltekpel Surabaya	18	Public Announcement	100,000,000	RM	Dalam rangka peningkatan layanan
Poltekpel Surabaya	19	Pengembangan Aplikasi	3,600,000,000	RM	Dalam rangka peningkatan layanan
Poltekpel Surabaya	20	Renovasi Area Foodcourt	1,785,197,000	RM	Dalam rangka peningkatan layanan
Poltekpel Surabaya	21	Pengadaan Kanopi Pool Kendaraan	461,511,000	RM	Dalam rangka peningkatan layanan
Poltekpel Surabaya	22	Ruang Rekreasi Taruna & Fitnes	2,000,000,000	RM	Dalam rangka peningkatan layanan
Poltekpel Surabaya	23	Pengadaan Sarana Penunjang Kerohanian Taruna	1,000,000,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran kemampuan bahasa Taruna/i
Poltekpel Surabaya	24	Pembangunan Gedung Asrama Twin Tower	108,010,983,000	RM	Dalam rangka peningkatan layanan
Poltekpel Surabaya	25	Pengadaan Bus Besar Taruna Kapasitas 60 Seat	1,500,000,000	RM	Dalam rangka peningkatan layanan
Poltekpel Surabaya	26	Pengadaan Mobil Bak Terbuka untuk Operasional Taruna	304,640,000	RM	Dalam rangka peningkatan layanan

UPT	NO	URAIAN	INDIKASI ANGGARAN	SUMBER DANA (RM/PHLN/SBSN/ BLU/PNBP)	KETERANGAN/JUSTIFIKASI
Poltekpel Surabaya	27	Instalasi Jaringan Area Kampus I dan Kampus II	1,557,400,000	RM	Dalam rangka peningkatan layanan
Poltekpel Barombong			74,589,017,000		
Poltekpel Barombong	1	VTs Simulator	19,200,000,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
Poltekpel Barombong	2	Laboratorium Kimia	900,000,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
Poltekpel Barombong	3	Laboratorium Fisika	900,000,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
Poltekpel Barombong	4	Pekerjaan Gedung Genset	1,013,817,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
Poltekpel Barombong	5	Pekerjaan Gedung Poliklinik	10,164,325,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
Poltekpel Barombong	6	Pekerjaan Auditorium	15,093,131,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
Poltekpel Barombong	7	Pekerjaan Gedung Utama/Rektorat	22,549,744,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
Poltekpel Barombong	8	Pekerjaan Gedung PKT	4,368,000,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
Poltekpel Barombong	9	Renovasi Jalan Perumahan Dinas	400,000,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
Poltekpel Banten			255,334,945,242		
Poltekpel Banten	1	Dormitory 5	24,233,246,720	RM	
Poltekpel Banten	2	Dormitory Taruni 2	17,190,459,392	RM	

UPT	NO	URAIAN	INDIKASI ANGGARAN	SUMBER DANA (RM/PHLN/SBSN/ BLU/PNBP)	KETERANGAN/JUSTIFIKASI
Poltekpel Banten	3	Gudang Kesamaptaan (LT.2 Tribun Penonton)	4,543,733,760	RM	
Poltekpel Banten	4	Masjid (perluasan)	5,424,082,176	RM	
Poltekpel Banten	5	Refectory (perluasan)	3,407,800,320	RM	
Poltekpel Banten	6	Carport	2,830,356,000	RM	
Poltekpel Banten	7	Multimedia dan Cinema	27,830,369,280	RM	
Poltekpel Banten	8	Toilet Umum	697,896,000	RM	
Poltekpel Banten	9	Simulator Center 2	11,094,283,264	RM	
Poltekpel Banten	10	Gudang Perkantoran	1,163,160,000	RM	
Poltekpel Banten	11	Gudang Pendidikan	2,512,425,600	RM	
Poltekpel Banten	12	Rumah Genset Baru	1,519,862,400	RM	
Poltekpel Banten	13	Incenerator	1,550,880,000	RM	
Poltekpel Banten	14	Kapel	766,755,072	RM	
Poltekpel Banten	15	Pura	1,135,933,440	RM	
Poltekpel Banten	16	Dormitory for School Staff 1	3,024,216,000	RM	
Poltekpel Banten	17	Dormitory for School Staff 2	3,024,216,000	RM	
Poltekpel Banten	18	Dormitory Perwira Siswa	6,513,696,000	RM	
Poltekpel Banten	19	Guest House	2,442,636,000	RM	
Poltekpel Banten	20	Wisma Taruna 1	922,945,920	RM	
Poltekpel Banten	21	Wisma Taruna 2	1,277,925,120	RM	
Poltekpel Banten	22	Wisma Taruna 3	1,703,900,160	RM	
Poltekpel Banten	23	Wisma Taruna 4	1,135,933,440	RM	
Poltekpel Banten	24	Wisma Taruna 5	10,223,400,960	RM	
Poltekpel Banten	25	Wisma Taruna 6	34,078,003,200	RM	
Poltekpel Banten	26	Wisma Taruna 7	53,434,309,018	RM	

UPT	NO	URAIAN	INDIKASI ANGGARAN	SUMBER DANA (RM/PHLN/SBSN/ BLU/PNBP)	KETERANGAN/JUSTIFIKASI
Poltekpel Banten	27	Pembangunan Tanggul sepanjang pantai Penahan Abrasi	14,975,000,000	RM	
Poltekpel Banten	28	Hutan Bakau	171,000,000	RM	
Poltekpel Banten	29	Cottage	1,248,000,000	RM	
Poltekpel Banten	30	Lapangan Sepak Bola	3,520,000,000	RM	
Poltekpel Banten	31	Jogging Track	1,371,720,000	RM	
Poltekpel Banten	32	Taman Depan Gedung Utama	1,191,300,000	RM	
Poltekpel Banten	33	Taman Belakang Gedung Utama	1,296,000,000	RM	
Poltekpel Banten	34	Plaza Taruna	416,500,000	RM	
Poltekpel Banten	35	Pembangunan Selasar penghubung Antar Bangunan	1,640,000,000	RM	
Poltekpel Banten	36	Pembangunan Fasilitas Parkir	4,170,000,000	RM	
Poltekpel Banten	37	Kolam Retensi	1,653,000,000	RM	
Poltekpel Sorong			373,371,297,000		
Poltekpel Sorong	1	Aplikasi Keuangan	400,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	2	Pengadaan Aplikasi Perencanaan	1,125,940,000	RM	
Poltekpel Sorong	3	Pengadaan Infocus	300,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	4	Pengadaan Scanner	255,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	5	Peralatan Drumband	1,000,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	6	Smart Class	7,620,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	7	Portable Fire Extinguisher	2,000,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	8	CCTV	175,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	9	Komputer	84,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	10	Truk Tangki	650,000,000	RM	

UPT	NO	URAIAN	INDIKASI ANGGARAN	SUMBER DANA (RM/PHLN/SBSN/ BLU/PNBP)	KETERANGAN/JUSTIFIKASI
Poltekpel Sorong	11	Kendaraan Doube Gardan	1,121,800,000	RM	
Poltekpel Sorong	12	Mesin Fotocopy	100,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	13	Pengadaan Kamera	150,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	14	Mesin Fotocopy	100,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	15	Pengadaan Printer	75,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	16	Pengadaan Sofa Tamu	75,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	17	Pengadaan Meubelair Perkantoran (Meja Kursi Kerja)	500,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	18	Pengadaan Laptop Perkantoran	600,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	19	Pengadaan PC Perkantoran	300,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	20	DED Perencanaan Peningkatan Gedung Kantor Utama	500,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	21	DED Perencanaan Renovasi Ruang Makan/ Cafetaria	150,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	22	DED Pembangunan Gedung Multi Fungsi	500,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	23	DED Perencanaan Pebangunan Flat PASIS	500,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	24	DED Perencanaan Pembangunan Dermaga Latih Poltekpel Sorong	1,750,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	25	DED Perencanaan Peningkatan Gedung Laboratorium	500,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	26	DED Perencanaan Landscape, Rehab Jalan, Drainase dan Bak Limbah Air/ Sanitasi Lingkungan	500,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	27	DED Perencanaan Peningkatan Guest House	150,000,000	RM	

UPT	NO	URAIAN	INDIKASI ANGGARAN	SUMBER DANA (RM/PHLN/SBSN/ BLU/PNBP)	KETERANGAN/JUSTIFIKASI
Poltekpel Sorong	28	DED Perencanaan Peningkatan Gedung Perpustakaan	100,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	29	DED Perencanaan Peningkatan Gedung Kelas	500,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	30	DED Perencanaan Peningkatan Asrama	250,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	31	DED Perencanaan Peningkatan Gedung Kantor	500,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	32	AMDAL Pembangunan Dermaga Latih Poltekpel Sorong	1,500,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	33	Peningkatan Jaringan Wifi/Internet	1,000,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	34	Pengadaan Peralatan Rekreasi Civitas	500,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	35	Pengadaan Mesin Las	2,000,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	36	Pengadaan Mesin Bubut	2,500,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	37	CCTV	154,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	38	Pembangunan Flat Perwira Siswa	34,000,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	39	Pengadaan Kendaraan Pejabat	836,055,000	RM	
Poltekpel Sorong	40	Kendaraan Operasional Taruna	2,400,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	41	Pengadaan Kendaraan Operasional Perkantoran (Roda 2)	240,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	42	Pengembangan Peralatan Klinik Utama	1,000,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	43	Pengadaan Fire Pump	3,000,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	44	Pengadaan Tandon Air	250,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	45	Pengadaan Pompa Air Tandon	140,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	46	Pengadaan Lemari Arsip	400,000,000	RM	

UPT	NO	URAIAN	INDIKASI ANGGARAN	SUMBER DANA (RM/PHLN/SBSN/ BLU/PNBP)	KETERANGAN/JUSTIFIKASI
Poltekpel Sorong	47	DED Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas	1,000,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	48	DED Perencanaan Peningkatan Area Bisnis (Bank, Café, Co Working)	500,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	49	DED Perencanaan Peningkatan Gedung Klinik	500,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	50	Renovasi Jalan Dan Drainase	5,000,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	51	Renovasi Gedung Laboratorium	10,000,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	52	Pengadaan Tug Boat Simulator	20,000,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	53	Pengadaan Cargo Procedure Simulator (Loading and Unloading)	985,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	54	Pengadaan Simulator Management Logistik Pelabuhan	4,850,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	55	Pengadaan System Control Dan PLC Laboratorium	4,500,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	56	Pengadaan Seamanship Laboratorium	850,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	57	Pengadaan LAB Elektronika	2,500,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	61	Pengadaan Laboratorium Elektrikal	2,900,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	62	Pengadaan Speedboat	3,000,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	63	Pengadaan Chipping Device	2,320,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	64	CCTV	105,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	65	Pembangunan Guest House	10,000,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	66	Peningkatan Gedung Perpustakaan	2,500,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	67	Peningkatan Gedung Kelas	20,000,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	68	Pembangunan Flat Perwira Siswa	3,500,000,000	RM	

UPT	NO	URAIAN	INDIKASI ANGGARAN	SUMBER DANA (RM/PHLN/SBSN/ BLU/PNBP)	KETERANGAN/JUSTIFIKASI
Poltekpel Sorong	69	Pembangunan Gedung Multi Fungsi	75,372,002,000	RM	
Poltekpel Sorong	71	Pengadaan Full Mission Crane Simulator	9,500,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	73	Pengadaan Peralatan Kelas	4,000,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	74	CCTV	87,500,000	RM	
Poltekpel Sorong	75	Peningkatan Gedung Asrama	25,000,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	76	Pengadaan Kendaraan Operasional Perkantoran (Roda 4)	2,000,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	77	Pengadaan Drone	100,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	78	Peningkatan Gedung Kantor	10,000,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	79	Pembangunan Rumah Dinas	15,000,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	80	Peningkatan Area Bisnis (Bank, Café, Co Working)	5,000,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	81	Peningkatan Gedung Klinik	5,000,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	82	Pembangunan Dermaga	40,000,000,000	RM	
Poltekpel Sorong	83	Renovasi Gedung Utama	14,850,000,000	RM	
Poltekpel Malahayati			765,477,697,000		
Poltekpel Malahayati	1	Meubelair Perpustakaan	1,000,000,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
Poltekpel Malahayati	2	Meubelair Ruang Program Diklat	600,000,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
Poltekpel Malahayati	3	E-Book	100,000,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
Poltekpel Malahayati	4	Paket Smart Class	6,500,000,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
Poltekpel Malahayati	5	Perencanaan Bangunan Multi Fungsi	618,940,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana
Poltekpel Malahayati	6	Bangunan Multi Fungsi	7,580,895,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana
Poltekpel Malahayati	7	Pengawasan Bangunan Multi Fungsi	443,382,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana
Poltekpel Malahayati	8	Pengelola Kegiatan Bangunan Multi Fungsi	275,505,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana

UPT	NO	URAIAN	INDIKASI ANGGARAN	SUMBER DANA (RM/PHLN/SBSN/ BLU/PNBP)	KETERANGAN/JUSTIFIKASI
Poltekpel Malahayati	9	Pagar Depan	993,252,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana
Poltekpel Malahayati	10	Perencanaan Pagar Depan	134,089,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana
Poltekpel Malahayati	11	Pengawasan Pagar Depan	96,047,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana
Poltekpel Malahayati	12	Pengelola Kegiatan Pagar Depan	81,546,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana
Poltekpel Malahayati	13	Pagar Samping Timur	295,290,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana
Poltekpel Malahayati	14	Perencanaan Pagar Samping Timur	58,467,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana
Poltekpel Malahayati	15	Pengawasan Pagar Samping Timur	41,931,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana
Poltekpel Malahayati	16	Pengelola Kegiatan Pagar Samping Timur	47,246,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana
Poltekpel Malahayati	17	Pagar Samping Barat	1,429,620,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana
Poltekpel Malahayati	18	Perencanaan Pagar Samping Barat	183,808,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana
Poltekpel Malahayati	19	Pengawasan Pagar Samping Barat	131,729,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana
Poltekpel Malahayati	20	Pengelola Kegiatan Pagar Samping Barat	108,651,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana
Poltekpel Malahayati	21	Pagar Belakang	518,733,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana
Poltekpel Malahayati	22	Perencanaan Pagar Belakang	82,046,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana
Poltekpel Malahayati	23	Pengawasan Pagar Belakang	58,789,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana
Poltekpel Malahayati	24	Pengelola Kegiatan Pagar Belakang	55,245,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana
Poltekpel Malahayati	25	Pagar Keliling Rumah Pak Femandes	758,850,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana
Poltekpel Malahayati	26	Perencanaan Pagar Keliling Rumah Pak Femandes	111,266,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana
Poltekpel Malahayati	27	Pengawasan Pagar Keliling Rumah Pak Femandes	79,679,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana
Poltekpel Malahayati	28	Pengelola Kegiatan Pagar Keliling Rumah Pak Femandes	71,521,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana
Poltekpel Malahayati	29	Perencanaan Gedung Rektorat dan Manajemen	2,623,461,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana

UPT	NO	URAIAN	INDIKASI ANGGARAN	SUMBER DANA (RM/PHLN/SBSN/ BLU/PNBP)	KETERANGAN/JUSTIFIKASI
Poltekpel Malahayati	30	Manajemen Kontruksi Gedung Rektorat dan Manajemen	2,429,489,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana
Poltekpel Malahayati	31	Gedung Rektorat dan Manajemen	59,360,658,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana
Poltekpel Malahayati	32	Pengawasan Gedung Rektorat dan Manajemen	1,875,956,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana
Poltekpel Malahayati	33	Pengelola kegiatan Gedung Rektorat dan Manajemen	687,644,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana
Poltekpel Malahayati	34	Lapangan Upacara Besar	19,500,000,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana
Poltekpel Malahayati	35	Perencanaan Lapangan Upacara Besar	1,240,159,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana
Poltekpel Malahayati	36	Pengawasan Lapangan Upacara Besar	887,853,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana
Poltekpel Malahayati	37	Pengelola Kegiatan Lapangan Upacara Besar	445,786,000	RM	Pemenuhan sarana dan prasarana
Poltekpel Malahayati	38	Poliklinik Umum	17,270,100,000	RM	Pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat dan masyarakat
Poltekpel Malahayati	39	Perencanaan Poliklinik Umum	1,136,412,000	RM	Pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat dan masyarakat
Poltekpel Malahayati	40	Manajemen Kontruksi Poliklinik Umum	1,052,271,000	RM	Pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat dan masyarakat
Poltekpel Malahayati	41	Pengawasan Kontruksi Poliklinik Umum	813,702,000	RM	Pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat dan masyarakat
Poltekpel Malahayati	42	Pengelola Kegiatan Kontruksi Poliklinik Umum	419,603,000	RM	Pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat dan masyarakat
Poltekpel Malahayati	43	Bank	2,405,868,000	RM	Pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat dan masyarakat
Poltekpel Malahayati	44	Perencanaan Bank	270,860,000	RM	Pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat dan masyarakat

UPT	NO	URAIAN	INDIKASI ANGGARAN	SUMBER DANA (RM/PHLN/SBSN/ BLU/PNBP)	KETERANGAN/JUSTIFIKASI
Poltekpel Malahayati	45	Pengawasan Bank	194,073,000	RM	Pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat dan masyarakat
Poltekpel Malahayati	46	Pengelola Kegiatan Bank	146,056,000	RM	Pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat dan masyarakat
Poltekpel Malahayati	47	Perencanaan Gedung Pendaftaran dan Kantin	1,434,376,000	RM	Pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat dan masyarakat
Poltekpel Malahayati	48	Manajemen Kontruksi Gedung Pendaftaran dan Kantin	1,328,041,000	RM	Pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat dan masyarakat
Poltekpel Malahayati	49	Pendaftaran dan Kantin	24,561,920,000	RM	Pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat dan masyarakat
Poltekpel Malahayati	50	Pengawasan Pendaftaran dan Kantin	1,026,408,000	RM	Pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat dan masyarakat
Poltekpel Malahayati	51	Pengelola Kegiatan Pendaftaran dan Kantin	477,958,000	RM	Pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat dan masyarakat
Poltekpel Malahayati	52	Perencanaan Ruang Kelas D4	3,461,480,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
Poltekpel Malahayati	53	Manajemen Kontruksi Ruang Kelas D4	3,204,874,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
Poltekpel Malahayati	54	Ruang Kelas D4	90,602,113,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
Poltekpel Malahayati	55	Pengawasan Ruang Kelas D4	2,473,157,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
Poltekpel Malahayati	56	Pengelola Kegiatan Ruang Kelas D4	744,317,000	RM	Dalam rangka pemenuhan sarana pembelajaran Taruna/i
Poltekpel Malahayati	57	Perencanaan Flat Pegawai 2 dan 3	1,547,920,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk pegawai
Poltekpel Malahayati	58	Manajemen Kontruksi Flat Pegawai 2 dan 3	1,433,192,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk pegawai
Poltekpel Malahayati	59	Flat Pegawai 2 dan 3	27,182,791,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk pegawai
Poltekpel Malahayati	60	Pengawasan Flat Pegawai 2 dan 3	1,107,498,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk pegawai
Poltekpel Malahayati	61	Pengelola Kegiatan Flat Pegawai 2 dan 3	506,079,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk pegawai

UPT	NO	URAIAN	INDIKASI ANGGARAN	SUMBER DANA (RM/PHLN/SBSN/ BLU/PNBP)	KETERANGAN/JUSTIFIKASI
Poltekpel Malahayati	62	Perencanaan Auditorium	1,744,888,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	63	Manajemen Kontruksi Auditorium	1,615,570,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	64	Auditorium	31,878,352,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	65	Pengawasan Auditorium	1,248,368,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	66	Pengelolaan Kegiatan Auditorium	554,863,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	67	Depo Sampah	1,260,000,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan untuk peserta diklat dan pegawai
Poltekpel Malahayati	68	Perencanaan Laboratorium Nautika dan Teknik	2,443,378,000	RM	Dalam rangka pemenuhan prasarana pembelajaran Taruna/i
Poltekpel Malahayati	69	Manajemen Kontruksi Laboratorium Nautika dan Teknik	2,262,723,000	RM	Dalam rangka pemenuhan prasarana pembelajaran Taruna/i
Poltekpel Malahayati	70	Laboratorium Nautika dan Teknik	54,621,126,000	RM	Dalam rangka pemenuhan prasarana pembelajaran Taruna/i
Poltekpel Malahayati	71	Pengawasan Laboratorium Nautika dan Teknik	1,747,297,000	RM	Dalam rangka pemenuhan prasarana pembelajaran Taruna/i
Poltekpel Malahayati	72	Pengelolaan Kegiatan Laboratorium Nautika dan Teknik	649,277,000	RM	Dalam rangka pemenuhan prasarana pembelajaran Taruna/i
Poltekpel Malahayati	73	Perencanaan Asrama Taruna 2	3,043,019,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	74	Manajemen Kontruksi Asrama Taruna 2	2,817,777,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat

UPT	NO	URAIAN	INDIKASI ANGGARAN	SUMBER DANA (RM/PHLN/SBSN/ BLU/PNBP)	KETERANGAN/JUSTIFIKASI
Poltekpel Malahayati	75	Asrama Taruna 2	73,246,192,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	76	Pengawasan Asrama Taruna 2	2,175,271,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	77	Pengelolaan Kegiatan Asrama Taruna 2	739,366,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	78	Perencanaan Rumah Dinas Tipe 45	399,168,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk pegawai
Poltekpel Malahayati	79	Rumah Dinas Tipe 45	4,032,000,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk pegawai
Poltekpel Malahayati	80	Pengawasan Rumah Dinas Tipe 45	285,969,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk pegawai
Poltekpel Malahayati	81	Pengelolaan Kegiatan Rumah Dinas Tipe 45	202,608,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk pegawai
Poltekpel Malahayati	82	Perencanaan Kantin Taruna	2,720,033,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	83	Manajemen Kontruksi Kantin Taruna	2,518,864,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	84	Kantin Taruna	62,359,508,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	85	Pengawasan Kantin Taruna	1,944,937,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	86	Pengelolaan Kegiatan Kantin Taruna	702,244,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	87	Perencanaan Out Door Activity	1,199,451,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan prasarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	88	Out Door Activity	18,625,651,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan prasarana untuk peserta diklat

UPT	NO	URAIAN	INDIKASI ANGGARAN	SUMBER DANA (RM/PHLN/SBSN/ BLU/PNBP)	KETERANGAN/JUSTIFIKASI
Poltekpel Malahayati	89	Pengawasan Out Door Activity	858,782,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan prasarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	90	Pengelolaan Kegiatan Out Door Activity	435,499,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan prasarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	91	Perencanaan Sentra Bisnis	624,700,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan prasarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	92	Sentra Bisnis	7,719,682,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan prasarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	93	Pengawasan Sentra Bisnis	447,543,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan prasarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	94	Pengelolaan Kegiatan Sentra Bisnis	275,830,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan prasarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	95	Perencanaan Sport Hall 2	2,972,065,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	96	Manajemen Kontruksi Sport Hall 2	2,752,115,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	97	Sport Hall 2	70,751,565,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	98	Pengawasan Sport Hall 2	2,124,645,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	99	Pengelola Kegiatan Sport Hall 2	732,498,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	100	Perencanaan Monumen dan Theater Terbuka	1,040,278,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	101	Monumen dan Theater Terbuka	15,389,328,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat

UPT	NO	URAIAN	INDIKASI ANGGARAN	SUMBER DANA (RM/PHLN/SBSN/ BLU/PNBP)	KETERANGAN/JUSTIFIKASI
Poltekpel Malahayati	102	Pengawasan Monumen dan Theater Terbuka	744,983,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	103	Pengelola Kegiatan Monumen dan Theater Terbuka	392,028,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	104	Perencanaan Gedung Laundry	329,913,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	105	Gedung Laundry	3,083,302,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	106	Pengawasan Gedung Laundry	236,283,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	107	Pengelola Kegiatan Gedung Laundry	173,384,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	108	Perencanaan Bimtar	445,194,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	109	Bimtar	4,087,499,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	110	Pengawasan Bimtar	318,997,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	111	Pengelolaan Kegiatan Bimtar	218,741,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	112	Perencanaan Guest House	150,922,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana
Poltekpel Malahayati	113	Guest House	1,144,800,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana
Poltekpel Malahayati	114	Pengawasan Guest House	108,088,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana
Poltekpel Malahayati	115	Pengelolaan Kegiatan Guest House	90,534,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana
Poltekpel Malahayati	116	Perencanaan Gedung Ruang Makan, Dapur dan Rekreasi	2,841,787,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat

UPT	NO	URAIAN	INDIKASI ANGGARAN	SUMBER DANA (RM/PHLN/SBSN/ BLU/PNBP)	KETERANGAN/JUSTIFIKASI
Poltekpel Malahayati	117	Manajemen Kontruksi Gedung Ruang Makan, Dapur dan Rekreasi	2,631,503,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	118	Gedung Ruang Makan, Dapur dan Rekreasi	66,258,000,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	119	Pengawasan Gedung Ruang Makan, Dapur dan Rekreasi	2,031,778,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Malahayati	120	Pengelolaan Kegiatan Gedung Ruang Makan, Dapur dan Rekreasi	718,929,000	RM	Dalam rangka pemenuhan layanan sarana untuk peserta diklat
Poltekpel Sulawesi Utara			421,078,989,000		
Poltekpel Sulut	1	Dormitory Non Barak	57,774,000,000	RM	Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Poltekpel Sulut	2	Library	26,469,000,000	RM	Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Poltekpel Sulut	3	Food Court	22,929,000,000	RM	Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Poltekpel Sulut	4	Gedung Kesamaptaan	7,036,000,000	RM	Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Poltekpel Sulut	5	Pembangunan Gedung Auditorium/Aula Larning Center	30,000,000,000	RM	Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Poltekpel Sulut	6	Full Mission Tug Boat 360 Degree	27,000,000,000	RM	Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Poltekpel Sulut	7	Vts Simulator	18,770,000,000	RM	Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Poltekpel Sulut	8	Dinamic Position Simulator	5,300,000,000	RM	Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Poltekpel Sulut	9	Basic Off Shore Safety (Bosiet)	3,500,000,000	RM	Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Poltekpel Sulut	10	Life Boat Launch	2,000,000,000	RM	Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Poltekpel Sulut	11	Welding Underwater Equipment	1,500,000,000	RM	Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Poltekpel Sulut	12	Multipurpose Hall	78,095,000,000	RM	Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Poltekpel Sulut	13	Multimedia	26,469,000,000	RM	Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Poltekpel Sulut	14	Gedung Cargo Crane	7,295,000,000	RM	Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Poltekpel Sulut	15	Pengadaan Alat Cargo Crane	7,126,690,000	RM	Pemenuhan Sarana dan Prasarana

UPT	NO	URAIAN	INDIKASI ANGGARAN	SUMBER DANA (RM/PHLN/SBSN/ BLU/PNBP)	KETERANGAN/JUSTIFIKASI
Poltekpel Sulut	16	Water Sport B	1,947,000,000	RM	Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Poltekpel Sulut	17	Gedung Uji Kompetensi	4,086,000,000	RM	Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Poltekpel Sulut	18	Laundry	5,277,000,000	RM	Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Poltekpel Sulut	19	Garage and Venue Workshop	3,957,000,000	RM	Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Poltekpel Sulut	20	Site Development and Utilitas	2,424,059,000	RM	Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Poltekpel Sulut	21	Pekerjaan Persiapan	360,282,000	RM	Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Poltekpel Sulut	22	Pekerjaan Sarana dan Prasarana	4,172,759,000	RM	Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Poltekpel Sulut	23	Bangunan Gedung Watersport	18,682,600,000	RM	Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Poltekpel Sulut	24	Bangunan Gedung Olahraga (Gor)	18,740,700,000	RM	Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Poltekpel Sulut	25	Lapangan Sepakbola	12,430,899,000	RM	Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Poltekpel Sulut	26	Tribun Lapangan Sepakbola	17,406,000,000	RM	Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Poltekpel Sulut	27	Tennis Lapangan	1,142,000,000	RM	Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Poltekpel Sulut	28	Lapangan Voli	636,000,000	RM	Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Poltekpel Sulut	29	Service And Maintenance	8,553,000,000	RM	Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Poltekpel Sumatera Barat			160,716,760,000		
Poltekpel Sumbar	1	Pembangunan Gedung Auditorium	71,018,640,000	RM	Menunjang pelaksanaan kuliah umum dan pertemuan
Poltekpel Sumbar	2	Pembangunan Asrama Perwira Siswa	32,905,840,000	RM	Menunjang jumlah fasilitas prasarana diklat dikarenakan potensi peningkatan jumlah perwira siswa
Poltekpel Sumbar	3	Pembangunan Bangunan Kelas	27,296,280,000	RM	Menunjang jumlah fasilitas prasarana diklat dikarenakan potensi peningkatan jumlah mahasiswa
Poltekpel Sumbar	5	Pembangunan Gedung Guest House	2,496,000,000	RM	Menunjang fasilitas layanan
Poltekpel Sumbar	6	Pengadaan Simulator MHV	7,000,000,000	RM	Peningkatan Fasilitas Pembelajaran agar sarana prasarana diklat mengikuti perkembangan teknologi dan sesuai dengan kebutuhan industri

UPT	NO	URAIAN	INDIKASI ANGGARAN	SUMBER DANA (RM/PHLN/SBSN/ BLU/PNBP)	KETERANGAN/JUSTIFIKASI
Poltekpel Sumbar	9	Upgrade Laboratorium Stabilitas Kapal	10,000,000,000	RM	Peningkatan Fasilitas Pembelajaran agar sarana prasarana diklat mengikuti perkembangan teknologi dan sesuai dengan kebutuhan industri
Poltekpel Sumbar	10	Upgrade Laboratorium Navigational Equipment	10,000,000,000	RM	Peningkatan Fasilitas Pembelajaran agar sarana prasarana diklat mengikuti perkembangan teknologi dan sesuai dengan kebutuhan industri
BP2TL			3,337,986,000		
BP2TL	1	Laboratorium Elektrikal	3,337,986,000	RM	Menunjang kegiatan pembelajaran diklat pelaut teknika

sumber : data diolah

4.3.3. Kerangka dan Alokasi Pembiayaan Program Prioritas Nasional

Sebagai bagian integral dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Tahun 2025–2029, perumusan *output* kegiatan beserta alokasi pendanaan dari Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut disusun secara terarah dan terukur untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Kerangka rincian output berikut alokasi pembiayaan yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut mengacu pada alokasi pembiayaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2025-2029. Alokasi pembiayaan Program Prioritas Nasional (PN) dihitung dan dirumuskan berdasarkan program prioritas nasional yang ada pada Kerangka Pendanaan pada Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 dan dianalisis sesuai dengan pembiayaan dari Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Penyusunan rincian output tersebut dilakukan dengan memperhatikan keselarasan antara mandat kelembagaan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, sasaran pembangunan sumber daya manusia perhubungan laut, serta arah kebijakan pembangunan nasional di bidang konektivitas, transformasi SDM, dan penguatan daya saing sektor maritim.

Rincian *output* Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut beserta alokasi pendanaannya merepresentasikan komitmen Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut dalam menerjemahkan prioritas nasional ke dalam program dan kegiatan yang operasional, berbasis kinerja, dan berorientasi hasil (*outcome-oriented*). Setiap output dirancang untuk memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas, kuantitas, dan relevansi sumber daya manusia perhubungan laut, baik melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi kompetensi, penguatan kelembagaan, maupun peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran yang mendukung standar keselamatan dan layanan transportasi laut nasional.

Selain itu, pengalokasian pendanaan pada masing-masing output disusun dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, serta mengacu pada kerangka penganggaran berbasis kinerja. Pendanaan diarahkan untuk memastikan keberlanjutan program strategis Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut dan optimalisasi kontribusinya terhadap sasaran Prioritas Nasional, khususnya dalam mendukung pembangunan SDM unggul, penguatan konektivitas maritim, serta peningkatan daya saing sektor transportasi laut sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Tabel berikut menyajikan rincian output Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut beserta alokasi pendanaannya selama periode Renstra 2025–2029, yang secara

eksplisit menunjukkan keterkaitan antara output kegiatan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut dengan Prioritas Nasional yang didukung, sebagai dasar pengendalian kinerja dan evaluasi pencapaian sasaran pembangunan sektor perhubungan laut.

Tabel 4.5. Alokasi Pembiayaan Rincian Output PPSDMPL dalam mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025-2029

(dalam ribuan rupiah)

No.	Rincian Output untuk Prioritas Nasional	Satuan	Target dalam RPJMN 2025-2029					Indikasi Alokasi Anggaran
			2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut	paket	0	3	0	0	1	46.264.644
2.	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut	paket	0	0	0	0	0	--
3.	Diklat Pembentukan Reguler (Non Pola Pembibitan) Transportasi Laut	orang	1.124	301	72	144	192	103.994.912
4.	Diklat Pembentukan Non Reguler (Mandiri) Transportasi Laut	orang	12.064	13.965	14.467	14.478	14.826	1.207.653.702
5.	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut	orang	0	0	0	0	0	--
6.	Diklat Pemberdayaan Masyarakat Bidang Transportasi Laut	orang	12.924	15.757	14.821	14.917	15.925	143.138.504
TOTAL ANGGARAN								1.501.051.762

sumber : RENSTRA BPSDMP 2025-2029 (data diolah)

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan, yang disusun untuk menjabarkan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 digunakan sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap kinerja yang telah ditetapkan dalam unit kerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, dan akan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN II

Keputusan Kepala Pusat Pengembangan
SDM Perhubungan Laut

Nomor : KP – PPSDMPL 240 TAHUN 2025

Tanggal: 01 Oktober 2025

Tentang: Rencana Strategis Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan Tahun 2025-2029

KERANGKA PENDANAAN

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2025 - 2029

LAMPIRAN II
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025-2029
PUSAT PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN LAUT

dalam ribu rupiah

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT			Lokasi	Satuan	TARGET					INDIKASI PENDANAAN							UPT	
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	S.D	J.B	Pelaksana
PUSAT PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN LAUT										28.135.234	35.528.055	37.750.681	41.197.556	44.893.179	187.504.705			
Sasaran Strategis: [SSp 5] Meningkatnya SDM Transportasi yang kompeten										6.603.645	9.046.755	10.873.865	13.011.493	14.938.651	54.474.409			
Indikator Strategis: [IKSSp 5.1] Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten										6.603.645	9.046.755	10.873.865	13.011.493	14.938.651	54.474.409			
Program: [DL] Pendidikan dan Pelatihan Vokasi										6.603.645	9.046.755	10.873.865	13.011.493	14.938.651	54.474.409			
Prioritas Kementerian Perhubungan										6.603.645	9.046.755	10.873.865	13.011.493	14.938.651	54.474.409			
Sasaran Program: [SP 1] Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten										1.128.768	1.458.855	1.699.498	1.930.770	1.950.061	8.167.952			
Indikator Program: [IKP 1] Indeks Peningkatan SDM Transportasi				Nilai	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50	1.128.768	1.458.855	1.699.498	1.930.770	1.950.061	8.167.952			
Kegiatan: [1975] Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi										1.128.768	1.458.855	1.699.498	1.930.770	1.950.061	8.167.952			
Sasaran Kegiatan: [SK 02] Meningkatnya Kompetensi ASN Transportasi										1.128.768	1.458.855	1.699.498	1.930.770	1.950.061	8.167.952			
Indikator Kegiatan: [IKK 07] Tingkat Pemenuhan ASN Transportasi Program Pelatihan				%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.128.768	1.458.855	1.699.498	1.930.770	1.950.061	8.167.952			
Klasifikasi Rincian Output: [1975.DCB] Pelatihan Bidang Infrastruktur				Orang	1.020	1.171	1.171	1.171	1.171	1.128.768	1.458.855	1.699.498	1.930.770	1.950.061	8.167.952			
Rincian Output: [1975.DCB.003] Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Laut yang Kompeten				Orang	1.020	1.171	1.171	1.171	1.171	1.128.768	1.458.855	1.699.498	1.930.770	1.950.061	8.167.952			
Indikator Output: Jumlah Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Laut yang Kompeten				Orang	1.020	1.171	1.171	1.171	1.171	1.128.768	1.458.855	1.699.498	1.930.770	1.950.061	8.167.952			
Komponen: [1975.DCB.003.051] Tenaga Pendidik yang Kompeten			Jakarta Pusat	Orang	1.020	1.171	1.171	1.171	1.171	1.128.768	1.458.855	1.699.498	1.930.770	1.950.061	8.167.952			PPSDMPL
PPSDMPL				Orang	1.020	1.171	1.171	1.171	1.171	1.128.768	1.458.855	1.699.498	1.930.770	1.950.061	8.167.952			
12-0364	A. Penyelenggaraan Training Course ToT GMDSS			Orang	30	30	30	30	30	181.761	160.702	160.702	168.737	177.174	849.076	RM	Non-Ops	
12-0365	B. Kerjasama Penyelenggaraan Training Course (TOT IMC 6.09), (TOT IMC 6.10) TOE 3.12			Orang	960	1110	1110	1110	1110	922.355	1.031.070	1.254.405	1.467.305	1.467.305	6.142.440	PNBP	Non-Ops	
12-0366	C. Kerjasama dalam rangka peningkatan kompetensi SDM Perhubungan Laut			Orang	30	1	1	1	1	24.652	60.337	77.645	77.645	77.645	317.924	PNBP	Non-Ops	
12-0367	D. Penyelenggaraan Training Course ToT IMDG Code		Orang		30	30	30	30	0	206.746	206.746	217.083	227.937	858.512	RM	Non-Ops		

dalam ribu rupiah																		
PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT			Lokasi	Satuan	TARGET				INDIKASI PENDANAAN						UPT Pelaksana			
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			2025-2029	S.D
Sasaran Program: [SP 3] Meningkatnya kualitas Penjaminan mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi pada Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL) dan Lembaga Diklat Pelatihan Transportasi									5.474.877	7.587.900	9.174.367	11.080.723	12.988.590	46.306.457				
Indikator Program: [IKP 3] Indeks Penjaminan Mutu				Nilai	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	5.474.877	7.587.900	9.174.367	11.080.723	12.988.590	46.306.457			
Kegiatan: [1975] Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi										5.474.877	7.587.900	9.174.367	11.080.723	12.988.590	46.306.457			
Sasaran Kegiatan: [SK 06] Terwujudnya Kebijakan Pengembangan SDM yang Menunjang Kebijakan Sektor Transportasi Darat/Laut/Udara										1.172.807	1.665.645	2.415.826	2.536.618	3.563.448	11.354.344			
Indikator Kegiatan: [IKK 17] Indeks Kebijakan Pengembangan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara				%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.172.807	1.665.645	2.415.826	2.536.618	3.563.448	11.354.344			
Klasifikasi Rincian Output: [1975.AFA] Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria				NSPK	9	8	8	8	8	1.172.807	1.665.645	2.415.826	2.536.618	3.563.448	11.354.344			
Rincian Output: [1975.AFA.007] SKKNI Transportasi Laut				NSPK	2	3	3	3	3	299.352	635.806	935.158	981.916	1.031.011	3.883.243			
Indikator Output: Jumlah SKKNI Transportasi Laut				NSPK	2	3	3	3	3	299.352	635.806	935.158	981.916	1.031.011	3.883.243			
Komponen: [1975.AFA.007.051] Penyusunan SKKNI Transportasi Laut				NPSK	0	0	0	0	0	299.352	635.806	935.158	981.916	1.031.011	3.883.243			
PPSDMPL			Jakarta Pusat	NPSK	0	0	0	0	0	299.352	635.806	935.158	981.916	1.031.011	3.883.243			PPSDMPL
12-0349	12-0349	A. Penyusunan Materi Uji Kompetensi (MUK) Sub Sektor Transportasi Laut	NSPK	1	1	1	1	1	99.030	0	99.030	103.982	109.181	411.223	RM	Non-Ops		
		12-0350		B. Sosialisasi Bersama Stake Holder Terkait Standarisasi Pelatihan Pelayaran Berbasis SKKNI dan SKKK	1				200.322	0	200.322	210.338	220.855	831.837	RM	Non-Ops		
		12-0351		C. Penyusunan Dokumen SKKNI		1	1	1	1	0	480.560	480.560	504.588	529.817	1.995.525	RM		Non-Ops
	12-0352	D. Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) KM 298 Tahun 2020 tentang Penetapan SKKNI Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktifitas Penunjang Angkutan pada Jabatan Kerja TKBM Barang Umum		NSPK		1	1	1	1	0	155.246	155.246	163.008	171.158	644.658	RM		Non-Ops
Rincian Output: [1975.AFA.014] Kurikulum dan Silabi Berbasis Kompetensi Transportasi Laut				NPSK	0	0	0	0	0	873.455	1.029.839	1.480.668	1.554.702	1.632.437	6.571.101			
Indikator Output: Jumlah Kurikulum dan Silabi Berbasis Kompetensi Transportasi Laut				NPSK	0	0	0	0	0	873.455	1.029.839	1.480.668	1.554.702	1.632.437	6.571.101			
Komponen: [1975.AFA.014.051] Kurikulum dan Silabus Diklat				NPSK	0	0	0	0	0	276.961	460.182	460.182	483.191	507.351	2.187.867			
PPSDMPL			Jakarta Pusat	NPSK	0	0	0	0	0	276.961	460.182	460.182	483.191	507.351	2.187.867			PPSDMPL
12-0353	12-0353	A. Penyusunan Kurikulum Diklat Peningkatan Kompetensi Kepelautan	NSPK	1	1	1	1	1	74.264	127.062	127.062	133.415	140.086	601.889	RM	Non-Ops		
		12-0354		B. Reviu Kurikulum dan Silabus Diklat Keterampilan Kepelautan	1	1	1	1	1	103.667	182.194	182.194	191.304	200.869	860.228	RM		Non-Ops
		12-0355		C. Penyusunan Pedoman dan Kurikulum Diklat Keterampilan Pelayaran	NSPK	1	1	1	1	1	99.030	150.926	150.926	158.472	166.396	725.750		RM
	Komponen: [1975.AFA.014.052] Evaluasi Kurikulum dan Silabus Diklat				NPSK	0	0	0	0	0	596.494	569.657	1.020.486	1.071.511	1.125.086	4.383.234		

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT			Lokasi	Satuan	TARGET					INDIKASI PENDANAAN							UPT Pelaksana		
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029			S.D	J.B
PPSDMPL			Jakarta Pusat	NPSK	0	0	0	0	0	596.494	569.657	1.020.486	1.071.511	1.125.086	4.383.234				PPSDMPL
12-0356	A. Evaluasi Bahan Ajar Diklat Keterampilan Pelaut			NSPK	1	1	1	1	1	145.665	321.612	321.612	337.693	354.578	1.481.160		RM	Non-Ops	
12-0357	B. Sosialisasi Pedoman Diklat dan Kurikulum Diklat Keterampilan Pelaut			NSPK	1	1	1	1	1	99.030	0	99.030	103.982	109.181	411.223		RM	Non-Ops	
12-0358	C. Review PK 16 tahun 2017 tentang simulator			NSPK	1					252.769	0	252.769	265.407	278.677	1.049.622		RM	Non-Ops	
12-0359	D. Workshop Evaluasi Penggunaan aplikasi simpel untuk diklat kepelautan			NSPK	1					99.030	0	99.030	103.982	109.181	411.223		RM	Non-Ops	
12-0360	E. Workshop Standarisasi Modul Pembelajaran Program Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran			NSPK						0	248.045	248.045	260.447	273.469	1.030.006		RM	Non-Ops	
Rincian Output: [1975.AFA.017] Standard Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Laut				NPSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000				
Indikator Output: Jumlah Standard Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Laut			NPSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000					
Komponen: [1975.AFA.017.051] Analisa Kebutuhan Diklat			NPSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000					
PPSDMPL			Jakarta Pusat	NPSK	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000				PPSDMPL	
12-0361	A. Traning Need Analysist			NSPK	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000		RM	Non-Ops		
Komponen: [1975.AFA.017.052] Man Power Planning (MPP)			NPSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000					
PPSDMPL			Jakarta Pusat	NPSK	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000				PPSDMPL	
12-0362	A. Peta Okupasi			NSPK	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000		RM	Non-Ops		
Sasaran Kegiatan: [SK 07] Meningkatnya kualitas evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan BPSDMP									4.302.070	5.922.255	6.758.541	8.544.105	9.425.142	34.952.113					
Indikator Kegiatan: [IKK 18] Tingkat Pemenuhan Evaluasi dan Sistem Informasi Diklat Transportasi				%	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	3.698.074	5.061.735	5.898.021	7.640.560	8.226.421	30.524.811				
Klasifikasi Rincian Output: [1975.ADD] Standarisasi Lembaga			Lembaga	0	0	0	0	0	2.638.378	2.619.609	3.650.177	3.832.687	4.024.323	16.765.174					
Rincian Output: [1975.ADD.004] Sertifikasi, Standarisasi Akreditasi dan Manajemen Mutu Diklat Transportasi Laut			Dok	11	12	12	12	12	1.716.442	1.635.641	2.350.861	2.468.405	2.591.826	10.763.175					
Indikator Output: Jumlah Sertifikasi, Standarisasi Akreditasi dan Manajemen Mutu Diklat Transportasi Laut			Dok	11	12	12	12	12	1.716.442	1.635.641	2.350.861	2.468.405	2.591.826	10.763.175					
Komponen: [1975.ADD.004.051] Standar Pendidikan			Dok	5	5	5	5	5	647.766	641.767	1.190.503	1.250.029	1.312.531	5.042.596					
PPSDMPL			Jakarta Pusat	Dok	5	5	5	5	5	647.766	641.767	1.190.503	1.250.029	1.312.531	5.042.596				PPSDMPL
12-0317	A. Workshop Penyusunan Standar Mutu Pendidikan Kepelautan			Dok	1					99.030	0	99.030	103.982	109.181	411.223		RM	Non-Ops	
12-0318	B. Workshop Magang Taruna dan Dosen			Dok	1					157.400	0	157.400	165.270	173.534	653.604		RM	Non-Ops	
12-0319	C. Workshop Penyusunan Instrumen Audit Monev Diklat sesuai QSS			Dok	1	1	1	1	1	99.030	166.620	166.620	174.951	183.699	790.920		RM	Non-Ops	
12-0320	D. Workshop Pola Asuh Taruna			Dok	1					193.276	0	193.276	202.940	213.087	802.579		RM	Non-Ops	
12-0321	E. Workshop untuk standarisasi pemakaian laboratorium pada diklat kepelautan.			Dok	1					99.030	0	99.030	103.982	109.181	411.223		RM	Non-Ops	
12-0322	F. Penyusunan Workshop Pelaksanaan Wisuda / Sidang Senat			Dok		1	1	1	1	0	88.084	88.084	92.488	97.112	365.768		RM	Non-Ops	

dalam ribu rupiah																		
PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT			Lokasi	Satuan	TARGET					INDIKASI PENDANAAN							UPT	
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	S.D		J.B
	12-0323	G. Refresing dan Improvement Kompetensi Fungsi Navigasi Nautika, Fungsi Marine Engineering, Fungsi Kepelabuhanan		Dok		1	1	1	1	0	138.916	138.916	145.862	153.155	576.849	RM	Non-Ops	
	12-0324	H. Workshop Instrumen Kepuasan Pengguna Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran		Dok		1	1	1	1	0	125.089	125.089	131.343	137.910	519.431	RM	Non-Ops	
	12-0325	I. Workshop Penyusunan Pedoman Penelitian		Dok		1	1	1	1	0	123.058	123.058	129.211	135.672	510.999	RM	Non-Ops	
Komponen: [1975.ADD.004.053] Standar Pengabdian Kepada Masyarakat				Dok	1	2	2	2	2	135.035	345.008	345.008	362.258	380.371	1.567.680			
PPSDMPL			Jakarta Pusat	Dok	1	2	2	2	2	135.035	345.008	345.008	362.258	380.371	1.567.680			PPSDMPL
	12-0326	A. Workshop Penyusunan Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat		Dok		1	1	1	1	0	121.308	121.308	127.373	133.742	503.731	RM	Non-Ops	
	12-0327	B. Workshop Evaluasi Pelaksanaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM)		Dok	1	1	1	1	1	135.035	223.700	223.700	234.885	246.629	1.063.949	RM	Non-Ops	
Komponen: [1975.ADD.004.054] Pendampingan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan				Dok	5	5	5	5	5	933.641	648.866	815.350	856.118	898.924	4.152.899			
PPSDMPL			Jakarta Pusat	Dok	5	5	5	5	5	933.641	648.866	815.350	856.118	898.924	4.152.899			PPSDMPL
	12-0328	A. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Diklat Keahlian Pelaut		Dok	1	1	1	1	1	211.496	111.088	111.088	116.642	122.474	672.788	RM	Non-Ops	
	12-0329	B. Pendampingan Audit Surveillance Diklat Keahlian Pelaut		Dok	1	1	1	1	1	224.988	231.850	231.850	243.443	255.615	1.187.746	RM	Non-Ops	
	12-0330	C. Pelaksanaan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Diklat Keterampilan Pelayaran berbasis STCW 2010		Dok	1	1	1	1	1	190.529	118.716	118.716	124.652	130.885	683.498	RM	Non-Ops	
	12-0331	D. Pembinaan Standarisasi dan Pengembangan Diklat Keterampilan Pelayaran		Dok	1	1	1	1	1	166.484	0	166.484	174.808	183.548	691.324	RM	Non-Ops	
	12-0332	E. Pendampingan Audit Surveillance Diklat Keterampilan Pelaut		Dok	1	1	1	1	1	140.144	187.212	187.212	196.573	206.402	917.543	RM	Non-Ops	
Rincian Output: [1975.ADD.005] Standarisasi Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pendidikan Transportasi Laut				Dok	6	8	8	8	8	921.936	983.968	1.299.316	1.364.282	1.432.497	6.001.999			
Indikator Output: Jumlah Standarisasi Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pendidikan Transportasi Laut				Dok	6	8	8	8	8	921.936	983.968	1.299.316	1.364.282	1.432.497	6.001.999			
Komponen: [1975.ADD.005.051] Pemantauan dan Pelaporan Diklat Perhubungan				Dokumen	0	0	0	0	0	800.514	983.968	1.177.894	1.236.789	1.298.629	5.497.794			
PPSDMPL			Jakarta Pusat	Dokumen	0	0	0	0	0	800.514	983.968	1.177.894	1.236.789	1.298.629	5.497.794			PPSDMPL
	12-0333	A. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Diklat Keterampilan Pelaut		Dok	1	1	1	1	1	136.766	171.438	171.438	180.010	189.011	848.663	RM	Non-Ops	
	12-0334	B. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM)		Dok	1	1	1	1	1	141.478	183.516	183.516	192.692	202.327	903.529	RM	Non-Ops	
	12-0335	C. Konsinyering Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Diklat Keterampilan Pelaut		Dok	1	1	1	1	1	118.626	91.458	91.458	96.031	100.833	498.406	RM	Non-Ops	
	12-0336	D. Monitoring, Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepelautan		Dok	1	1	1	1	1	209.718	128.842	128.842	135.284	142.048	744.734	RM	Non-Ops	
	12-0337	E. Konsinyering Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Keahlian Pelaut		Dok	1					193.926	0	193.926	203.622	213.803	805.277	RM	Non-Ops	
	12-0338	F. Monitoring Evaluasi Operasional Kapal Latih		Dok		1	1	1	1	0	112.884	112.884	118.528	124.454	468.750	RM	Non-Ops	
	12-0339	G. Pendampingan Pelaksanaan SIPENCATAR		Dok		1	1	1	1	0	124.442	124.442	130.664	137.197	516.745	RM	Non-Ops	
	12-0340	H. Penyusunan Pedoman untuk Prala di UPT Matra Laut		Dok		1	1	1	1	0	95.994	95.994	100.794	105.834	398.616	RM	Non-Ops	
	12-0341	I. Konsinyering Evaluasi Pelaksanaan Magang Taruna dan Dosen		Dok		1	1	1	1	0	75.394	75.394	79.164	83.122	313.074	RM	Non-Ops	

</

dalam ribu rupiah																		
PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT			Lokasi	Satuan	TARGET					INDIKASI PENDANAAN							UPT	
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	S.D		J.B
	12-0386	C. Proyektor		Unit			1			0	0	15.000	0	0	15.000	RM	Modal	
	12-0387	D. AC Split		Unit			6		4	0	0	50.000	0	32.000	82.000	RM	Modal	
	12-0388	Sound System (1 set)		Unit				1		0	0	0	75.000	0	75.000	RM	Modal	
	12-0389	F. Buku IMO		Unit		13	13	13	13	0	52.000	0	0	52.000	104.000	RM	Modal	
	12-0390	G. Lemari Arsip		Unit				3		0	0	0	30.000	0	30.000	RM	Modal	
	12-0391	H. TV LED		Unit				4		0	0	0	60.000	0	60.000	RM	Modal	
	Rincian Output: [1975.EBB.971] Layanan Prasarana Internal			Unit	0	0	0	1	0	0	0	0	950.000	0	950.000			
Indikator Output: Jumlah Layanan Sarana Internal			Unit	0	0	0	1	0	0	0	0	950.000	0	950.000				
Komponen: [1975.EBB.971.051] Bangunan Baru dan Renovasi				Unit	0	0	0	1	0	0	0	0	950.000	0	950.000			
PPSDMPL			Jakarta Pusat	Unit	0	0	0	1	0	0	0	0	950.000	0	950.000			PPSDMPL
	12-0392	A. Renovasi Ruang Rapat/Fasilitas Penunjang		Unit				1		0	0	0	950.000	0	950.000	RM	Modal	
Indikator Kegiatan: [IKK 19] Persentase Kerja Sama di bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN Perhubungan dengan stakeholder Transportasi dan Pendidikan				%	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	603.996	860.520	860.520	903.545	1.198.721	4.427.302			
Klasifikasi Rincian Output: [1975.AEC] Kerjasama				Kesepakatan	2	5	5	5	5	603.996	860.520	860.520	903.545	1.198.721	4.427.302			
Rincian Output: [1975.AEC.002] Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Laut				Kesepakatan	2	5	5	5	5	603.996	860.520	860.520	903.545	1.198.721	4.427.302			
Indikator Output: Jumlah Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Laut				Kesepakatan	2	5	5	5	5	603.996	860.520	860.520	903.545	1.198.721	4.427.302			
Komponen: [1975.AEC.002.052] Kerjasama Luar Negeri				Kesepakatan	2	5	5	5	5	603.996	860.520	860.520	903.545	1.198.721	4.427.302			
PPSDMPL			Jakarta Pusat	Kesepakatan	2	5	5	5	5	603.996	860.520	860.520	903.545	1.198.721	4.427.302			PPSDMPL
	12-0343	A. Mengikuti Sidang Sub Committee on Human Element, Training and Watckeping (HTW)		Kesepakatan	1	1	1	1	1	256.528	133.624	133.624	140.305	147.320	811.401	RM	Non-Ops	
	12-0344	B. Mengikuti Sidang Maritime Safety Committee (MSC)		Kesepakatan	1	1	1	1	1	347.468	179.094	179.094	188.049	197.451	1.091.156	RM	Non-Ops	
	12-0345	C. Mengikuti Sidang Marine Environmental Protection Committee (MEPC) 84		Kesepakatan		1	1	1	1	0	154.309	154.309	162.024	170.125	640.767	RM	Non-Ops	
	12-0346	D. Mengikuti Sidang Technical Cooperation Committee (TCC) 76		Kesepakatan		1	1	1	1	0	154.309	154.309	162.024	170.125	640.767	RM	Non-Ops	
	12-0347	E. Mengikuti Sidang Council 135		Kesepakatan		1	1	1	1	0	239.184	239.184	251.143	263.700	993.211	RM	Non-Ops	
	12-0348	F. Mengikuti Sidang Assembly		Kesepakatan						0	0	0	0	250.000	250.000	RM	Non-Ops	
Sasaran Strategis: [SSp 6] Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan										21.531.589	26.481.300	26.876.816	28.186.063	29.954.528	133.030.296			
Indikator Strategis: [IKSSp 6.1] Indeks RB Kementerian Perhubungan										21.531.589	26.481.300	26.876.816	28.186.063	29.954.528	133.030.296			
Program: [WA] Dukungan Manajemen										21.531.589	26.481.300	26.876.816	28.186.063	29.954.528	133.030.296			
Prioritas Kementerian Perhubungan										21.531.589	26.481.300	26.876.816	28.186.063	29.954.528	133.030.296			
Sasaran Program: [SP 4] Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik di BPSDMP										21.531.589	26.481.300	26.876.816	28.186.063	29.954.528	133.030.296			

dalam ribu rupiah																		
PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT			Lokasi	Satuan	TARGET				INDIKASI PENDANAAN							UPT		
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029		S.D	J.B
Indikator Program: [IKP 4] Indeks Tata Kelola Lembaga BPSDMP				Nilai	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	21.531.589	26.481.300	26.876.816	28.186.063	29.954.528	133.030.296			
Kegiatan: [4626] Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi										1.037.895	3.347.350	3.347.350	3.514.722	4.049.619	15.296.936			
Sasaran Kegiatan: [SK 09] Terwujudnya Organisasi yang Agile dan SDM Unggul										1.037.895	3.347.350	3.347.350	3.514.722	4.049.619	15.296.936			
Indikator Kegiatan: [IKK 22] Indeks Profesionalisme ASN				Indeks	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	1.037.895	3.347.350	3.347.350	3.514.722	4.049.619	15.296.936			
Klasifikasi Rincian Output: [4626.EBC] Layanan Manajemen SDM Internal				Orang	0	0	0	0	0	1.037.895	3.347.350	3.347.350	3.514.722	4.049.619	15.296.936			
Rincian Output: [4626.EBC.954] Layanan Manajemen SDM Internal				Orang	0	0	0	0	0	1.037.895	3.347.350	3.347.350	3.514.722	4.049.619	15.296.936			
Indikator Output: Jumlah Layanan Manajemen SDM				Orang	0	0	0	0	0	1.037.895	3.347.350	3.347.350	3.514.722	4.049.619	15.296.936			
Komponen: [4626.EBC.954.051] Layanan Kepegawaian			Jakarta Pusat	Orang	0	0	0	0	0	1.037.895	3.347.350	3.347.350	3.514.722	4.049.619	15.296.936			
				PPSDMPL	Orang	0	0	0	0	0	1.037.895	3.347.350	3.347.350	3.514.722	4.049.619	15.296.936		
	12-0393	A. Bimbingan Teknis Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen	1	1	1	1	1	116.732	0	0	0	116.732	233.464	RM	Non-Ops	
	12-0394	B. Sosialisasi Peraturan Kepegawaian		Dokumen	1	1	1	1	1	92.426	0	0	0	92.426	184.852	RM	Non-Ops	
	12-0395	C. Sosialisasi Jabatan Fungsional		Dokumen	1	1	1	1	1	109.538	157.232	157.232	165.094	173.349	762.445	RM	Non-Ops	
	12-0396	D. Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Terpadu		Dokumen	1	1	1	1	1	173.748	186.224	186.224	195.535	205.312	947.043	RM	Non-Ops	
	12-0397	E. Peningkatan Motivasi Bagi Pegawai (Capacity Building)		Dokumen	1	1	1	1	1	244.785	1.082.900	1.082.900	1.137.045	1.343.897	4.891.527	RM	Non-Ops	
	12-0398	F. Pembinaan Kesamaptaan Pegawai (Jiwa Korsa)		Dokumen		1	1	1	1	0	495.460	495.460	520.233	546.245	2.057.398	RM	Non-Ops	
	12-0399	G. Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHKPN dan LHKASN		Dokumen		1	1	1	1	0	24.810	24.810	26.051	27.354	103.025	RM	Non-Ops	
	12-0400	H. Penyusunan Formasi Kepegawaian Terpadu		Dokumen		1	1	1	1	0	24.810	24.810	26.051	27.354	103.025	RM	Non-Ops	
	12-0401	I. Pengelolaan Aplikasi Database Kepegawaian		Dokumen		1	1	1	1	0	24.810	24.810	26.051	27.354	103.025	RM	Non-Ops	
	12-0402	J. Pelaksanaan Pensiun Pegawai		Dokumen		1	1	1	1	0	23.310	23.310	24.476	25.700	96.796	RM	Non-Ops	
	12-0403	K. Penataan Organisasi dan Tata Laksana		Dokumen		1	1	1	1	0	46.620	46.620	48.951	51.399	193.590	RM	Non-Ops	
	12-0404	L. Workshop Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai		Dokumen		1	1	1	1	0	200.730	200.730	210.767	221.305	833.532	RM	Non-Ops	
	12-0405	M. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Dokumen		1	1	1	1	0	23.050	23.050	24.203	25.413	95.716	RM	Non-Ops	
	12-0406	N. Unit Kepatuhan Internal (UKI)		Dokumen		1	1	1	1	0	24.810	24.810	26.051	27.354	103.025	RM	Non-Ops	
	12-0407	O. Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan Unit Kepatuhan Internal		Dokumen		1	1	1	1	0	24.810	24.810	26.051	27.354	103.025	RM	Non-Ops	
	12-0408	P. Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Pegawai		Dokumen		1	1	1	1	0	420.990	420.990	442.040	464.142	1.748.162	RM	Non-Ops	
	12-0409	Q. Standar Manajemen Mutu ISO		Dokumen	1	1	1	1	1	300.666	586.784	586.784	616.123	646.929	2.737.286	RM	Non-Ops	
Kegiatan: [4627] Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum SDM Transportasi										20.493.694	23.133.950	23.529.466	24.671.341	25.904.909	117.733.360			

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT			Lokasi	Satuan	TARGET				INDIKASI PENDANAAN							UPT		
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029		S.D	J.B
Sasaran Kegiatan: [SK 10] Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Berorientasi pada Layanan Prima									20.493.694	23.133.950	23.529.466	24.671.341	25.904.909	117.733.360				
Indikator Kegiatan: [IKK 24] Persentase Pemenuhan Akuntabilitas di Lingkungan BPSDMP				%	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	16.725.041	17.592.344	17.682.084	18.531.589	19.458.169	89.989.227			
Klasifikasi Rincian Output: [4627.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal				Layanan	4	4	4	4	4	16.725.041	17.592.344	17.682.084	18.531.589	19.458.169	89.989.227			
Rincian Output: [4627.EBA.962] Layanan Umum				Layanan	0	0	0	0	0	2.056.005	2.138.296	2.228.036	2.304.838	2.420.079	11.147.254			
Indikator Output: Jumlah Layanan Umum				Layanan	0	0	0	0	0	2.056.005	2.138.296	2.228.036	2.304.838	2.420.079	11.147.254			
Komponen: [4627.EBA.962.052] Layanan Umum dan Perlengkapan			Jakarta Pusat	Layanan	0	0	0	0	0	2.056.005	2.138.296	2.228.036	2.304.838	2.420.079	11.147.254			PPSDMPL
				PPSDMPL	0	0	0	0	0	2.056.005	2.138.296	2.228.036	2.304.838	2.420.079	11.147.254			
12-0410	A. Rapat-Rapat Koordinasi/ Kerja /Dinas /Staf	Dokumen		1	1	1	1	1	1.244.894	1.134.382	1.186.382	1.211.101	1.271.656	6.048.415	RM	Non-Ops		
12-0411	B. Kehumasan Dan Publikasi	Dokumen		1	1	1	1	1	149.316	29.820	29.820	31.311	32.877	273.144	RM	Non-Ops		
12-0412	C. Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID)	Dokumen		1	1	1	1	1	12.699	5.759	5.759	6.047	6.349	36.613	RM	Non-Ops		
12-0413	D. Penyusutan / Pemusnahan Arsip	Dokumen		1	1	1	1	1	37.740	0	37.740	39.627	41.608	156.715	RM	Non-Ops		
12-0414	E. Monitoring Kearsipan	Dokumen			1	1	1	1	0	53.190	53.190	55.850	58.643	220.873	RM	Non-Ops		
12-0415	F. Pengelolaan Penataan Arsip di Gedung Arsip	Dokumen		1	1	1	1	1	208.960	80.480	80.480	84.504	88.729	543.153	RM	Non-Ops		
12-0416	G. Sosialisasi Aplikasi Srikandi (Kearsipan)	Dokumen		1	1	1	1	1	93.740	129.160	129.160	135.618	142.399	630.077	RM	Non-Ops		
12-0417	H. Penyusunan Strakom	Dokumen			1	1	1	1	0	106.549	106.549	111.876	117.470	442.444	RM	Non-Ops		
12-0418	I. Pelaksanaan Pameran	Dokumen			1	1	1	1	0	268.085	268.085	281.489	295.563	1.113.222	RM	Non-Ops		
12-0419	J. Edu Maritime On The Road	Dokumen		1	1	1	1	1	111.286	142.101	142.101	149.206	156.666	701.360	RM	Non-Ops		
12-0420	K. General Medical Chekup	Dokumen	1	1	1	1	1	197.370	188.770	188.770	198.209	208.119	981.238	RM	Non-Ops			
Rincian Output: [4627.EBA.994] Layanan Perkantoran				Layanan	4	4	4	4	4	14.669.036	15.454.048	15.454.048	16.226.751	17.038.090	78.841.973			
Indikator Output: Jumlah Layanan Perkantoran				Layanan	4	4	4	4	4	14.669.036	15.454.048	15.454.048	16.226.751	17.038.090	78.841.973			
Komponen: [4627.EBA.994.001] Gaji dan Tunjangan			Jakarta Pusat	Layanan	0	0	0	0	0	10.513.410	11.482.012	11.482.012	12.056.113	12.658.919	58.192.466			PPSDMPL
				PPSDMPL	0	0	0	0	0	10.513.410	11.482.012	11.482.012	12.056.113	12.658.919	58.192.466			
12-0421	A. Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Tahun		1	1	1	1	1	10.513.410	11.482.012	11.482.012	12.056.113	12.658.919	58.192.466	RM	Pegawai		
Komponen: [4627.EBA.994.002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor			Jakarta Pusat	Layanan	4	4	4	4	4	4.155.626	3.972.036	3.972.036	4.170.638	4.379.171	20.649.507			PPSDMPL
				PPSDMPL	4	4	4	4	4	4.155.626	3.972.036	3.972.036	4.170.638	4.379.171	20.649.507			
12-0422	A. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	2.428.660	2.582.272	2.582.272	2.711.386	2.846.955	13.151.545	RM	Ops		
12-0423	B. Langganan Daya dan Jasa	Layanan		1	1	1	1	1	387.000	373.800	373.800	392.490	412.115	1.939.205	RM	Ops		
12-0424	C. Pemeliharaan Kantor	Layanan		1	1	1	1	1	1.219.726	895.724	895.724	940.510	987.536	4.939.220	RM	Ops		
12-0425	D. Pembayaran Terkait Operasional Kantor	Layanan		1	1	1	1	1	120.240	120.240	120.240	126.252	132.565	619.537	RM	Ops		
Indikator Kegiatan: [IKK 26] Nilai SAKIP				Nilai	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00	2.915.124	3.766.208	3.904.906	4.100.152	4.305.160	18.991.550			

dalam ribu rupiah																		
PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN / INDIKATOR / OUTPUT			Lokasi	Satuan	TARGET					INDIKASI PENDANAAN							UPT Pelaksana	
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	S.D		J.B
Klasifikasi Rincian Output: [4627.EBD] Layanan Manajemen Kinerja Internal				Dokumen	24	30	30	30	30	2.915.124	3.766.208	3.904.906	4.100.152	4.305.160	18.991.550			
Rincian Output: [4627.EBD.952] Layanan Perencanaan dan Penganggaran				Dokumen	11	11	11	11	11	1.953.147	2.876.576	3.015.274	3.166.038	3.324.340	14.335.375			
Indikator Output: Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran				Dokumen	11	11	11	11	11	1.953.147	2.876.576	3.015.274	3.166.038	3.324.340	14.335.375			
Komponen: [4627.EBD.952.051] Layanan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran				Dokumen	9	9	9	9	9	1.669.649	2.629.448	2.629.448	2.760.921	2.898.967	12.588.433			
12-2860	Penyusunan Key Performance Indicator (KPI)		Kab.	Orang	0	1	1	1	1	0	43.660	43.660	82.388	82.388	252.096	BLU	Non-Ops	Poltekpel
PPSDMPL			Jakarta Pusat	Dokumen	9	9	9	9	9	1.669.649	2.629.448	2.629.448	2.760.921	2.898.967	12.588.433			PPSDMPL
12-0426	A. Renstra/Reviu			Dokumen	1	1	1	1	1	243.524	261.884	261.884	274.978	288.727	1.330.997	RM	Non-Ops	
12-0427	B. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)			Dokumen	1	1	1	1	1	35.056	69.624	69.624	73.105	76.760	324.169	RM	Non-Ops	
12-0428	C. Penyusunan RKAKL Pagu Kebutuhan			Dokumen	1	1	1	1	1	177.154	371.632	371.632	390.214	409.725	1.720.357	RM	Non-Ops	
12-0429	D. Penyusunan RKAKL Pagu Indikatif			Dokumen	1	1	1	1	1	333.099	521.096	521.096	547.151	574.509	2.496.951	RM	Non-Ops	
12-0430	E. Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran			Dokumen	1	1	1	1	1	236.105	361.380	361.380	379.449	398.421	1.736.735	RM	Non-Ops	
12-0431	F. Penyusunan RKAKL Pagu Alokasi Anggaran			Dokumen	1	1	1	1	1	261.553	404.860	404.860	425.103	446.358	1.942.734	RM	Non-Ops	
12-0432	G. Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran SAKTI			Dokumen	1	1	1	1	1	122.230	210.016	210.016	220.517	231.543	994.322	RM	Non-Ops	
12-0433	H. Evaluasi Kegiatan dan persiapan perencanaan Tahun 2026			Dokumen	1	1	1	1	1	122.230	210.016	210.016	220.517	231.543	994.322	RM	Non-Ops	
12-0434	I. Pendampingan Rencana Kerja Anggaran UPT Matra Laut			Dokumen	1	1	1	1	1	138.698	218.940	218.940	229.887	241.381	1.047.846	RM	Non-Ops	
Komponen: [4627.EBD.952.052] Layanan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)				Dokumen	2	2	2	2	2	283.498	247.128	385.826	405.117	425.373	1.746.942			
PPSDMPL			Jakarta Pusat	Dokumen	2	2	2	2	2	283.498	247.128	385.826	405.117	425.373	1.746.942			PPSDMPL
12-0435	A. Kegiatan Sosialisasi/Bimtek SPIP/Manajemen Resiko			Dokumen	1	1	1	1	1	144.800	247.128	247.128	259.484	272.458	1.170.998	RM	Non-Ops	
12-0436	B. Monitoring dan Evaluasi SPIP			Dokumen	1	1	1	1	1	138.698	0	138.698	145.633	152.915	575.944	RM	Non-Ops	
Rincian Output: [4627.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi				Dokumen	7	7	7	7	7	961.977	889.632	889.632	934.114	980.820	4.656.175			
Indikator Output: Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi				Dokumen	7	7	7	7	7	961.977	889.632	889.632	934.114	980.820	4.656.175			
Komponen: [4627.EBD.953.051] Layanan Pemantauan dan Evaluasi				Dokumen	7	7	7	7	7	961.977	889.632	889.632	934.114	980.820	4.656.175			
PPSDMPL			Jakarta Pusat	Dokumen	7	7	7	7	7	961.977	889.632	889.632	934.114	980.820	4.656.175			PPSDMPL
12-0437	A. Penyusunan LAPTAH			Dokumen	1	1	1	1	1	128.690	228.096	228.096	239.501	251.476	1.075.859	RM	Non-Ops	
12-0438	B. Penyusunan LAKIP			Dokumen	1	1	1	1	1	143.040	38.096	38.096	40.001	42.001	301.234	RM	Non-Ops	
12-0439	C. Penyusunan Laporan Movev PP 39/ 2006			Dokumen	1	1	1	1	1	172.037	30.096	30.096	31.601	33.181	297.011	RM	Non-Ops	
12-0440	D. Penyusunan Statistik			Dokumen	1	1	1	1	1	157.312	63.120	63.120	66.276	69.590	419.418	RM	Non-Ops	
12-0441	E. Penetapan Kinerja (PK)			Dokumen	1	1	1	1	1	23.080	68.624	68.624	72.055	75.658	308.041	RM	Non-Ops	
12-0442	F. Pelaksanaan MONEV			Dokumen	1	1	1	1	1	195.754	419.956	419.956	440.954	463.002	1.939.622	RM	Non-Ops	
12-0443	G. Konsinyering Pengisian Laporan SMART DJA			Dokumen	1	1	1	1	1	142.064	41.644	41.644	43.726	45.912	314.990	RM	Non-Ops	

</

LAMPIRAN III

Keputusan Kepala Pusat Pengembangan
SDM Perhubungan Laut

Nomor : KP – PPSDMPL 240 TAHUN 2025

Tanggal: 01 Oktober 2025

Tentang: Rencana Strategis Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan Tahun 2025-2029

MANUAL PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA RENSTRA

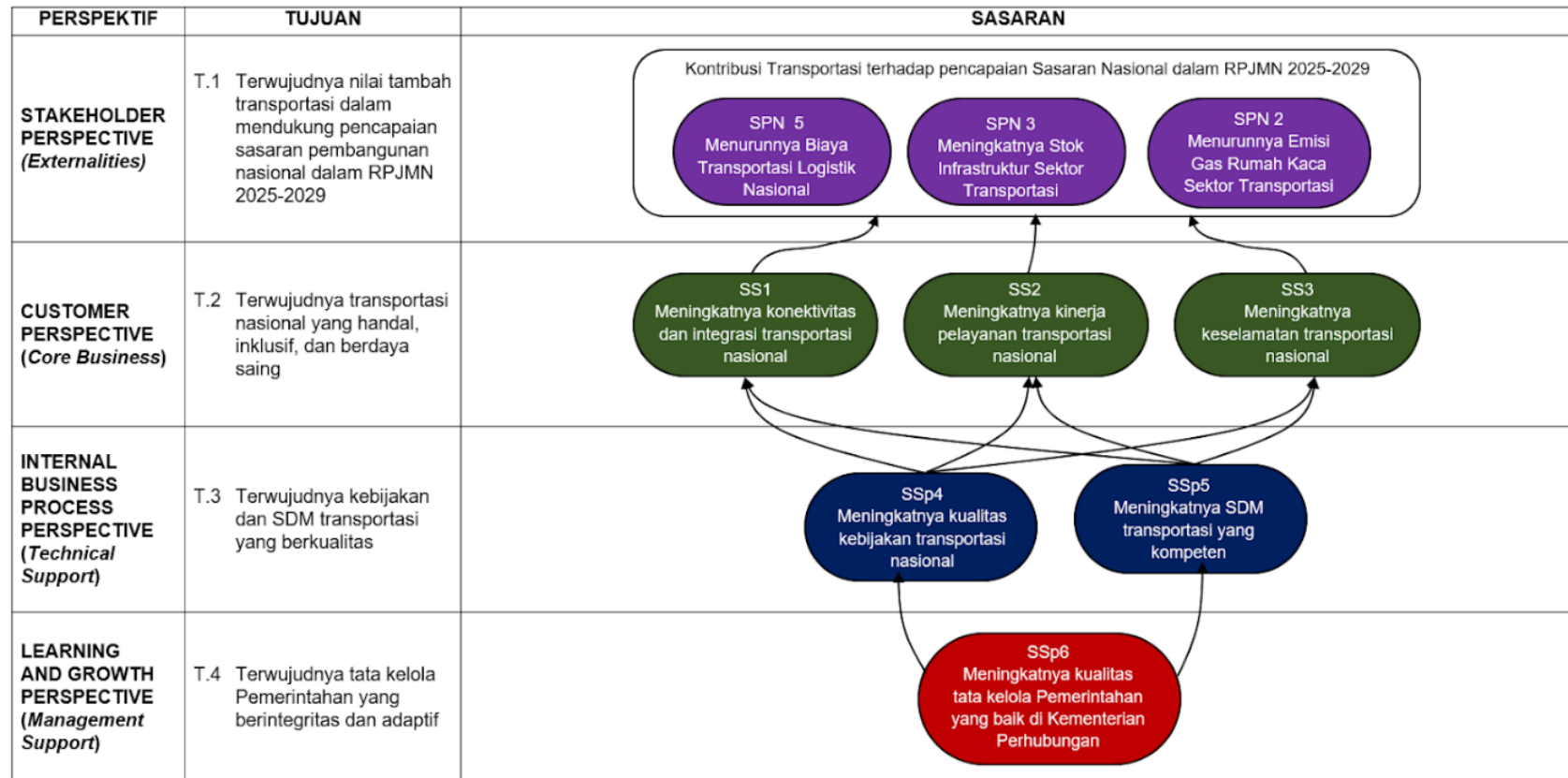
**PUSAT PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT
TAHUN 2025 - 2029**

**MANUAL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029**

Peta Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029

Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029:

Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045



PERSPEKTIF	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM (SP)
Stakeholder Perspective	T.0 Terwujudnya SDM Transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran nasional (SN)	Visi 2025-2029: "Terwujudnya SDM Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045" SS 5
Customer Perspective	T.1 Terwujudnya SDM transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing.	SP1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Transportasi yang Kompeten SP2 Meningkatnya Kualitas Pengembangan Program Studi, Jenis Pelatihan, Pelayanan, dan Penyerapan Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi SP3 Meningkatnya kualitas Penjaminan mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi pada Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL) dan Lembaga Diklat Pelatihan Transportasi
Internal Business Process Perspective	T.2 Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas	
Learning And Growth Perspective	T.3 Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan	SP4 Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di BPSDMP SS 6

Indikator kinerja sasaran Program Pengembangan SDM Perhubungan 2025-2029

Keterangan:

 = Kelompok dukungan Sasaran Program BPSDMP terhadap Sasaran Strategis 5 Kemenhub

 = Kelompok dukungan Sasaran Program BPSDMP terhadap Sasaran Strategis 6 Kemenhub

TARGET CAPAIAN INDIKATOR BPSDMP 2025-2029

IKSS	TUJUAN	SP	IKP	SK	IKK	INDIKATOR	TARGET				
						URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029
IKSSp. 5						Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50
	T 1					Terwujudnya SDM transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing.					
		SP 1				Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten					
			IKP 1			Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50
				SK 1		Meningkatnya Kompetensi SDM Transportasi Darat/Laut/Udara					
					IKK 1.	Tingkat Penyerapan Diklat Pembentukan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara yang Berkompetensi	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
					IKK 2.	Tingkat lulusan SDM transportasi yang bersertifikat kompetensi	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00
					IKK 3.	Persentase Peserta Diklat Transportasi	91,20	92,00	92,80	93,60	94,40
					IKK 4.	Tingkat Pemenuhan Akreditasi dan Sertifikasi	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00
					IKK 5.	Indeks Peningkatan SDM Transportasi	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50
				SK 2		Meningkatnya Kompetensi ASN Transportasi					
					IKK 6.	Tingkat Pemenuhan ASN Transportasi Program Pembentukan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					IKK 7.	Tingkat Pemenuhan ASN Transportasi Program Pelatihan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				SK 3		Meningkatnya Kompetensi SDM Transportasi					
					IKK 8.	Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Program Pembentukan	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00
					IKK 9.	Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Program Pelatihan	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00
	T 2.					Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas					
		SP. 2				Meningkatnya Kualitas Pengembangan Program Studi, Jenis Pelatihan, Pelayanan, Penelitian dan Penyerapan Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi					
			IKP 2			Indeks Kualitas Program dan Pelayanan	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00
				SK 4		Meningkatnya Akreditasi Lembaga Pendidikan Vokasi, Sertifikasi Pelatihan dan Tenaga Kerja Sektor Transportasi Darat/Laut/Udara					
					IKK 10.	Tingkat Pemenuhan Sertifikasi Pelatihan oleh Lembaga yang Berwenang	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00
					IKK 11.	Persentase penelitian, HAKI dan Produk Inovasi Dosen dan Mahasiswa	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00
					IKK 12.	Persentase magang dosen di bidang transportasi	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00
					IKK 13.	Persentase kegiatan pengabdian Masyarakat yang berdampak di bidang transportasi	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00

IKSS	TUJUAN	SP	IKP	SK	IKK	INDIKATOR	TARGET				
						URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029
					IKK 14.	Persentase kualitas dan kuantitas dosen	65,00	65,50	66,00	66,50	67,00
				SK 5		Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat/Laut/Udara					
					IKK 15.	Tingkat Kualitas Layanan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara	3,05	3,10	3,15	3,20	3,25
					IKK 16.	Persentase Kerjasama di bidang Pendidikan dan pelatihan dengan stakeholder transportasi dan pendidikan	80,00	80,05	81,00	81,50	82,00
		SP 3.				Meningkatnya kualitas Penjaminan mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi pada Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL) dan Lembaga Diklat Pelatihan Transportasi					
			IKP 3			Indeks Penjaminan Mutu	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00
				SK 6		Terwujudnya Kebijakan Pengembangan SDM yang Menunjang Kebijakan Sektor Transportasi Darat/Laut/Udara					
					IKK 17.	Indeks Kebijakan Pengembangan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				SK 7		Meningkatnya kualitas evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan BPSDMP					
					IKK 18.	Tingkat Pemenuhan Evaluasi dan Sistem Informasi Diklat Transportasi	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00
					IKK 19.	Persentase Kerja Sama di Bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN Perhubungan dengan stakeholder Transportasi dan Pendidikan	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00
IKSSp. 6						Indeks RB Kementerian Perhubungan					
	T 3.					Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan					
		SP 4				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola yang Baik di BPSDMP					
			IKP 4			Indeks Tata Kelola Lembaga BPSDMP	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00
				SK 8		Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan					
					IKK 20.	Persentase Peserta Pelatihan Aparatur	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00
					IKK 21.	Indeks Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				SK 9		Terwujudnya Organisasi yang Agile dan SDM Unggul					
					IKK 22.	Indeks Profesionalisme ASN	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00
					IKK 23.	Indeks Regulasi BPSDMP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				SK 10		Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Berorientasi pada Layanan Prima					
					IKK 24.	Persentase Pemenuhan Akuntabilitas di Lingkungan BPSDMP	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00
					IKK 25.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00

IKSS	TUJUAN	SP	IKP	SK	IKK	INDIKATOR	TARGET				
						URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029
					IKK 26.	Nilai SAKIP	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00
				SK 11		Meningkatnya kualitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik SDM transportasi					
					IKK 27.	Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik di Lingkungan BPSDMP	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00
				SK 12		Meningkatnya Kapabilitas Kerja sama dan Kemitraan BPSDMP					
					IKK 28.	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama dan Kemitraan	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00

Pembagian Satuan Kerja Pengampu Indikator

Badan Pengembangan SDM Perhubungan			
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Keterangan
1.	SP 1. Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten	IKP 1. Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten	Prioritas Nasional
2.	SP 2. Meningkatnya Kualitas Pengembangan Program Studi, Jenis Pelatihan, Pelayanan, Penelitian dan Penyerapan Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi	IKP 2. Indeks Kualitas Program dan Pelayanan	
3.	SP 3. Meningkatnya kualitas Penjaminan mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi pada Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL) dan Lembaga Diklat Pelatihan Transportasi	IKP 3. Indeks Penjaminan Mutu	
4.	SP 4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola yang Baik di BPSDMP	IKP 4. Indeks Tata Kelola Lembaga BPSDMP	

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat, Laut, dan Udara

SK	IKK	INDIKATOR	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 2		Meningkatnya Kompetensi ASN Transportasi					
	IKK 7.	Tingkat Pemenuhan ASN Transportasi Program Pelatihan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SK 6		Terwujudnya Kebijakan Pengembangan SDM yang Menunjang Kebijakan Sektor Transportasi Darat/Laut/Udara					
	IKK 17.	Indeks Kebijakan Pengembangan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SK 7		Meningkatnya kualitas evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan BPSDMP					
	IKK 18.	Tingkat Pemenuhan Evaluasi dan Sistem Informasi Diklat Transportasi	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00
	IKK 19.	Persentase Kerja Sama di Bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN Perhubungan dengan stakeholder Transportasi dan Pendidikan	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00
SK 9		Terwujudnya Organisasi yang Agile dan SDM Unggul					
	IKK 22.	Indeks Profesionalisme ASN	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00
SK 10		Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Berorientasi pada Layanan Prima					
	IKK 24.	Persentase Pemenuhan Akuntabilitas di Lingkungan BPSDMP	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00
	IKK 25.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00
	IKK 26.	Nilai SAKIP	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00

Sekolah Tinggi, Politeknik, dan Akademi

SK	IKK	INDIKATOR	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 1		Meningkatnya Kompetensi SDM Transportasi Darat/Laut/Udara					
	IKK 1.	Tingkat Penyerapan Diklat Pembentukan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara yang Berkompetensi	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	IKK 2.	Tingkat lulusan SDM transportasi yang bersertifikat kompetensi	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00
	IKK 3.	Persentase Peserta Diklat Transportasi	91,20	92,00	92,80	93,60	94,40
	IKK 4.	Tingkat Pemenuhan Akreditasi dan Sertifikasi	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00
	IKK 5.	Indeks Peningkatan SDM Transportasi	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50
SK 2		Meningkatnya Kompetensi ASN Transportasi					
	IKK 6.	Tingkat Pemenuhan ASN Transportasi Program Pembentukan*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	IKK 7.	Tingkat Pemenuhan ASN Transportasi Program Pelatihan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SK 3		Meningkatnya Kompetensi SDM Transportasi					
	IKK 8.	Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Program Pembentukan	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00
	IKK 9.	Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Program Pelatihan	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00
SK 4		Meningkatnya Akreditasi Lembaga Pendidikan Vokasi, Sertifikasi Pelatihan dan Tenaga Kerja Sektor Transportasi Darat/Laut/Udara					
	IKK 10.	Tingkat Pemenuhan Sertifikasi Pelatihan oleh Lembaga yang Berwenang	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00
	IKK 11.	Persentase penelitian, HAKI dan Produk Inovasi Dosen dan Mahasiswa	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00
	IKK 12.	Persentase magang dosen di bidang transportasi	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00
	IKK 13.	Persentase kegiatan pengabdian Masyarakat yang berdampak di bidang transportasi	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00
	IKK 14.	Persentase kualitas dan kuantitas dosen	65,00	65,50	66,00	66,50	67,00
SK 5		Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat/Laut/Udara					
	IKK 15.	Tingkat Kualitas Layanan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara	3,05	3,10	3,15	3,20	3,25
	IKK 16.	Persentase Kerja sama di bidang Pendidikan dan pelatihan dengan stakeholder transportasi dan pendidikan	80,00	80,05	81,00	81,50	82,00
SK 9		Terwujudnya Organisasi yang Agile dan SDM Unggul					
	IKK 22.	Indeks Profesionalisme ASN	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00
SK 10		Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Berorientasi pada Layanan Prima					
	IKK 24.	Persentase Pemenuhan Akuntabilitas di Lingkungan BPSPMP	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00
	IKK 25.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00
	IKK 26.	Nilai SAKIP	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00

*Berlaku untuk Satuan Kerja yang memiliki program pola pembibitan

Balai Diklat Teknis

SK	IKK	INDIKATOR	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 1		Meningkatnya Kompetensi SDM Transportasi Darat/Laut/Udara					
	IKK 1.	Tingkat Penyerapan Diklat Pembentukan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara yang Berkompetensi*	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	IKK 2.	Tingkat lulusan SDM transportasi yang bersertifikat kompetensi	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00
	IKK 3.	Persentase Peserta Diklat Transportasi	91,20	92,00	92,80	93,60	94,40
	IKK 5.	Indeks Peningkatan SDM Transportasi	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50
SK 2		Meningkatnya Kompetensi ASN Transportasi					
	IKK 7.	Tingkat Pemenuhan ASN Transportasi Program Pelatihan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SK 3		Meningkatnya Kompetensi SDM Transportasi					
	IKK 8.	Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Program Pembentukan*	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00
	IKK 9.	Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Program Pelatihan	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00
SK 4		Meningkatnya Akreditasi Lembaga Pendidikan Vokasi, Sertifikasi Pelatihan dan Tenaga Kerja Sektor Transportasi Darat/Laut/Udara					
	IKK 10.	Tingkat Pemenuhan Sertifikasi Pelatihan oleh Lembaga yang Berwenang	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00
SK 5		Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat/Laut/Udara					
	IKK 15.	Tingkat Kualitas Layanan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara	3,05	3,10	3,15	3,20	3,25
	IKK 16.	Persentase Kerja sama di bidang Pendidikan dan pelatihan dengan stakeholder transportasi dan pendidikan	80,00	80,05	81,00	81,50	82,00
SK 9		Terwujudnya Organisasi yang Agile dan SDM Unggul					
	IKK 22.	Indeks Profesionalisme ASN	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00
SK 10		Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Berorientasi pada Layanan Prima					
	IKK 24.	Persentase Pemenuhan Akuntabilitas di Lingkungan BPSDMP	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00
	IKK 25.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00
	IKK 26.	Nilai SAKIP	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00

*Berlaku untuk BP3IP hingga peserta program pembentukan lulus

PPSDMAP

SK	IKK	INDIKATOR	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 8		Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan					
	IKK 20.	Persentase Peserta Pelatihan Aparatur	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00
	IKK 21.	Indeks Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SK 9		Terwujudnya Organisasi yang Agile dan SDM Unggul					
	IKK 22.	Indeks Profesionalisme ASN	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00
SK 10		Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Berorientasi pada Layanan Prima					
	IKK 24.	Persentase Pemenuhan Akuntabilitas di Lingkungan BPSDMP	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00
	IKK 25.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00
	IKK 26.	Nilai SAKIP	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00
SK 12		Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP					
	IKK 28.	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama dan Kemitraan	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00

BP3KSDMT

SK	IKK	INDIKATOR	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 8		Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan					
	IKK 20.	Persentase Peserta Pelatihan Aparatur	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00
SK 9		Terwujudnya Organisasi yang Agile dan SDM Unggul					
	IKK 22.	Indeks Profesionalisme ASN	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00
SK 10		Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Berorientasi pada Layanan Prima					
	IKK 24.	Persentase Pemenuhan Akuntabilitas di Lingkungan BPSDMP	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00
	IKK 25.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00
	IKK 26.	Nilai SAKIP	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00
SK 12		Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP					
	IKK 28.	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama dan Kemitraan	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00

Sekretariat

SK	IKK	INDIKATOR	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 9		Terwujudnya Organisasi yang Agile dan SDM Unggul					
	IKK 22.	Indeks Profesionalisme ASN	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00
	IKK 23.	Indeks Regulasi BPSDMP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SK 10		Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Berorientasi pada Layanan Prima					
	IKK 24.	Persentase Pemenuhan Akuntabilitas di Lingkungan BPSDMP	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00
	IKK 25.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00
	IKK 26.	Nilai SAKIP	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00
SK 11		Meningkatnya kualitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik SDM transportasi					
	IKK 27.	Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik di Lingkungan BPSDMP	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00
SK 12		Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP					
	IKK 28.	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama dan Kemitraan	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00

Cara Perhitungan Indikator

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
T1	Terwujudnya SDM transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing.					
SP 1	Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten					
IKP 1	Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50
DEFINISI						
Pemenuhan Sumber Daya Manusia dalam bidang Transportasi yang berkompeten						
SUMBER DATA						
1. Tingkat Penyerapan Diklat Pembentukan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara yang Berkompetensi 2. Tingkat lulusan SDM transportasi yang bersertifikat kompetensi 3. Persentase Peserta Diklat Transportasi 4. Tingkat Pemenuhan Akreditasi dan Sertifikasi						
CARA MENGHITUNG						
Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten: $(Cvokasi \times 15\%) + (Ckompetensi \times 35\%) + (Cpeserta \times 25\%) + (Cakreditasi \times 25\%)$ Dimana: <i>Cvokasi</i> : Tingkat Penyerapan Diklat Pembentukan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara yang Berkompetensi <i>Ckompetensi</i> : Tingkat lulusan SDM transportasi yang bersertifikat kompetensi <i>Cpeserta</i> : Persentase Peserta Diklat Transportasi <i>Cakreditasi</i> : Tingkat Pemenuhan Akreditasi dan Sertifikasi						
SATUAN						
Persen						
PENANGGUNG JAWAB DATA						
BPSDMP						
Catatan						
Indikator Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029.						

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
T2	Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas					
SP 2	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Program Studi, Jenis Pelatihan, Pelayanan, Penelitian dan Penyerapan Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi					
IKP 2	Indeks Kualitas Program dan Pelayanan	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00
DEFINISI						
Peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan yang dihitung dengan menjumlahkan indeks yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Lingkungan BPSDMP.						
SUMBER DATA						
1. Data jumlah penelitian, HAKI dan Produk Inovasi 2. Data jumlah magang dosen pada operator, regulator dan industri di bidang transportasi 3. Data kegiatan pengabdian masyarakat 4. Data rasio dosen terhadap mahasiswa, Dosen S3 dan Dosen dengan latar belakang liner pada bidang keilmuannya 5. Data kepuasan layanan peserta diklat 6. Data kerjasama yang dimiliki dan ditindaklanjuti						
CARA MENGHITUNG						
Indeks Kualitas Program dan Pelayanan: $(C_{\text{sertifikasi}} \times 20\%) + (C_{\text{penelitian}} \times 20\%) + (C_{\text{magang}} \times 10\%) + (C_{\text{pengabdian}} \times 10\%) + (C_{\text{dosen}} \times 20\%) + (C_{\text{layanan}} \times 10\%) + (C_{\text{kerjasama}} \times 10\%)$						
Dimana:						
1. Persentase Tingkat Pemenuhan Sertifikasi Pelatihan oleh Lembaga yang Berwenang (Csertifikasi) 2. Persentase penelitian, HAKI dan Produk Inovasi Dosen dan Mahasiswa (Cpenelitian) 3. Persentase Magang Dosen di Bidang Transportasi (Cmagang) 4. Persentase Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang Berdampak di Bidang Transportasi (Cpengabdian) 5. Persentase Kualitas dan Kuantitas Dosen (Cdosen) 6. Persentase Tingkat Kualitas Layanan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara (Clayanan) 7. Persentase Kerjasama di bidang Pendidikan dan pelatihan dengan <i>stakeholder</i> transportasi dan pendidikan (Ckerjasama)						
SATUAN						
Persen						
PENANGGUNG JAWAB DATA						
BPSDMP						
Catatan						

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2025	2026	2027	2028	2029
T2	Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas					
SP 3	Meningkatnya kualitas Penjaminan mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi pada Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL) dan Lembaga Diklat Pelatihan Transportasi					
IKP 3	Indeks Penjaminan Mutu	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00
DEFINISI						
Persentase penjaminan mutu yang dihitung berdasarkan jumlah kriteria Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP)						
SUMBER DATA						
1. Indeks Kebijakan Pengembangan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara (Ckebijakan) 2. Tingkat Pemenuhan Evaluasi dan Sistem Informasi Diklat Transportasi (Cevaluasi) 3. Persentase Kerja Sama di bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN Perhubungan dengan <i>stakeholder</i> Transportasi dan Pendidikan (Cksdiklat)						
CARA MENGHITUNG						
Indeks Penjaminan Mutu: $(Ckebijakan \times 30\%) + (Cevaluasi \times 40\%) + (Cksdiklat \times 30\%)$ Dimana: - Indeks Kebijakan Pengembangan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara (Ckebijakan) - Tingkat Pemenuhan Evaluasi dan Sistem Informasi Diklat Transportasi (Cevaluasi) - Persentase Kerja Sama di bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN Perhubungan dengan <i>stakeholder</i> Transportasi dan Pendidikan (Cksdiklat)						
SATUAN						
Persen						
PENANGGUNG JAWAB DATA						
BPSDMP						
Catatan						

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
T3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan adaptif di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan					
SP 4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola yang Baik di BPSDMP					
IKP 4	Indeks Tata Kelola Lembaga BPSDMP	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00
DEFINISI						
Persentase peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang dihitung berdasarkan kualitas Program dan Pelayanan.						
SUMBER DATA						
1. Data Persentase Peserta Pelatihan Aparatur 2. Data Indeks Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan 3. Data Indeks Profesionalisme ASN 4. Data Indeks Regulasi BPSDMP 5. Data Persentase Pemenuhan Akuntabilitas di Lingkungan BPSDMP 6. Data Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik di Lingkungan BPSDMP 7. Data Persentase Pelaksanaan Kerja Sama dan Kemitraan 8. Data Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 9. Data Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)						
CARA MENGHITUNG						
Indeks Tata Kelola Lembaga BPSDMP: $(Caparatur \times 10\%) + (CKebijakan \times 10\%) + (CSDM \times 10\%) + (Cregulasi \times 10\%) + (Cakuntabilitas \times 10\%) + (Cinformasi \times 10\%) + (Ckerjasama \times 10\%) + (CIKPA \times 15\%) + (CSAKIP \times 15\%)$ Dimana: 1. Persentase Peserta Pelatihan Aparatur (Caparatur) 2. Indeks Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan (Ckebijakan) 3. Indeks Profesionalisme ASN (CSDM) 4. Indeks Regulasi BPSDMP (Cregulasi) 5. Persentase Pemenuhan Akuntabilitas di Lingkungan BPSDMP (Cakuntabilitas) 6. Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik di Lingkungan BPSDMP (Cinformasi) 7. Persentase Pelaksanaan Kerja Sama dan Kemitraan (Ckerjasama2) 8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (CIKPA) 9. Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) BPSDMP (CSAKIP)						
SATUAN						
Persen						
PENANGGUNG JAWAB DATA						
BPSDMP						
Catatan						

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
T1	Terwujudnya SDM transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing.					
SK 1	Meningkatnya Kompetensi SDM Transportasi Darat/Laut/Udara					
IKK 1	Tingkat Penyerapan Diklat Pembentukan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara yang Berkompetensi	70,00	70,50	71,00	71,50	72,00
DEFINISI						
Persentase jumlah lulusan Diklat Pembentukan tahun (n-1) yang telah mendapat pekerjaan pada tahun n dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun dibandingkan dengan seluruh lulusan Diklat Pembentukan yang lulus pada tahun (n-1).						
SUMBER DATA						
1. Data Peserta Diklat Pembentukan Matra Darat, Laut, dan Udara di Lingkungan BPSDMP						
2. Data <i>Tracer Study</i> Lulusan Diklat Pembentukan Matra Darat, Laut, dan Udara di Lingkungan BPSDMP						
CARA MENGHITUNG						
Tingkat Penyerapan Diklat Pembentukan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara yang Berkompetensi: $\frac{(\text{Jumlah Lulusan Diklat Pembentukan pada tahun } n - 1 \text{ yang telah mendapat pekerjaan pada tahun } (n) \leq 1 \text{ tahun})}{\text{Jumlah keseluruhan lulusan Diklat Pembentukan pada tahun } (n - 1)} \times 100$						
SATUAN						
Persen						
PENANGGUNG JAWAB DATA						
Sekolah Tinggi, Politeknik, dan Akademi, serta BP3IP						
Catatan						
Indikator Tingkat Penyerapan Diklat Pembentukan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara yang Berkompetensi tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029.						

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
T1	Terwujudnya SDM transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing.					
SK 1	Meningkatnya Kompetensi SDM Transportasi Darat/Laut/Udara					
IKK 2	Tingkat Lulusan SDM Transportasi yang Bersertifikat Kompetensi	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00
DEFINISI						
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi pada lembaga diklat BPSDM Perhubungan yang akan menghasilkan lulusan sumber daya manusia berkualitas di bidang transportasi darat, laut dan udara yang dapat mendukung layanan transportasi sesuai perkembangan teknologi transportasi.						
SUMBER DATA						
1. Jumlah Lulusan Diklat Pembentukan; 2. Jumlah Lulusan Diklat Teknis; dan 3. Jumlah Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat.						
CARA MENGHITUNG						
Tingkat Lulusan SDM Transportasi yang Bersertifikat Kompetensi: $\frac{\text{Jumlah Lulusan Diklat Transportasi Pada Tahun } (n)}{\text{Target Lulusan Diklat Transportasi Pada Tahun } (n)} \times 100\%$						
SATUAN						
Persen						
PENANGGUNG JAWAB DATA						
Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, dan Balai						
Catatan						
Indikator Tingkat Lulusan SDM Transportasi yang Bersertifikat Kompetensi tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029.						

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
T1	Terwujudnya SDM transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing.					
SK 1	Meningkatnya Kompetensi SDM Transportasi Darat/Laut/Udara					
IKK 3	Persentase Peserta Diklat Transportasi	91,20	92,00	92,80	93,60	94,40
DEFINISI						
Jumlah Peserta Diklat Transportasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pada tahun (n) dibandingkan dengan target peserta Diklat Transportasi pada tahun (n)						
SUMBER DATA						
4. Jumlah Peserta Diklat Pembentukan;						
5. Jumlah Peserta Diklat Teknis; dan						
6. Jumlah Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat						
CARA MENGHITUNG						
Persentase Peserta Diklat Transportasi: $\frac{\text{Jumlah Peserta Diklat Transportasi Pada Tahun (n)}}{\text{Target Peserta Diklat Transportasi Pada Tahun (n)}} \times 100\%$						
SATUAN						
Persen						
PENANGGUNG JAWAB DATA						
Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, dan Balai						
Catatan						

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
T2	Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas					
SK 1	Meningkatnya Akreditasi Lembaga Pendidikan Vokasi, Sertifikasi Pelatihan dan Tenaga Kerja Sektor Transportasi Darat/Laut/Udara					
IKK 4	Tingkat Pemenuhan Akreditasi dan Sertifikasi	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00
DEFINISI						
Merupakan Penjumlahan antara Nilai Akreditasi Lembaga dan Persentase jumlah Program Studi yang terakreditasi minimal “Baik Sekali” dibandingkan dengan total keseluruhan Program Studi pada Perguruan Tinggi di Lingkungan BPSPMP.						
SUMBER DATA						
1. Data Akreditasi Lembaga; dan 2. Data Akreditasi Program Studi.						
CARA MENGHITUNG						
Tingkat Pemenuhan Akreditasi dan Sertifikasi: $(\text{Akreditasi Lembaga} \times 60\%) + \left(\frac{\text{Jumlah Program Studi Terakreditasi Minimal "Baik Sekali"}}{\text{Jumlah Seluruh Program Studi}} \times 40\% \right)$						
SATUAN						
Persen						
PENANGGUNG JAWAB DATA						
Sekolah Tinggi, Politeknik, dan Akademi						
Catatan						
1. Lembaga Pendidikan yang sudah terakreditasi bernilai 100 selain dari itu 0; dan 2. Balai diklat mendapatkan nilai penuh (40%) untuk meta indikator akreditasi program studi.						

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
T1	Terwujudnya SDM transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing.					
SK 2	Meningkatnya Kompetensi ASN Transportasi					
IKK 6	Tingkat Pemenuhan ASN Transportasi Program Pembentukan	100	100	100	100	100
DEFINISI						
Jumlah Lulusan Diklat Pembentukan Program Pola Pembibitan pada tahun (n) dibandingkan dengan target Lulusan Diklat Pembentukan Program Pola Pembibitan pada tahun (n)						
SUMBER DATA						
Data Lulusan Diklat Pembentukan Program Pola Pembibitan dari Lembaga Pendidikan BPSDMP yang melaksanakan Program Pola Pembibitan						
CARA MENGHITUNG						
Tingkat Pemenuhan ASN Transportasi Program Pembentukan: $\frac{\text{Jumlah Lulusan Diklat Pembentukan Program Pola Pembibitan Pada Tahun (n)}}{\text{Target Lulusan Diklat Pembentukan Program Pola Pembibitan Pada Tahun (n)}} \times 100\%$						
SATUAN						
Persen						
PENANGGUNG JAWAB DATA						
Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi yang melaksanakan Program Pola Pembibitan						
Catatan						

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
T1	Terwujudnya SDM transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing.					
SK 2	Meningkatnya Kompetensi ASN Transportasi					
IKK 7	Tingkat Pemenuhan ASN Transportasi Program Pelatihan	100	100	100	100	100
DEFINISI						
Jumlah Lulusan Program Pelatihan ASN Internal Satuan Kerja pada tahun (n) dibandingkan dengan target Lulusan Program Pelatihan ASN Internal Satuan Kerja pada tahun (n)						
SUMBER DATA						
Data lulusan program pelatihan satuan kerja di lingkungan BPSDMP						
CARA MENGHITUNG						
Tingkat Pemenuhan ASN Transportasi Program Pelatihan: $\frac{\text{Jumlah Lulusan Program Pelatihan ASN Pada Tahun (n)}}{\text{Target Lulusan Program Pelatihan ASN Pada Tahun (n)}} \times 100\%$						
SATUAN						
Persen						
PENANGGUNG JAWAB DATA						
Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Balai dan Pusbang Darat, Laut, Udara						
Catatan						

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
T1	Terwujudnya SDM transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing.					
SK 3	Meningkatnya Kompetensi SDM Transportasi					
IKK 8	Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Program Pembentukan	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00
DEFINISI						
Jumlah Lulusan Diklat Pembentukan jalur Non Pola Pembibitan (Mandiri) pada tahun (n) dibandingkan dengan target Lulusan Diklat Pembentukan jalur Non Pola Pembibitan (Mandiri) pada tahun (n)						
SUMBER DATA						
Data lulusan diklat pembentukan jalur Non Pola Pembibitan (Mandiri) dari lembaga pendidikan di lingkungan BPSDMP.						
CARA MENGHITUNG						
Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Program Pembentukan: $\frac{\text{Jumlah Lulusan Diklat Pembentukan Jalur Non Pola Pembibitan Pada Tahun (n)}}{\text{Target Lulusan Diklat Pembentukan Jalur Non Pola Pembibitan Pada Tahun (n)}} \times 100\%$						
SATUAN						
Persen						
PENANGGUNG JAWAB DATA						
Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi, serta BP3IP						
Catatan						

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
T1	Terwujudnya SDM transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing.					
SK 3	Meningkatnya Kompetensi SDM Transportasi					
IKK 9	Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Program Pelatihan	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00
DEFINISI						
Jumlah Lulusan Pelatihan pada tahun (n) dibandingkan dengan target Lulusan Pelatihan pada tahun (n)						
SUMBER DATA						
Data lulusan pelatihan dari lembaga pendidikan di lingkungan BPSDMP.						
CARA MENGHITUNG						
Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Program Pelatihan: $\frac{\text{Jumlah Lulusan Pelatihan Pada Tahun (n)}}{\text{Target Lulusan Pelatihan Pada Tahun (n)}} \times 100\%$						
SATUAN						
Persen						
PENANGGUNG JAWAB DATA						
Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, dan Balai						
Catatan						
Jumlah lulusan pelatihan dalam indi 1. Jumlah Lulusan Diklat Teknis; dan 2. Jumlah Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat.						

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
T2	Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas					
SK 4	Meningkatnya Akreditasi Lembaga Pendidikan Vokasi, Sertifikasi Pelatihan dan Tenaga Kerja Sektor Transportasi Darat/Laut/Udara					
IKK 10	Tingkat Pemenuhan Sertifikasi Pelatihan oleh Lembaga yang Berwenang	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00
DEFINISI						
Persentase jumlah pelatihan yang tersertifikasi dibandingkan dengan jumlah pelatihan di Perguruan Tinggi dan Balai di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan baik nasional maupun internasional						
SUMBER DATA						
1. Data jenis pelatihan yang diselenggarakan pada tahun (n)						
2. Data jenis pelatihan yang tersertifikasi oleh lembaga yang berwenang baik nasional maupun internasional						
CARA MENGHITUNG						
Tingkat Pemenuhan Sertifikasi Pelatihan oleh Lembaga yang Berwenang: $\frac{\text{Jumlah Pelatihan yang Tersertifikasi pada Tahun (n)}}{\text{Jumlah Seluruh Pelatihan pada Tahun (n)}} \times 100\%$						
SATUAN						
Persen						
PENANGGUNG JAWAB DATA						
Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, dan Balai						
Catatan						

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
T2	Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas					
SK 4	Meningkatnya Akreditasi Lembaga Pendidikan Vokasi, Sertifikasi Pelatihan dan Tenaga Kerja Sektor Transportasi Darat/Laut/Udara					
IKK 11	Persentase penelitian, HAKI dan Produk Inovasi Dosen dan Mahasiswa	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00

DEFINISI

Kuantitas dan Kualitas penelitian diukur dari komponen sebagai berikut:

1. Jumlah Penelitian yang dihasilkan.
Yaitu jumlah penelitian yang telah diselesaikan oleh dosen pada tahun (n)
2. Penelitian yang dipublikasikan.
Yaitu jumlah penelitian yang dipublikasikan pada tahun (n).
3. Karya HaKI berupa Hak Cipta/Paten, dan/atau Produk Inovasi
 - a. Karya HAKI: Karya yang mendapatkan HAKI pada tahun berjalan, sesuai dengan UU No 28 Tahun 2014 dan UU No 14 Tahun 2001 dan PP RI No 37 Tahun 2009 tentang Dosen, dapat berupa Hak Cipta dan Hak kekayaan Industri (Hak Paten, Hak Merek, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Hak Rahasia Dagang, Hak Indikasi). HAKI diakui sesuai dengan instansi/unit yang ditetapkan.
 - b. Produk Inovasi: Karya produk yang dihasilkan dari kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan dan/atau perekayasaan oleh lembaga/unit, yang menghasilkan kebaruan yang diterapkan dan bermanfaat secara komersial, ekonomi dan atau sosial budaya.

SUMBER DATA

1. Data jumlah penelitian yang dihasilkan
2. Data jumlah penelitian yang dipublikasikan
3. Data karya HAKI dan produk Inovasi yang dihasilkan

CARA MENGHITUNG

Persentase penelitian, HAKI dan Produk Inovasi Dosen dan Mahasiswa:

Realisasi per Komponen Penilaian:

1. Realisasi jumlah Penelitian yang dihasilkan

$$\left(\frac{\text{Realisasi penelitian yang dihasilkan dosen pada tahun (n)}}{\text{Target penelitian yang dihasilkan dosen pada tahun (n)}} \right) \times 100 \% \times \begin{matrix} \text{Bobot} \\ \text{Komponen} \\ (30\%) \end{matrix}$$

2. Realisasi Penelitian yang dipublikasikan

$$\left(\frac{\text{Jumlah penelitian yang dipublikasikan pada tahun (n) x \textbf{Nilai}}}{\text{Target \textbf{Nilai} Penelitian yang dipublikasikan pada tahun (n)}} \right) \times 100 \% \times \begin{matrix} \text{Bobot} \\ \text{Komponen} \\ (35\%) \end{matrix}$$

Ketentuan **Nilai**, sebagai berikut:

Uraian		Nilai
a.	Jenis Penelitian yang menghasilkan PNPB bagi BLU	10
b.	Jenis penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Internasional Bereputasi	7
c.	Jenis penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Internasional	5
d.	Jenis penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Nasional Terakreditasi	3
e.	Jenis penelitian yang dipublikasikan di Prosiding Terindex	2
f.	Jenis penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Nasional/ISSN	1
g.	Jenis penelitian yang diseminarkan dengan melibatkan pihak eksternal	0,5

3. Realisasi Karya HAKI berupa Hak Cipta/Paten, dan/atau Produk Inovasi

$$\left(\frac{\text{Jumlah Karya HaKI yang dihasilkan pada tahun 2025} \times \text{Nilai}}{\text{Target Nilai Karya HaKI pada tahun 2025}} \right) \times 100 \% \times \begin{matrix} \text{Bobot} \\ \text{Komponen} \\ (35\%) \end{matrix}$$

Ketentuan **Nilai** sebagai berikut:

Uraian		Nilai
a	Karya yang diusulkan HAKI	1
b	Karya yang mendapatkan Hak Cipta	3
c	Produk Inovasi yang dihasilkan	5
d	Karya yang mendapatkan Hak Paten	7
e	Hak Paten yang sudah dikomersialkan	50

Realisasi IKU:

= Realisasi 1 + Realisasi 2 + Realisasi 3

SATUAN

Persen

PENANGGUNG JAWAB DATA

Sekolah Tinggi, Politeknik, dan Akademi

Catatan

- Merupakan salah satu Key Performance Indicator (KPI) dalam Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
- Jumlah kegiatan penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan Internasional.

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
T2	Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas					
SK 4	Meningkatnya Akreditasi Lembaga Pendidikan Vokasi, Sertifikasi Pelatihan dan Tenaga Kerja Sektor Transportasi Darat/Laut/Udara					
IKK 12	Persentase magang dosen di bidang transportasi	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00
DEFINISI						
Jumlah dosen vokasi (teknis di bidang transportasi) yang magang di bidang transportasi dibandingkan dengan jumlah seluruh dosen vokasi (teknis di bidang transportasi) di Perguruan Tinggi di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan						
SUMBER DATA						
1. Data jumlah dosen vokasi (teknis di bidang transportasi); dan 2. Data jumlah dosen vokasi (teknis di bidang transportasi) yang melakukan magang baik pada operator, regulator maupun industri di bidang transportasi						
CARA MENGHITUNG						
Persentase magang dosen di bidang transportasi: $\frac{\text{Jumlah Dosen Vokasi yang Magang pada Tahun (n)}}{\text{Jumlah Seluruh Dosen Vokasi pada Tahun (n)}} \times 100\%$						
SATUAN						
Persen						
PENANGGUNG JAWAB DATA						
Sekolah Tinggi, Politeknik, dan Akademi						
Catatan						
Dosen dalam Indikator ini merupakan Dosen pengampu mata kuliah vokasi (teknis di bidang transportasi)						

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
T2	Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas					
SK 4	Meningkatnya Akreditasi Lembaga Pendidikan Vokasi, Sertifikasi Pelatihan dan Tenaga Kerja Sektor Transportasi Darat/Laut/Udara					
IKK 14	Persentase kualitas dan kuantitas dosen	65,00	65,50	66,00	66,50	67,00

DEFINISI

1. Rasio Dosen Tetap terhadap Taruna Diklat Pembentukan
yaitu rasio antara dosen tetap dalam hal ini adalah tenaga pengajar yang telah memiliki SK Jabatan Fungsional Dosen (baik yang sudah memiliki sertifikasi dosen maupun belum) maupun dosen yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dengan memperhatikan *homebase* dosen tersebut dibandingkan dengan jumlah mahasiswa pada tahun (n).
Sesuai dengan borang BAN PT, rasio dosen terhadap taruna diklat pembentukan yaitu 1:20 - 1:30
1. Persentase Dosen Tetap berkualifikasi S3 dan/atau berprestasi internasional dan/atau sertifikat keahlian (darat, udara) ANT-I/ATT-I (laut)
yaitu persentase dosen tetap yang berkualifikasi S3 dan/atau berprestasi internasional dan/atau sertifikat keahlian (darat, udara) ANT-I/ATT-I (laut) pada tahun (n) dari seluruh jumlah dosen tetap tahun (n).
2. Persentase Dosen Tetap dengan background pendidikan yang linier
Yaitu persentase dosen tetap yang memiliki kesesuaian latar belakang ilmu yang diperoleh dosen pada program Magister atau Doktor dengan ilmu yang akan diajarkan untuk mencapai kompetensi atau capaian pembelajaran lulusannya pada program studi tempat dosen tersebut mengajar berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 887/E.E3/MI/2014

SUMBER DATA

1. Jumlah Dosen Tetap di Perguruan Tinggi
2. Jumlah Taruna Diklat Pembentukan
3. Data Kualifikasi Dosen

CARA MENGHITUNG

Persentase Kualitas dan Kuantitas Dosen:
Realisasi 1 + Realisasi 2 + Realisasi 3

Realisasi per Komponen Penilaian:

1. Realisasi Rasio Dosen terhadap Taruna Diklat Pembentukan

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Jumlah Dosen Tetap pada Tahun (n)}}{\text{Jumlah Taruna Diklat Pembentukan pada Tahun (n)}}$$

Ketentuan Nilai sebagai berikut:

Rasio	Nilai
1:20-1:30	100%
1:17-1:< 20 dan 1:>30-1:33	85%
1:14-1:<17 dan 1:>33-1:36	75%
1:11-1:<14 dan 1:>36-1:39	65%
1:<11 dan 1:>39	55%

Realisasi Rasio Dosen = **Nilai** x Bobot Komponen (40%)

2. Realisasi persentase dosen tetap berkualifikasi S3 dan/atau berprestasi internasional dan/atau sertifikat keahlian untuk matra darat dan udara atau ANT-I/ATT-I untuk matra laut

Jumlah dosen tetap berkualifikasi S3
pada tahun 2025 dan/atau berprestasi
internasional dan/atau sertifikat
keahlian (darat, udara) ANT-I/ATT-I
(laut)

Jumlah dosen tetap pada tahun 2025

$\times 100 \% \times$ Bobot
Komponen
(40%)

3. Realisasi persentase dosen tetap dengan background pendidikan yang linier

Jumlah dosen tetap dengan background
pendidikan yang linier

Jumlah dosen tetap pada tahun 2025

$\times 100 \% \times$ Bobot Komponen (20%)

SATUAN

Persen

PENANGGUNG JAWAB DATA

Sekolah Tinggi, Politeknik, dan Akademi

Catatan

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
T2	Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas					
SK 5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat/Laut/Udara					
IKK 15	Tingkat Kualitas Layanan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara	3,05	3,10	3,15	3,20	3,25
DEFINISI						
Kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan BPSDMP perhubungan yang merupakan Layanan Pendidikan dan Pelatihan.						
SUMBER DATA						
Hasil survei terhadap <i>stakeholder</i> atau pengguna jasa layanan.						
CARA MENGHITUNG						
a. Petugas survei menggunakan data sekunder dari Unit Penyelenggara Pelayanan Publik berupa populasi tahunan. Jumlah responden minimal mewakili populasi <i>peak season</i> tahunan dan ditentukan dengan menggunakan tabel sampel dari Morgan and Krejcie atau dengan perhitungan sebagai berikut: $S = \{\lambda^2 . N . P . Q\} / \{d^2 (N - 1) + \lambda^2 . P . Q\}$ Dimana: S = jumlah sampel λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10% N = populasi P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5 d = 0,0 b. Teknik pelaksanaan survei dilakukan dengan cara wawancara/interaksi kepada responden. Survei yang dilaksanakan melalui e-survey bisa dilakukan melalui layar monitor yang telah disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik atau melalui petugas dengan menggunakan gawai (alat komunikasi). c. Apabila terdapat keterbatasan sarana dan prasarana (jaringan internet), maka survei dapat dilakukan secara manual dengan menyebarkan formulir survei kepada responden. d. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam formulir survei elektronik/manual memuat sembilan unsur SKM yaitu persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, sarana dan prasarana. Unsur-unsur tersebut dapat digunakan seluruhnya atau berupa kombinasi dari beberapa unsur disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (contoh formulir survei pada lampiran 3). e. Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda yang bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu: 1) Tidak baik, diberi nilai persepsi 1; 2) Kurang baik, diberi nilai persepsi 2; 3) Baik, diberi nilai persepsi 3; 4) Sangat baik, diberi nilai persepsi 4. f. Layanan yang disurvei adalah perjenis layanan dan disesuaikan dengan Standar Pelayanan. g. Melakukan tabulasi data secara berurutan untuk setiap unsur. Skala likert untuk masing-masing pertanyaan (unsur) terdiri dari buruk (nilai 1), kurang baik (nilai 2), baik (nilai 3), dan sangat baik (nilai 4). Masing-masing jumlah responden yang memilih skala likert tersebut disalin kedalam tabel kemudian dikalikan nilai masing-masing dan dirata-ratakan. h. Menghitung bobot untuk masing-masing pertanyaan (unsur) dengan melakukan pembagian antara 1/jumlah unsur yang digunakan, misalkan jumlah unsur yang digunakan ada sembilan unsur maka = $1/9 = 0,11$. i. Melakukan perhitungan Nilai Rata – Rata Tertimbang (NRR) dengan cara mengalikan bobot dengan nilai rata-rata untuk masing-masing pertanyaan. j. Langkah selanjutnya adalah menjumlahkan nilai rata-rata tertimbang untuk semua pertanyaan. k. Langkah berikutnya adalah mengalikan jumlah nilai rata-rata tertimbang dengan 25 maka diperoleh Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Bilangan pengali nilai dasar 25 dimaksudkan untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100.						

- I. Kategori mutu pelayanan dan kinerja pelayanan dapat digolongkan kedalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori Mutu Layanan

No	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber: PermenPANRB No. 14 Tahun 2017

- m. Agregasi perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Agregasi perhitungan survei kepuasan masyarakat adalah proses pengumpulan hasil SKM pada masing-masing subsektor untuk dilakukan penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 2) Agregasi terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Agregasi Indeks Layanan Publik dan Agregasi Indeks Kepuasan Masyarakat. Agregasi Indeks Layanan Publik digunakan untuk menghitung indeks keseluruhan dalam Lingkungan Kementerian Perhubungan. Sedangkan Agregasi Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan untuk menghitung indeks dalam satu Unit Kerja Eselon 1.
- 3) Agregasi Indeks Layanan Publik dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

$$\text{Agregasi Indeks Layanan Publik} = \frac{\sum \text{agregasi IKM seluruh subsektor}}{\sum \text{Unit Kerja Eselon I yang melaksanakan SKM}}$$

- 4) Agregasi Indeks Kepuasan Masyarakat untuk masing-masing subsektor dilakukan dengan metode pendekatan:

$$\text{Agregasi IKM} = \sum (IKM_a \times f_a) + (IKM_b \times f_b) + (IKM_c \times f_c) + (IKM_d \times f_d)$$

Keterangan:

$IKM_{a,b,c,d}$ = Nilai rata-rata IKM pada Unit Pelayanan Publik mulai tipe tertinggi sampai dengan tipe terendah

$f_{a,b,c,d}$ = Faktor koefisien pada masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan

Publik mulai tipe tertinggi sampai dengan tipe terendah. Faktor koefisien diperoleh dengan membagi populasi pada unit pelayanan publik tipe tertentu dengan jumlah total populasi pada semua tipe unit pelayanan publik. Populasi yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. untuk Unit Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan populasi yang digunakan adalah jumlah Peserta Diklat pertahun.

SATUAN

Indeks

PENANGGUNG JAWAB DATA

Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, dan Balai

Catatan

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
T2	Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas					
SK 6	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan SDM yang Menunjang Kebijakan Sektor Transportasi Darat/Laut/Udara					
IKK 17	Indeks Kebijakan Pengembangan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara	100	100	100	100	100
DEFINISI						
Persentase jumlah Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) yang dihasilkan lembaga Diklat dibandingkan dengan total keseluruhan target NSPK lembaga diklat di lingkungan BPSDMP.						
SUMBER DATA						
CARA MENGHITUNG						
Indeks Kebijakan Pengembangan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara: $\frac{\text{Jumlah NSPK yang dihasilkan lembaga pada tahun (n)}}{\text{Target NSPK yang dihasilkan lembaga pada tahun (n)}} \times 100\%$						
SATUAN						
Persen						
PENANGGUNG JAWAB DATA						
Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat, Laut, dan Udara						
Catatan						

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
T2	Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas					
SK 7	Meningkatnya kualitas evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan BPSDMP					
IKK 18	Tingkat Pemenuhan Evaluasi dan Sistem Informasi Diklat Transportasi	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00
DEFINISI						
Persentase Jumlah Diklat yang dinilai Sangat Baik pada UPT Matra Darat/Laut/Udara pada tahun (n) dibandingkan dengan Seluruh Diklat yang dilaksanakan pada tahun (n)						
SUMBER DATA						
1. Daftar Diklat yang dilaksanakan di UPT Matra Darat/Laut/Udara; dan 2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Diklat yang dilaksanakan di UPT Matra Darat/Laut/Udara.						
CARA MENGHITUNG						
Tingkat Pemenuhan Evaluasi dan Sistem Informasi Diklat Transportasi: $\frac{\text{Jumlah Diklat yang dinilai Sangat Baik pada tahun (n)}}{\text{Jumlah Seluruh Diklat yang Dilaksanakan pada tahun (n)}} \times 100\%$						
SATUAN						
Persen						
PENANGGUNG JAWAB DATA						
Pusat Pengembangan SDM Darat, Laut, dan Udara						
Catatan						

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
T2	Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas					
SK 7	Meningkatnya kualitas evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan BPSDMP					
IKK 19	Persentase Kerja Sama di bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN Perhubungan dengan Stakeholder Transportasi dan Pendidikan	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00
DEFINISI						
Persentase jumlah kerja sama di bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN Perhubungan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh kerja sama yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Darat, Laut, dan Udara.						
SUMBER DATA						
1. Jumlah kerja sama di bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN Perhubungan yang ditindaklanjuti; dan 2. Jumlah seluruh kerja sama yang masih berlaku.						
CARA MENGHITUNG						
Persentase Kerja sama di bidang Pendidikan dan pelatihan dengan <i>stakeholder</i> transportasi dan pendidikan: $\left(\frac{\text{Jumlah kerja sama yang ditindaklanjuti pada tahun (n)}}{\text{Jumlah kerja sama yang berlaku pada tahun (n)}} \times 60\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah kerja sama yang disusun pada tahun (n)}}{\text{Target kerja sama yang disusun pada tahun (n)}} \times 40\% \right)$						
SATUAN						
Persen						
PENANGGUNG JAWAB DATA						
Pusat Pengembangan SDM Darat, Laut, dan Udara						
Catatan						

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
T3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan					
SK 8	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan					
IKK 20	Persentase Peserta Pelatihan Aparatur	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00
DEFINISI						
Persentase jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Aparatur pada tahun (n) dibandingkan dengan target peserta pelatihan Aparatur pada tahun (n).						
SUMBER DATA						
1. Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Aparatur; 2. Target peserta pelatihan Aparatur.						
CARA MENGHITUNG						
Persentase Peserta Pelatihan Aparatur: $\frac{\text{Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Aparatur Pada Tahun (n)}}{\text{Target Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Aparatur Pada Tahun (n)}} \times 100\%$						
SATUAN						
Persen						
PENANGGUNG JAWAB DATA						
Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan/Balai Aparatur						
Catatan						

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
T3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan					
SK 8	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan					
IKK 21	Indeks Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan	100	100	100	100	100
DEFINISI						
Persentase jumlah NSPK yang dihasilkan lembaga diklat dibandingkan dengan total keseluruhan target NSPK lembaga diklat di lingkungan Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan.						
SUMBER DATA						
1. Target Jumlah Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Tahun (n); dan 2. Realisasi Jumlah Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Tahun (n)						
CARA MENGHITUNG						
Indeks Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan : $\left(\frac{\text{Jumlah Norma/Standar/Pedoman/Kriteria yang disusun pada tahun (n)}}{\text{Target Norma/Standar/Pedoman/Kriteria yang disusun pada tahun (n)}} \times 100\% \right)$						
SATUAN						
Persen						
PENANGGUNG JAWAB DATA						
Pusat Pengembangan SDM Aparatur						
Catatan						

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
T3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan					
SK 9	Terwujudnya Organisasi yang Agile dan SDM Unggul					
IKK 22	Indeks Profesionalisme ASN	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00
DEFINISI						
Instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN yang mencakup dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin.						
SUMBER DATA						
Unit Pengelola Kepegawaian Satuan Kerja di Lingkungan BPSDMP						
CARA MENGHITUNG						
Penilaian tingkat profesionalitas pegawai ASN berdasarkan 4 (empat) dimensi, yaitu dimensi Kualifikasi (25%) dari keseluruhan pengukuran, Kompetensi (40%) dari keseluruhan pengukuran dan Kinerja (30%) dari keseluruhan pengukuran serta Disiplin (5%) dari keseluruhan pengukuran.						
NO	Dimensi					Bobot
A	Kualifikasi (Pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS)					
1	Pendidikan S-3 (Strata Tiga).					25
2	Pendidikan S-2 (Strata Dua).					20
3	Pendidikan S-1 (Strata Satu)/DIV (Diploma Empat).					15
4	Pendidikan D-III (Diploma Tiga).					10
5	Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat.					5
6	Di bawah SLTA.					1
Total Kualifikasi					25%	
B	Kompetensi					
1	Diklat Kepemimpinan (Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki, dan Bobot nilai sebesar 0 (nol) yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan).					15
2	Diklat Fungsional Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki dan Bobot nilai sebesar 0 (nol) yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional).					15
3	Diklat Teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional dan Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti					15 / 22,5

		pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir, dan Bobot nilai sebesar 0 (nol) yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan Teknis.	
	4	Seminar/Workshop/Magang/Kursus/Sejenisnya Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional dan Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan Bobot nilai sebesar 0 (nol) yang belum mengikuti Seminar/Workshop/Magang/Kursus/Sejenisnya dalam 2 (dua) tahun terakhir.	10 / 17,5
Total Kompetensi			40%
C	Kinerja (Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP))		
1	PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.		30
2	PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.		25
3	PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.		15
4	PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir.		5
5	PNS yang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.		1
Total Kinerja			30%
D	Disiplin		
1	PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.		5
2	PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan.		3
3	PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang.		2
4	PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.		1
Total Disiplin			5%
Indeks Profesionalisme ASN (A+B+C+D)			100%
SATUAN			
Indeks			
PENANGGUNG JAWAB DATA			
Seluruh Satuan Kerja			
Catatan			

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
T3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan					
SK 9	Terwujudnya Organisasi yang Agile dan SDM Unggul					
IKK 23	Indeks Regulasi BPSDMP	100	100	100	100	100
DEFINISI						
Persentase realisasi penyusunan konsep baru/revisi/ratifikasi regulasi pada tahun (n) dibandingkan dengan target penyusunan konsep baru/revisi/ratifikasi regulasi pada tahun (n).						
SUMBER DATA						
1. Realisasi penyusunan konsep baru/revisi/ratifikasi regulasi pada tahun (n); 2. Target penyusunan konsep baru/revisi/ratifikasi regulasi pada tahun (n).						
CARA MENGHITUNG						
Indeks Regulasi BPSDMP: $\frac{\text{Realisasi Penyusunan Konsep Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Pada Tahun (n)}}{\text{Target Penyusunan Konsep Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Pada Tahun (n)}} \times 100\%$						
SATUAN						
Persen						
PENANGGUNG JAWAB DATA						
Sekretariat						
Catatan						

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
T3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan					
SK 10	Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Berorientasi pada Layanan Prima					
IKK 24	Persentase Pemenuhan Akuntabilitas di Lingkungan BPSDMP	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00
DEFINISI						
Persentase tingkat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan berupa penyediaan sarana dan prasarana bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta layanan dukungan manajemen internal dan sarana prasarana internal.						
SUMBER DATA						
1. Data Target dan Capaian Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; 2. Data Target dan Capaian Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; 3. Data Target dan Capaian Layanan Hukum; 4. Data Target dan Capaian Hubungan Masyarakat dan Informasi; 5. Data Target dan Capaian Protokoler; 6. Data Target dan Capaian Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal; 7. Data Target dan Capaian Layanan Sarana Internal; 8. Data Target dan Capaian Layanan Prasarana Internal.						
CARA MENGHITUNG						
Persentase Pemenuhan Akuntabilitas di Lingkungan BPSDMP: Realisasi 1 + Realisasi 2 $\text{Realisasi 1: } \frac{\text{Jumlah Unit yang Diadakan Pada Tahun (n)}}{\text{Target Unit yang Diadakan Pada Tahun (n)}} \times 50\%$ + $\text{Realisasi 2: } \frac{\text{Jumlah Layanan yang dilaksanakan Pada Tahun (n)}}{\text{Target Layanan yang dilaksanakan Pada Tahun (n)}} \times 50\%$						
SATUAN						
Persen						
PENANGGUNG JAWAB DATA						
Seluruh Satuan Kerja						
Catatan						
Satuan Kerja yang tidak melakukan pengadaan unit tertentu akan dianggap memiliki capaian 100% untuk Realisasi 1 pada periode waktu tersebut.						

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
T3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan					
SK 10	Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Berorientasi pada Layanan Prima					
IKK 25	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00
DEFINISI						
IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.						
SUMBER DATA						
1. Data Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2. Data Deviasi Halaman III DIPA 3. Data Penyerapan Anggaran 4. Data Belanja Kontraktual 5. Data Penyelesaian Tagihan 6. Data Pengelolaan UP dan TUP 7. Data Dispensasi SPM 8. Data Capaian Output						
CARA MENGHITUNG						
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA): $\sum (Revisi\ DIPA \times 10\%) + (Deviasi\ Halaman\ III\ DIPA \times 10\%) + (Penyerapan\ Anggaran \times 20\%) + (Belanja\ Kontraktual \times 10\%) + (Penyelesaian\ Tagihan \times 10\%) + (Pengelolaan\ UP\ dan\ TUP \times 10\%) + (Dispensasi\ SPM \times 5\%) + (Capaian\ Output \times 25\%)$						
SATUAN						
Nilai						
PENANGGUNG JAWAB DATA						
Seluruh Satuan Kerja						
Catatan						
Nilai IKPA diambil dari Aplikasi SPAN kemenkeu						

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
T3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan					
SK 10	Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Berorientasi pada Layanan Prima					
IKK 26	Nilai SAKIP	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00

DEFINISI

Untuk Eselon I:

Hasil evaluasi dari Inspektorat Jenderal atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Untuk Satker/UPT:

Hasil evaluasi dari Eselon I BPSDM Perhubungan atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*)

SUMBER DATA

Nilai SAKIP

CARA MENGHITUNG

Penilaian dilakukan setiap satu tahun sekali atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan komponen dan bobot sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja, dengan bobot 30%
2. Pengukuran Kinerja, dengan bobot 30%
3. Pelaporan Kinerja, dengan bobot 15%
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dengan bobot 25%

No	Predikat	Nilai c Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 – 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60 – 70	Baik , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
4.	CC	>50 – 60	Cukup (memadai) , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
5.	C	>30 – 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar

	6.	D	0 – 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.	
SATUAN					
Nilai					
PENANGGUNG JAWAB DATA					
Seluruh Satuan Kerja					
Catatan					

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
T3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan					
SK 11	Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik di Lingkungan BPSDMP					
IKK 27	Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik di Lingkungan BPSDMP	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00
DEFINISI						
Merupakan perbandingan antara Jumlah Data dan Informasi yang Dapat diakses pada tahun (n) dengan Jumlah keseluruhan Data dan Informasi pada tahun (n).						
SUMBER DATA						
Daftar Data dan Informasi di lingkungan BPSDMP						
CARA MENGHITUNG						
Tingkat Pemenuhan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik di Lingkungan BPSDMP: $\frac{\text{Jumlah Data dan Informasi yang dapat diakses Pada Tahun (n)}}{\text{Jumlah Keseluruhan Data dan Informasi pada Tahun (n)}} \times 100\%$						
SATUAN						
Persen						
PENANGGUNG JAWAB DATA						
Sekretariat BPSDMP						
Catatan						

INDIKATOR KINERJA		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
T3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan					
SK 12	Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP					
IKK 28	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama dan Kemitraan	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00
DEFINISI						
Merupakan perbandingan antara tindak lanjut kerja sama yang telah disusun dengan capaian target kerja sama yang akan disusun pada tahun (n).						
SUMBER DATA						
1. Target Kerja Sama pada Tahun (n); 2. Daftar Kerja Sama pada Tahun (n); 3. Jumlah Kerja Sama yang ditindaklanjuti.						
CARA MENGHITUNG						
Persentase Pelaksanaan Kerja Sama dan Kemitraan: $\left(\frac{\text{Jumlah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti pada tahun (n)}}{\text{Jumlah Seluruh Kerja Sama yang Berlaku pada tahun (n)}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah Kerja sama yang disusun pada tahun (n)}}{\text{Target kerja sama yang disusun pada tahun (n)}} \times 60\% \right)$						
SATUAN						
Persen						
PENANGGUNG JAWAB DATA						
Sekretariat dan Pusat Pengembangan SDM Aparatur/Balai Aparatur						
Catatan						